HARIAN ACEH INDONESIA

TEBAL
31 Hal
WWW.HARIANACEH.CO.ID

SENIN, 9 NOVEMBER 2026 | HARIANACEH.co.id | WWW.HARIANACEH.CO.ID · EDISI NO. 16

NASIONAL

Soal Absennya Idham Azis di Hambalang, Tito Irit Bicara

Oleh Redaksi · 9 Nov, 22.36 WIB



BANDA ACEH - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, memilih irit bicara saat dimintai tanggapan oleh awak media mengenai ketidakhadiran mantan Kapolri Jenderal (Purn.) Idham Azis dalam pertemuan Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran purnawirawan perwira tinggi Polri di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (8/11/2026) malam.Tito mengaku tidak mengetahui secara rinci alasan di balik absennya Idham Azis dalam agenda silaturahmi tersebut. Sementara Tito menegaskan, kehadirannya di Hambalang murni karena memenuhi undangan resmi dari Presiden Prabowo dan Persatuan Purnawirawan (PP) Polri.

"Saya nggak tahu, saya yang diundang. Otomatis saya hadir, udah itu aja," kata Tito yang juga mantan Kapolri, kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).

Ketika awak media kembali mencecarnya dengan pertanyaan seputar apakah status hukum mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang kini menjadi tersangka turut dibahas dalam pertemuan tertutup itu, Tito kembali menolak memberikan ulasan lebih lanjut.

"Udah itu aja," ujarnya.

Lebih lanjut, Tito memaparkan, pertemuan di Hambalang tersebut merupakan forum konsolidasi kebangsaan dan silaturahmi.

Selengkapnya di halaman 2 »

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

DALAM EDISI INI

NASIONAL 2
ACEH 21
Aneka Berita 27

NASIONAL

Giring dan Raja Juli Cabut dari PSI, Prabowo Didesak Sekalian Tendang dari Kabinet



BANDA ACEH - Keputusan Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mundur dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menuai kritik keras. Presiden Prabowo Subianto bahkan didesak sekalian mencopot keduanya dari Kabinet Merah Putih.Desakan tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah.

Selengkapnya di halaman 2 »

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Bukan Sekadar Sadap Prabowo, Yusril Ungkap Dugaan Upaya Melumpuhkan Presiden



BANDA ACEH - Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto semakin serius. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan, penyidikan perkara tersebut kini mengarah pada dugaan tindak pidana makar, termasuk kemungkinan adanya upaya melumpuhkan Presiden agar tidak dapat menjalankan pemerintahan.Yusril menegaskan, penyadapan …

Selengkapnya di halaman 3 »

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

PSI Rontok Ditinggal Tiga Tokoh Penting dari Partai, Ini Tanggapan Kaesang



BANDA ACEH - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menerima pengunduran diri tiga tokoh pentingnya, yakni Raja Juli Antoni, Isyana Bagoes Oka, dan Giring Ganesha.

Keputusan tersebut telah dikonfirmasi langsung oleh Ketua Umum DPP PSI Kaesang Pangarep pada Senin (9/11/2026) malam.

Selengkapnya di halaman 3 »

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Rp14,69 Miliar Dana APBN Mengalir ke Perusahaan Raffi Ahmad untuk Jasa Influencer



BANDA ACEH – Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti pengadaan jasa influencer senilai total Rp14.696.955.002 (sekitar Rp14,69 miliar) oleh dua kementerian kepada PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad.

Selengkapnya di halaman 4 »

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

41 BERITA

NASIONAL

Soal Absennya Idham Azis di Hambalang, Tito Irit Bicara

Oleh Redaksi · 9 Nov, 22.36 WIB



BANDA ACEH - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, memilih irit bicara saat dimintai tanggapan oleh awak media mengenai ketidakhadiran mantan Kapolri Jenderal (Purn.) Idham Azis dalam pertemuan Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran purnawirawan perwira tinggi Polri di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (8/11/2026) malam.Tito mengaku tidak mengetahui secara rinci alasan di balik absennya Idham Azis dalam agenda silaturahmi tersebut. Sementara Tito menegaskan, kehadirannya di Hambalang murni karena memenuhi undangan resmi dari Presiden Prabowo dan Persatuan Purnawirawan (PP) Polri.

“Saya nggak tahu, saya yang diundang. Otomatis saya hadir, udah itu aja,” kata Tito yang juga mantan Kapolri, kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).

Ketika awak media kembali mencecarnya dengan pertanyaan seputar apakah status hukum mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang kini menjadi tersangka turut dibahas dalam pertemuan tertutup itu, Tito kembali menolak memberikan ulasan lebih lanjut.

“Udah itu aja,” ujarnya.

Lebih lanjut, Tito memaparkan, pertemuan di Hambalang tersebut merupakan forum konsolidasi kebangsaan dan silaturahmi.

Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo memaparkan berbagai persoalan strategis bangsa, termasuk atensi khusus terhadap pencegahan kebocoran keuangan negara.

“Saya kira intinya pembicaraannya adalah Bapak Presiden menjelaskan tentang situasi kebocoran negara dan lain-lain,” lanjut Tito.

Ia menambahkan, pihak Persatuan Purnawirawan (PP) Polri pada prinsipnya menyatakan komitmen dan dukungan penuh terhadap seluruh program strategis pemerintahan Presiden Prabowo yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

“Intinya adalah PP Polri mendukung langkah-langkah yang dikerjakan, apa pun yang dikerjakan oleh Bapak Presiden dalam rangka untuk menyejahterakan rakyat dan kemudian mendukung program-program beliau yang prorakyat, termasuk terutama untuk mencegah kebocoran-kebocoran keuangan yang terjadi,” jelasnya.

Bayang-Bayang Skandal Penyadapan Ilegal

Di sisi lain, dinamika internal penegak hukum dan institusi kepolisian tengah bergejolak menyusul kian memanasnya skandal penyadapan ilegal (illegal tapping) yang dilaporkan menyasar Presiden Prabowo Subianto.

Di tengah proses penyidikan maraton yang ditangani Bareskrim Polri, spekulasi Politik kian meluas dengan mencuatnya kembali nama-nama eks pimpinan Polri.

Polemik ini kian meruncing seusai mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, membongkar penangkapan terhadap enam perwira menengah dan tinggi Polri—yang terdiri atas tiga jenderal bintang dua berlatar belakang inspektur jenderal (irjen) serta tiga perwira menengah berlatar belakang komisaris besar …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Giring dan Raja Juli Cabut dari PSI, Prabowo Didesak Sekalian Tendang dari Kabinet

Oleh Redaksi · 9 Nov, 22.25 WIB



BANDA ACEH - Keputusan Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mundur dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menuai kritik keras. Presiden Prabowo Subianto bahkan didesak sekalian mencopot keduanya dari Kabinet Merah Putih.Desakan tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah. Ia menilai pengunduran diri dua tokoh partai pimpinan Kaesang Pangarep itu tidak cukup jika keduanya masih mempertahankan jabatan di pemerintahan.

"Presiden perlu bersikap, kabinet harus bersih dari kader PSI, demi menjaga reputasi dan kepercayaan publik," kata Dedi kepada Inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Senin (9/11/2026).

Dedi menilai keputusan Giring dan Raja Juli meninggalkan aktivitas kepartaian tidak bisa dilepaskan dari situasi Politik yang tengah berkembang. Ia bahkan menyebut keduanya sebagai sosok oportunis yang tidak memiliki kemandirian dalam menentukan sikap politik.

"Secara pribadi Giring mundur patut dipuji, ia cermat melihat peluang, tetapi memalukan dari sisi lainnya. Giring akan ditinggalkan oleh pihak manapun, karena oportunis. Artinya Raja Juli pun serupa Giring, sama-sama tidak miliki kemandirian," ujarnya.

Menurut Dedi, kedua pejabat tersebut semestinya tidak hanya mundur dari PSI, tetapi juga melepaskan jabatan di kabinet. Ia beralasan Giring dan Raja Juli sebelumnya menduduki posisi pemerintahan dengan latar belakang sebagai kader partai tersebut.

Dedi juga mengaitkan keputusan keduanya dengan berbagai polemik politik yang belakangan menyeret nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, hingga kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo yang menjerat mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

Ia menduga rangkaian persoalan tersebut membuat sejumlah kader PSI mulai menghitung ulang posisi politiknya.

"Giring (dan Raja Juli) oportunis, ia tahu PSI dalam situasi terancam di kabinet, pemalsuan dokumen pendidikan Gibran, terungkapnya skandal penyadapan, juga bergulirnya sidang ijazah palsu Jokowi, menjadi alasan kuat Giring alami ketakutan sebagai kader PSI, ini dimaklumi karena Giring memang bukan aktivis, ia masuk politik dengan privilege, sehingga tidak akan mampu hadapi masalah dan tekanan," ungkap Dedi.

Pernyataan tersebut merupakan penilaian politik Dedi. Giring maupun Raja Juli tidak menyebut perkara-perkara tersebut sebagai alasan pengunduran diri mereka.

Curiga Ada Manuver Politik PSI

Tak hanya mengkritik Giring dan Raja Juli, Dedi juga mencurigai kemungkinan adanya manuver politik di balik pengunduran diri dua tokoh penting PSI …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Penyadapan Presiden dan Isu Makar Listyo Cs, Jimly: Motif Terungkap di Pengadilan, Hukuman Bisa Mati

Oleh Redaksi · 8 Nov, 19.57 WIB

BANDA ACEH –- Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie, menyoroti serius dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah pihak atau jenderal di lingkungan kepolisian.

Jimly mempertanyakan motif di balik tindakan tersebut, termasuk kemungkinan adanya upaya melumpuhkan pemerintahan hingga dugaan makar.

Menurut Jimly, motif sebenarnya belum bisa disimpulkan hanya berdasarkan indikasi yang muncul dan akan terungkap di pengadilan.

Apakah penyadapan itu bertujuan mengancam keselamatan Presiden, membuat Prabowo tidak mampu menjalankan pemerintahan, atau bahkan mengkhianati kepentingan negara, semuanya harus dibuktikan melalui proses hukum.

Ia mengingatkan agar dugaan makar tidak serta-merta dilekatkan kepada pihak-pihak yang terlibat sebelum ada pembuktian di pengadilan.

"Jadi kita dukung Kapolri dengan segala ketegasannya untuk memberantas ini sampai ke akar-akarnya. Nanti pasti di forum pengadilan ini akan terungkap motifnya apa, apa betul mau membunuh presiden atau mau membuat presiden lumpuh, tidak lagi menjalankan, tidak bisa lagi menjalankan pemerintahan, atau misalnya untuk berkhianat pada kepentingan negara," kata Jimly dalam tayangan Kompas TV, Minggu (8/11/2026)/

Jimly menilai, apabila terbukti memenuhi unsur makar, perbuatan tersebut dapat membawa konsekuensi hukum yang sangat berat, bahkan menurutnya bisa diancam hukuman mati.

Namun, ia menegaskan bahwa kemungkinan tersebut masih membutuhkan pembuktian yang kuat.

Pengadilanlah yang nantinya berwenang menguji fakta, motif, serta unsur pidana dalam perkara tersebut.

"Nah, semua itu bisa masuk unsur makar yang ancamannya bisa hukuman mati. Tapi belum bisa kita langsung tetapkan demikian karena ini baru indikasi, nanti pembuktiannya di forum pengadilan," ujarnya

NASIONAL

Said Didu: Dugaan Penyadapan Prabowo Jadi Puncak Perlawanan Oligarki

Oleh Redaksi · 8 Nov, 19.24 WIB

BANDA ACEH -Aktivis Muhammad Said Didu mengaitkan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dengan perlawanan kelompok oligarki yang kepentingannya mulai terusik oleh langkah pemerintah.

Dalam orasinya pada Aksi Rakyat Bela Indonesia di kawasan Masjid Agung Kampus Al Azhar Indonesia, Jakarta Selatan, Minggu pagi, 8 November 2026, Said Didu menyebut dugaan penyadapan tersebut sebagai puncak dari perlawanan terhadap Prabowo.

Menurutnya, kelompok yang selama ini menikmati keuntungan dari penguasaan sumber daya negara tidak akan tinggal diam ketika kepentingannya mulai disentuh.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Heboh Mendagri dan Eks Kapolri Idham Azis Dikabarkan Ditangkap, Bareskrim Buka Suara!

Oleh Redaksi · 8 Nov, 10.25 WIB

BANDA ACEH - Viral di media sosial yang menyebut bahwa Mendagri Tito Karnavian dan mantan Kapolri Idham Azis ditangkap dan jadi tersangka baru dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.Menanggapi kabar yang beredar di media sosial tersebut, Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin dengan tegas menyatakan bahwa informasi itu tidak benar.

“Infonya tidak benar,” kata Komjen Asep Safrudin saat dikonfirmasi, Minggu (8/11/2026).

Selain Listyo Sigit, Bareskrim juga menetapkan tiga tersangka lainnya yakni Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso dan Irjen Slamet Uliandi.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Bukan Sekadar Sadap Prabowo, Yusril Ungkap Dugaan Upaya Melumpuhkan Presiden

Oleh Redaksi · 9 Nov, 22.30 WIB



BANDA ACEH - Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto semakin serius. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan, penyidikan perkara tersebut kini mengarah pada dugaan tindak pidana makar, termasuk kemungkinan adanya upaya melumpuhkan Presiden agar tidak dapat menjalankan pemerintahan.Yusril menegaskan, penyadapan terhadap kepala negara tidak bisa dipandang sebagai tindak pidana siber biasa. Pasalnya, yang menjadi sasaran bukan sekadar Prabowo sebagai individu, melainkan Presiden yang memegang kekuasaan pemerintahan.

"Kalau yang disadap itu orang biasa, itu bisa dikatakan itu tindak pidana umum. Tapi yang disadap ini bukan orang biasa. Yang disadap ini presiden. Presiden itu primus inter pares. Presiden itu bukan orang biasa," kata Yusril kepada wartawan di Jakarta, Senin (9/11/2026).

Menurut Yusril, kedudukan Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan menjadi pertimbangan penting dalam mengembangkan penyidikan.

Ia menjelaskan, penyadapan terhadap Presiden memiliki konsekuensi yang lebih luas karena berkaitan dengan kedudukan dan kewenangan kepala negara.

"Jabatannya melekat dengan jabatannya bukan yang disadap ini Pak Prabowo. Pak Prabowo disadap, tapi Pak Prabowo itu presiden. Dan melekat segala harkat martabat dan jabatan seorang presiden," ujarnya.

Dugaan Upaya Melumpuhkan Presiden

Yusril mengatakan, pendalaman kasus penyadapan kini tidak hanya diarahkan untuk membuktikan tindak pidana intersepsi elektronik tanpa hak, tetapi juga mencari tahu tujuan sebenarnya dari praktik tersebut.

Salah satu kemungkinan yang sedang ditelusuri penyidik adalah apakah penyadapan itu dilakukan untuk melumpuhkan Presiden sehingga tidak mampu menjalankan tugas dan kewajibannya.

Untuk mendalami kemungkinan tersebut, pemerintah telah melibatkan sejumlah ahli hukum pidana dan hukum tata negara guna mengkaji keterkaitan perkara penyadapan dengan ketentuan tindak pidana makar.

Dari kajian tersebut, muncul kemungkinan penerapan Pasal 191 hingga Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional.

"Karena itu penyadapan terhadap orang presiden, tidak bisa dianggap sebagai suatu penyadapan biasa," tegas Yusril.

Ia kemudian menjelaskan bahwa ketentuan makar tidak hanya berkaitan dengan tindakan menggulingkan pemerintahan, tetapi juga perbuatan yang bertujuan membuat Presiden tidak mampu menjalankan kekuasaan pemerintahan.

"Karena itu memang harus dicari kaitannya dengan pasal lain, dan memang ketemu pada pasal 191 sampai 193 KUHP kaitannya adalah antara lain untuk melumpuhkan presiden, membuat presiden tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

PSI Rontok Ditinggal Tiga Tokoh Penting dari Partai, Ini Tanggapan Kaesang

Oleh Redaksi · 9 Nov, 21.41 WIB



Ketua Umum DPP PSI Kaesang Pangarep. FOTO/Net.

BANDA ACEH - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menerima pengunduran diri tiga tokoh pentingnya, yakni Raja Juli Antoni, Isyana Bagoes Oka, dan Giring Ganesha.

Keputusan tersebut telah dikonfirmasi langsung oleh Ketua Umum DPP PSI Kaesang Pangarep pada Senin (9/11/2026) malam.

Kaesang mengatakan, surat pengunduran diri ketiganya telah diterima oleh jajaran DPP PSI.

Pihaknya menghormati keputusan tersebut dan tidak mempermasalahkan pilihan para kadernya untuk meninggalkan partai.

“DPP PSI sudah menerima surat pengunduran diri saudara Raja Juli Antoni, Isyana Bagoes Oka, dan Giring Ganesha,” ujar Kaesang dalam siaran pers, Senin (9/11/2026) malam.

Kaesang menyebut, PSI memiliki pandangan bahwa kepentingan pengabdian kepada bangsa dan negara harus ditempatkan di atas kepentingan kelompok maupun partai Politik.

Menurutnya, keputusan ketiganya untuk mundur merupakan hal yang dihormati oleh organisasi.

PSI pun menyatakan menerima pengunduran diri tersebut.

Adapun posisi yang ditinggalkan ketiganya di lingkungan DPP PSI yakni Raja Juli Antoni dari jabatan Sekretaris Jenderal, Isyana Bagoes Oka dari jabatan Wakil Ketua Umum, serta Giring Ganesha dari jajaran pengurus pusat partai.

Pengunduran diri tiga nama tersebut menjadi perhatian karena mereka selama ini memiliki peran penting dalam perjalanan PSI.

Bahkan, ketiganya juga dikenal sebagai figur yang kini mengemban tanggung jawab di pemerintahan.

Raja Juli Antoni saat ini menjabat sebagai Menteri Kehutanan.

Ia sebelumnya menyampaikan keputusan mundur dari jabatan Sekjen PSI dan seluruh aktivitas kepartaian karena ingin lebih berkonsentrasi menjalankan tugas pemerintahan.

Sementara itu, Giring Ganesha yang menjabat Wakil Menteri Kebudayaan juga telah mengumumkan keputusannya meninggalkan PSI.

Adapun Isyana Bagoes Oka saat ini menjabat Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Giring menyampaikan pengunduran dirinya di akun Instagram pribadinya dan mengenang awal keterlibatannya di dunia politik.

Menurutnya, ketika pertama kali terjun ke dunia politik, ia memiliki cita-cita sederhana, yakni menjadi pelayan publik yang mampu membawa perubahan nyata bagi Indonesia.

“Perjalanan ini memberikan begitu banyak pengalaman, persahabatan, dan juga pelajaran hidup yang sangat-sangat berharga,” ungkap Giring dalam unggahannya di akun Instagram pribadinya hari Senin (9/11/2026).

Ia juga menceritakan pengalamannya ketika mendapat tawaran dari Presiden Prabowo Subianto untuk bergabung dalam pemerintahan pada September 2024.

“Saya juga masih ingat betul, sekitar bulan September 2024, Bapak Prabowo Subianto menelepon dan mengajak saya berjuang bersama di dalam pemerintahan …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Daftar Sadap 6K jadi Tameng? Elite Akrab Listyo Jangan Cuci Tangan!

Oleh Redaksi · 8 Nov, 19.47 WIB

BANDA ACEH – Dugaan penyadapan ilegal yang menyeret nama mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo (LSP) terus memunculkan polemik.

Di tengah belum adanya pengumuman resmi mengenai keseluruhan daftar sasaran penyadapan, sejumlah elite mulai menyatakan diri sebagai korban.

Namun, klaim tersebut dinilai tidak boleh menjadi alasan untuk melepaskan diri dari dugaan keterkaitan dengan kelompok LSP.

Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas) sekaligus Inisiator Sumatera Connection, Sutrisno Pangaribuan, mengingatkan para elite agar tidak buru-buru mencuci tangan dengan memosisikan diri sebagai korban, terlebih mereka yang sebelumnya diketahui akrab dengan LSP.

Menurut Sutrisno, tercantum dalam daftar sasaran penyadapan tidak otomatis membuktikan seseorang bersih dari kemungkinan keterlibatan dalam kelompok yang diduga menjalankan operasi tersebut. Sebaliknya, nama yang tidak tercantum juga tidak serta-merta menunjukkan seseorang terbebas dari dugaan keterkaitan.

"Saya kira para elite yang mengaku namanya ada dalam daftar 6K tidak perlu buru-buru “cuci tangan” memposisikan diri sebagai korban, padahal sebelumnya akrab dengan LSP," paparnya kepada Monitorindonesia.com, Minggu (8/11/2026).

Sutrisno menegaskan bahwa Bareskrim Polri harus mengungkap bagaimana kelompok LSP menentukan pihak-pihak yang menjadi target penyadapan ilegal.

"Komplotan LSP dalam memilih dan memilah target yang disadap secara ilegal masih harus dibongkar oleh Bareskrim Polri," kata Sutrisno.

Sorotan terhadap daftar 6K atau lebih dari 6.000 nomor telepon sebelumnya juga disampaikan Politisi Senior Akbar Faizal. Ia menyatakan ribuan nomor tersebut masuk dalam daftar sasaran dugaan penyadapan ilegal yang menyeret LSP.

Akbar Faizal mengaku namanya turut tercantum dalam dokumen tersebut. Selain dirinya, sejumlah tokoh publik disebut masuk daftar, di antaranya akademisi hukum tata negara Feri Amsari, akademisi hukum Universitas Gadjah Mada Zainal Mochtar, serta pejabat internal Polri Irjen Pol. Dedy Kusuma Bakti yang menjabat Kabagintelkam Polri.

“Sampai pejabat kepolisian juga kena sadap, kurang ajar sekali,” ujar Akbar Faizal, Kamis (5/11/2026).

Ia menjelaskan, daftar tersebut telah disusun dalam dokumen tebal yang berisi nama, nomor telepon, serta jabatan atau profesi masing-masing pihak yang disebut menjadi sasaran.

Akbar Faizal juga menyoroti tidak adanya nama yang berasal dari keluarga maupun …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Prabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri di Hambalang Termasuk Tito Karnavian, Bahas Apa?

Oleh Redaksi · 8 Nov, 19.29 WIB

BANDA ACEH - Presiden Prabowo Subianto bertemu 10 mantan Kapolri di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (8/11/2026) hari ini. Pertemuan tersebut turut dihadiri Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Momen pertemuan tersebut diketahui dari unggahan akun YouTube Sekretariat Presiden. Dalam pertemuan itu, sejumlah mantan Kapolri tampak hadir bersama jajaran pejabat utama Mabes Polri.

Beberapa mantan Kapolri yang terlihat hadir di antaranya Jenderal (Purn) Da'i Bachtiar, Jenderal (Purn) Bambang Hendarso …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Rp14,69 Miliar Dana APBN Mengalir ke Perusahaan Raffi Ahmad untuk Jasa Influencer

Oleh Redaksi · 9 Nov, 23.22 WIB





KKP, Setditjen Perikanan Tangkap	2026	Jasa publikasi *influencer* Kampung Nelayan Merah Putih Cemaga Utara, Natuna	Rp3.600.000.000
Jumlah			**Rp14.696.955.002**

BANDA ACEH – Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti pengadaan jasa influencer senilai total Rp14.696.955.002 (sekitar Rp14,69 miliar) oleh dua kementerian kepada PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad. Temuan ini dirilis melalui siaran pers pada Senin (9/11/2026) berdasarkan data realisasi pengadaan kementerian dan lembaga tahun anggaran 2023–2026 di portal data.inaproc.id milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).Pengadaan terdiri dari delapan paket. Lima paket berasal dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Museum dan Cagar Budaya pada 2024, dengan total sekitar Rp3,9 miliar. Rinciannya meliputi penayangan video YouTube RANS Entertainment (Rp452,7 juta), Instagram Reels akun @raffinagita1717 (Rp205,9 juta), Instagram Story (Rp575,7 juta), event attendance (Rp2,52 miliar), dan penayangan TikTok (Rp144,4 juta).

Tiga paket lainnya berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2025–2026, dengan total sekitar Rp10,8 miliar: influencer engagement oleh Setditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Rp3,597 miliar), influencer engagement untuk pembangunan BINS oleh Setditjen Perikanan Budidaya (Rp3,6 miliar), serta jasa publikasi influencer Kampung Nelayan Merah Putih Cemaga Utara, Natuna oleh Setditjen Perikanan Tangkap (Rp3,6 miliar).

ICW mencatat kepemilikan PT Rans Animasi Indonesia terhubung erat dengan Raffi Ahmad. Berdasarkan dokumen korporasi yang dihimpun Project Multatuli, PT Rans Entertainment Indonesia menguasai 99,1 persen saham perusahaan tersebut. Raffi Ahmad disebut menguasai mayoritas saham perusahaan induk, memiliki 0,9 persen saham secara langsung, dan menjabat sebagai komisaris.

Raffi Ahmad dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni pada 22 Oktober 2024. ICW menyoroti bahwa kontrak KKP dengan perusahaan tersebut terjadi setelah pelantikan, sehingga menimbulkan potensi konflik kepentingan.

Organisasi antikorupsi itu mengidentifikasi sejumlah persoalan utama. Pertama, inkonsistensi dengan kebijakan efisiensi anggaran. Presiden Prabowo menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang menargetkan penghematan Rp306,69 triliun dan membatasi belanja seremonial, publikasi, dan sejenisnya. Namun, belanja jasa influencer tetap berlangsung dalam jumlah besar di tengah pemangkasan transfer ke daerah (menjadi Rp693 triliun pada 2026) dan tekanan pada dana desa.

Kedua, manfaat pengadaan dinilai belum terukur secara transparan, padahal kedua kementerian telah memiliki Biro Hubungan Masyarakat dan kanal komunikasi publik.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Gibran Diminta Mundur, PAN: Jika Menolak Harus Dieksekusi Lewat Jalur Politik

Oleh Redaksi · 8 Nov, 19.34 WIB

BANDA ACEH - Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) MPR RI, Syarifuddin Sudding mengusulkan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya menyusul putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) terkait surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA. Jika Gibran tidak mengundurkan diri, DPR dinilai dapat menempuh langkah Politik melalui hak konstitusionalnya.

Sudding menilai putusan MA tersebut harus ditindaklanjuti karena berkaitan dengan persyaratan pencalonan Gibran sebagai Wapres. Dia berpandangan, pembatalan dokumen persyaratan itu membuat Gibran tidak lagi memenuhi syarat konstitusional.

“Saya kira dengan dibatalkannya persyaratan pada saat dia mendaftar, itu berarti Wakil Presiden sudah tidak memenuhi syarat sebagai konsekuensi hukum dari Putusan Mahkamah Agung. Kalau yang bersangkutan (Gibran) tidak mundur dengan putusan Mahkamah Agung itu, harus ada dieksekusi lewat jalur politik," kata Sudding pada Minggu (8/11/2026).

Anggota Komisi III DPR RI itu menyarankan Gibran secara sukarela meletakkan jabatannya sebagai bentuk penghormatan terhadap putusan pengadilan. Menurutnya, langkah tersebut juga penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap hukum.

“Ketika yang bersangkutan sudah tidak dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden atas Putusan Mahkamah, sebaiknya yang bersangkutan mundur. Kan sudah tidak memiliki legitimasi, baik secara yuridis karena persyaratan formal tidak terpenuhi sebagai wakil presiden. Saya kira juga secara moral, masyarakat ini persoalan trust, karena ini jabatan publik," ucapnya.

Sudding menegaskan DPR dapat menggunakan hak konstitusionalnya jika Gibran tidak bersedia mundur. Dia menyebut mekanisme hak menyatakan pendapat (HMP) sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.

“Kalau tidak mundur, DPR bisa menggunakan hak konstitusionalnya untuk mengambil sikap hak menyatakan pendapat (HMP) dengan dasar Putusan Mahkamah Agung yang bersifat eksekutorial," ujarnya.

Sebelumnya, MA mengabulkan kasasi perkara keabsahan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran. Informasi tersebut tercantum dalam situs resmi Kepaniteraan MA pada Jumat (30/10/2026).

Dalam putusan Nomor 742 K/TUN/2026, MA menyatakan dokumen yang digunakan sebagai persyaratan pencalonan pada Pilpres 2024 tidak sah.

Meski demikian, usulan pemberhentian melalui jalur politik tersebut merupakan pandangan Sudding. Mekanisme dan konsekuensi hukum putusan MA terhadap jabatan Wakil Presiden tetap perlu merujuk pada ketentuan konstitusi dan proses hukum yang berlaku

NASIONAL

6 Presiden Sebelumnya Tak Berani Sentuh Oligarki Perampok Negara, Cuma Baru Prabowo

Oleh Redaksi · 9 Nov, 19.03 WIB



BANDA ACEH - Aktivis/Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu melontarkan pujian setinggi langit atas keberanian dari Presiden Prabowo Subianto.Menurut Said Didu, Prabowo hanya satu-satunya kepala negara yang memiliki nyali untuk mengusik dan membongkar hegemoni kelompok oligarki "perampok negara" yang selama puluhan tahun menyandera kedaulatan ekonomi daru Indonesia.

Ia membeberkan betapa menguritanya kekuatan oligarki saat ini. Ekspansi mereka tak lagi sebatas mengeruk sumber daya alam, melainkan telah mencaplok kawasan perkotaan yang strategis.

"Dulu mereka cuma ada di hutan. Mengambil tanah hutan, mengambil tambang. Sekarang sudah ada di kota mengambil semuanya," beber Said Didu dikutip Senin (9/11/2026).

Said Didu menegaskan bahwa kelompok ini nyaris tak tersentuh oleh hukum dan kebijakan pemerintah. Namun, dominasi absolut itu perlahan diruntuhkan di era pemerintahan saat ini.

"Saya mengalami enam presiden sebelumnya, tidak ada yang berani menyentuh mereka, oligarki perampok negara. Baru datang Prabowo berani menyentuh mereka. Hidup Prabowo!" serunya.

Bagi Said Didu, langkah berani pemerintahan saat ini adalah momentum emas bagi rakyat untuk merebut kembali kedaulatan negaranya. Ia mendesak agar seluruh elemen masyarakat bersatu melawan hegemoni tersebut.

Tak lupa, ia juga memberikan peringatan keras kepada para "penumpang gelap" atau kaki tangan oligarki yang saat ini masih bercokol di lingkaran Istana. Ia mendesak para penghubung tersebut untuk segera bertobat dan angkat kaki dari sekitar presiden jika tidak ingin berhadapan langsung dengan kemarahan rakyat.

Prabowo sendiri tengah diterpa polemik terkait dirinya menjadi korban penyadapan yang dilakukan oleh Eks Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

Bareskrim Polri resmi mengumumkan tersangka keempat dalam mega-skandal penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ia adalah Kadiv TIK Polri (Nonaktif), Irjen Pol Slamet Uliandi.

Penetapan ini melengkapi daftar komplotan intelijen gelap yang sebelumnya telah menjerat mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi Santoso.

Keempatnya telah melanggar Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010. Hal itu terkait dengan operasi mereka yang tidak memiliki legalitas penegakan hukum sama sekali dalam melakukan penyadapan.

Operasi penyadapan ini secara brutal mengintai ruang privasi kepala negara, jajaran menteri hingga pimpinan redaksi media. Selain itu, guna menutupi kejahatannya, para tersangka bahkan nekat menghapus jejak log penyadapan pada Oktober 2026.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Bareskrim Bantah Isu Tito dan Idham Azis Ditangkap terkait Penyadapan Prabowo: Tidak Benar

Oleh Redaksi · 8 Nov, 11.09 WIB

BANDA ACEH - Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin membantah kabar yang beredar di media sosial mengenai penangkapan mantan Kapolri Tito Karnavian dan Idham Azis.

Dalam unggahan yang viral, keduanya disebut-sebut menjadi tersangka baru dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

“Infonya tidak benar,” kata Asep saat dikonfirmasi, Minggu (8/11/2026).

Diketahui, Bareskrim Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Mereka yakni mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Tiga tersangka, yakni Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi Santoso, telah ditahan di Rutan Mako Brimob. Sementara itu, Slamet Uliandi belum ditahan.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Denny Indrayana: Opsi Jokowi dan Gibran Makin Terbatas, Hanya Punya Dua Opsi

Oleh Redaksi · 9 Nov, 18.41 WIB



BANDA ACEH - Krisis Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Eks Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam perpolitikan tanah air tampaknya telah mencapai titik kritis menyusul polemik terkait ijazah mereka hingga rumor keterkaitan dengan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.Pakar Hukum Tata Negara, Denny Indrayana menilai bahwa ruang gerak serta opsi penyelamatan Politik bagi keluarga tersebut kini sudah sangat menyempit. Bagi Denny, realitas politik saat ini hanya menyisakan dua jalan keluar konstitusional bagi Gibran Rakabuming Raka.

"Opsi pilihan-pilihan bagi keduanya semakin terbatas. Menurut saya, tetap keputusannya hanya ada dua. Pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 memberi opsi berhenti atau mundur dan diberhentikan, atau impeachment, dimakzulkan, dipecat dari posisi wakil presiden," kata Denny dikutip Senin (9/11/2026).

Dari kedua pilihan krusial tersebut, pakar hukum ini memandang bahwa pengunduran diri secara sukarela adalah jalan yang paling cepat, mudah, dan rasional untuk diambil guna mencegah destabilisasi negara.

Meskipun tidak ideal dari kacamata penegakan hukum murni, mundur adalah opsi kompromi yang paling lazim terjadi dalam krisis politik tingkat tinggi.

Denny mengingatkan bahwa jika politikus muda itu menolak mundur, proses pemakzulan (impeachment) adalah konsekuensi mutlak, terlepas dari terbukti atau tidaknya keterlibatan ayahnya secara langsung dalam skandal penyadapan. Namun, proses pemakzulan yang panjang di parlemen diyakini akan memicu krisis politik berkepanjangan yang berujung pada lumpuhnya perekonomian bangsa.

Karenanya Gibran memilih mundur dipastikan sedang dipertimbangkan dengan sangat serius oleh para elite politik yang terlibat dalam pengambilan keputusan saat ini demi menyelamatkan stabilitas negara.

Adapun Bareskrim Polri resmi mengumumkan tersangka keempat dalam mega-skandal penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ia adalah Kadiv TIK Polri (Nonaktif), Irjen Pol Slamet Uliandi.

Penetapan ini melengkapi daftar komplotan intelijen gelap yang sebelumnya telah menjerat mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi Santoso.

Keempatnya telah melanggar Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010. Hal itu terkait dengan operasi mereka yang tidak memiliki legalitas penegakan hukum sama sekali dalam melakukan penyadapan.

Operasi penyadapan ini secara brutal mengintai ruang privasi kepala negara, jajaran menteri hingga pimpinan redaksi media. Selain itu, guna menutupi kejahatannya, para tersangka bahkan nekat menghapus jejak log penyadapan pada Oktober 2026.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Tessa Mahardhika dan Ambar Soeseno Diseret dalam Dugaan Bocornya Dokumen Rahasia KPK

Oleh Redaksi · 8 Nov, 09.05 WIB

BANDA ACEH — Dugaan kebocoran dokumen rahasia penyidikan kasus suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di Kementerian ATR/BPN menyeret dua pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berinisial TS dan MS.

MAKI mengungkap keduanya diduga berkomunikasi dengan tersangka Arif Sugiyanto sebelum operasi tangkap tangan (OTT) 14 September 2026.

KPK membenarkan tengah melakukan pemeriksaan internal untuk mengusut dugaan kebocoran informasi tersebut. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut pemeriksaan melibatkan Inspektorat dan Dewan Pengawas (Dewas).

“Pemeriksaan di internal, baik Inspektorat maupun Dewas,” kata Budi kepada wartawan, Jumat (6/11/2026).

Budi menegaskan pemeriksaan masih berjalan. KPK juga memastikan dugaan kebocoran dokumen tidak menghentikan pengusutan perkara korupsi di lingkungan ATR/BPN.

“Penyidik masih terus melengkapi alat bukti tambahan yang diperlukan,” ujarnya.

Namun, dugaan kebocoran ini memunculkan persoalan serius setelah Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menyebut telah mengantongi identitas dua pegawai KPK yang diduga membocorkan informasi penanganan perkara kepada Arif Sugiyanto.

Boyamin menyebut TS merupakan pejabat di Direktorat Penyelidikan KPK, sedangkan MS bertugas di Direktorat Koordinasi dan Supervisi. Keduanya disebut berasal dari lembaga lain sebelum bergabung dengan KPK.

Menurut Boyamin, terdapat jejak komunikasi melalui telepon seluler antara kedua pegawai tersebut dengan Arif sebelum OTT. Ia juga menduga tersangka memanfaatkan informasi maupun dokumen yang diperoleh untuk kepentingannya.

“Tersangka dalam melakukan modus operandi dengan cara mengaku dekat dengan personel KPK dan nyatanya terdapat jejak komunikasi HP antara tersangka dan oknum personel KPK,” ungkap Boyamin.

MAKI telah meminta Dewas KPK memeriksa pihak-pihak yang disebut terlibat. Boyamin menegaskan, apabila dugaan pembocoran terbukti, sanksi tidak semestinya berhenti pada hukuman etik.

“Sehingga, mestinya TS dan MS itu nanti malah diberhentikan dengan tidak hormat atau diminta mengundurkan diri karena diduga membocorkan proses-proses penegakan hukum di KPK,” tegasnya.

Boyamin juga mengancam membawa persoalan tersebut ke jalur hukum apabila pemeriksaan Dewas tidak menunjukkan perkembangan. Ia menyebut opsi praperadilan maupun gugatan perbuatan melawan hukum.

Dugaan kebocoran dokumen ini sebelumnya telah disorot Monitorindonesia.com.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Jika Gibran Dimakzulkan, Jokowinisti Tegaskan Kaesang Harus Jadi Wapres

Oleh Redaksi · 9 Nov, 17.38 WIB



Gambar ini menampilkan seorang pria muda bernama Kaesang Pangarep anaknya Joko Widodo alias Jokowi yang mengenakan topi hitam dengan tulisan putih, sedang membuat raut wajah lucu

BANDA ACEH - Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai dapat memunculkan dinamika Politik baru di lingkaran kekuasaan.

Ketua Jokowinisti, Nurhadianto Sukojoyo, menegaskan bahwa jika Gibran dimakzulkan, posisi wakil presiden selanjutnya harus diberikan kepada Kaesang Pangarep.

Nurhadianto menilai Kaesang memiliki kapasitas dan kedekatan politik maupun ideologis dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Menurutnya, Kaesang merupakan sosok yang tepat untuk melanjutkan garis politik dan pemikiran Jokowi dalam pemerintahan.

“Jika Gibran dimakzulkan, Kaesang harus menjadi wakil presiden. Dia memiliki kapasitas untuk meneruskan ideologi dan perjuangan politik Jokowi,” kata Nurhadianto dalam keterangannya, Ahad (8/11/2026).

Ia berpendapat, kemenangan Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024 tidak bisa dilepaskan dari peran besar Jokowi.

Dukungan dan pengaruh politik Jokowi disebut menjadi salah satu faktor penting yang mengantarkan Prabowo ke kursi kepresidenan.

“Prabowo menjadi presiden itu atas jasa Jokowi. Tanpa peran Jokowi, Prabowo tidak mungkin bisa menjadi presiden seperti sekarang,” tegasnya.

Karena itu, Nurhadianto berpandangan bahwa keberadaan tokoh-tokoh yang memiliki kedekatan dengan Jokowi dalam pemerintahan perlu dipertahankan.

Ia menganggap hubungan politik yang terbangun menjelang Pilpres 2024 semestinya tetap menjadi bagian dari konfigurasi kekuasaan nasional.

Nurhadianto juga menyebut posisi Kaesang sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menjadi salah satu alasan yang membuatnya layak diperhitungkan.

Menurut dia, kepemimpinan Kaesang di partai tersebut menunjukkan adanya basis organisasi dan jalur politik untuk melanjutkan gagasan Jokowi.

“Kaesang itu ideologis dan biologis Jokowi. Dia memiliki hubungan keluarga sekaligus kesamaan ideologi. Kaesang mampu menjalankan ideologi Jokowi dengan baik,” ujarnya.

Ia menilai, hubungan biologis dan ideologis tersebut merupakan kombinasi yang tidak dimiliki semua tokoh politik.

Dalam pandangannya, Kaesang dapat menjadi representasi keberlanjutan pemikiran dan kepemimpinan politik Jokowi di tingkat nasional.

Pernyataan Nurhadianto ini sekaligus memperlihatkan bahwa wacana pemakzulan Gibran bukan hanya berpotensi memunculkan persoalan konstitusional, tetapi juga membuka perdebatan mengenai siapa figur yang pantas mengisi posisi wakil presiden apabila terjadi kekosongan jabatan.

Meski demikian, penggantian wakil presiden tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan kehendak kelompok politik atau kedekatan keluarga.

Mekanisme pengisian jabatan wakil presiden harus mengikuti ketentuan konstitusi, termasuk Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 yang mengatur pemilihan wakil presiden oleh MPR dari dua calon yang diusulkan presiden apabila terjadi kekosongan jabatan.

NASIONAL

Kapolri Didesak Buka Daftar Korban Penyadapan Listyo Sigit

Oleh Redaksi · 8 Nov, 08.50 WIB

BANDA ACEH -Kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret nama mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) dinilai sebagai kejahatan luar biasa yang harus diusut tuntas hingga ke aktor utamanya.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Jansen Sitindaon mengatakan, siapa pun pihak yang terlibat dalam praktik penyadapan ilegal tersebut harus dimintai pertanggungjawaban tanpa terkecuali.

“Ini kejahatan luar biasa. Mau siapapun yang terlibat harus diusut tuntas sampai ke akar-akarnya dan aktor utamanya,” ujar Jansen lewat akun X miliknya, dikutip Minggu, 8 November 2026.

Ia bahkan meminta Kapolri Komjen Suyudi Ario Seto mengumumkan ribuan nama yang diduga menjadi target penyadapan kepada publik.

Jansen menegaskan, apabila namanya termasuk dalam daftar pihak yang disadap, ia tidak akan tinggal diam.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Giring Ungkap Alasan Mundur dari PSI: Sudah Tak Sejalan

Oleh Redaksi · 9 Nov, 17.17 WIB



BANDA ACEH - Wakil Menteri Kebudayaan (Wamenbud) Giring Ganesha mengumumkan pengunduran dirinya dari keanggotaan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Keputusan tersebut diambil setelah melalui pertimbangan pribadi yang matang karena ia merasa sudah tidak sejalan dengan hal-hal yang diperjuangkan partai.Ia mengatakan, keputusan itu telah diambil sejak pekan lalu dan kini secara resmi berpamitan dari partai berlambang gajah tersebut.

"Namun, dalam perjalanan berpartai, saya merasa ada hal-hal yang sudah tidak lagi sejalan dengan apa yang saya perjuangkan sejak awal," kata Giring dalam keterangannya pada Senin (9/11).

"Setelah melalui pertimbangan pribadi yang matang, minggu lalu saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari keanggotaan Partai Solidaritas Indonesia," lanjutnya.

Giring mengungkapkan, awal mula dirinya terjun ke dunia Politik dilandasi cita-cita sederhana, yakni menjadi pelayan publik yang dapat membawa perubahan nyata bagi Indonesia. Selama berpolitik, ia mengaku mendapatkan banyak pengalaman, persahabatan, hingga pelajaran hidup.

"Saya pertama kali terjun ke dunia politik, cita-cita saya sederhana (yaitu) menjadi pelayan publik yang bisa membawa perbaikan nyata bagi Indonesia tercinta," ujarnya.

Ia juga mengenang momen ketika Presiden Prabowo Subianto menghubunginya pada September 2024. Saat itu, Prabowo mengajak Giring untuk bergabung dan berjuang bersama dalam pemerintahan yang akan dipimpinnya.

"Saya juga masih ingat betul sekitar bulan September 2024, Bapak Prabowo Subianto menelpon dan mengajak saya berjuang bersama di dalam pemerintahan yang akan beliau pimpin," terang dia.

"Tanpa ragu, saya menjawab: 'Siap, Bapak Prabowo. Siap, Bapak Presiden'," sambungnya.

Giring mengatakan, selama hampir dua tahun mengabdi sebagai Wakil Menteri Kebudayaan, ia semakin memahami besarnya tanggung jawab dalam melayani bangsa dan negara. Pengalaman tersebut juga memperkuat tekadnya untuk terus memberikan yang terbaik bagi Indonesia.

"Tidak terasa, dua tahun mengabdi sebagai Wakil Menteri Kebudayaan membuat saya semakin memahami besarnya tanggung jawab melayani bangsa dan negara, sekaligus memperkuat tekad saya untuk terus memberikan yang terbaik bagi Indonesia tercinta," katanya.

Ia pun menyampaikan terima kasih kepada keluarga besar PSI atas kepercayaan dan kebersamaan selama dirinya berkiprah di partai tersebut. Giring menyebut berbagai pengalaman yang diperolehnya akan menjadi pelajaran berharga hingga masa mendatang.

"Terima kasih kepada seluruh keluarga besar PSI atas kepercayaan dan kebersamaan ini selama ini. Banyak pelajaran hidup yang akan selalu saya bawa sampai tua nanti," katanya.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Sri Radjasa Tuding Jokowi di Balik Penyadapan Prabowo!

Oleh Redaksi · 8 Nov, 11.14 WIB

BANDA ACEH - Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto memunculkan spekulasi serius mengenai kemungkinan adanya operasi Politik dari dalam lingkaran kekuasaan.

Mantan anggota Badan Intelijen Negara (BIN), Sri Radjasa Chandra, menduga kasus tersebut berkaitan dengan apa yang disebutnya sebagai operasi Garis Dalam, yang menurut analisisnya bertujuan mempertahankan pengaruh politik di tengah pemerintahan Presiden Prabowo.

Dalam analisisnya, Sri Radjasa mengaitkan dugaan operasi tersebut dengan keberadaan jaringan pejabat yang disebut sebagai Geng Solo, yang dikaitkannya dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Ia menilai jaringan tersebut merupakan bagian dari strategi politik dan perang informasi untuk menjaga pengaruh di lingkungan pemerintahan.

Pernyataan itu disampaikan Sri Radjasa dalam wawancara di program Bikin Terang yang ditayangkan melalui kanal YouTube.

"Hati-hati Mbak, Jokowi ini sedang melakukan operasi garis dalam," ujar Sri Radjasa dikutip Minggu (8/11/2026).

Pernyataan tersebut bukan sekadar kritik politik. Sri Radjasa bahkan menguraikan empat strategi yang menurutnya menjadi bagian dari dugaan operasi Garis Dalam.

Pertama, mempertahankan jaringan pejabat yang disebut sebagai Geng Solo, yang menurutnya berasal dari kalangan kepolisian dan militer.

Kedua, memobilisasi relawan dan organisasi kemasyarakatan untuk memperkuat dukungan politik.

Ketiga, membangun aliansi dengan kelompok buruh, pemuda, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Keempat, menyiapkan strategi perang informasi yang menurutnya mencakup aktivitas penyadapan.

Dari empat strategi tersebut, dugaan penyadapan menjadi bagian yang paling serius disorot. Sri Radjasa menghubungkan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo dengan strategi perang informasi yang disebutnya sedang berlangsung.

Bahkan, ia secara terbuka melontarkan tudingan bahwa Jokowi diduga menjadi pihak yang menggunakan hasil penyadapan tersebut.

"Jadi kalau kita lihat sekarang ini terbongkarnya terjadi penyadapan yang dilakukan oleh Listyo Sigit, saya punya keyakinan dan saya berani bertaruh penggunanya adalah Jokowi," tegasnya.

Tudingan tersebut merupakan klaim pribadi Sri Radjasa. Hingga kini, belum ada bukti independen yang memastikan Jokowi menjadi pengguna hasil penyadapan sebagaimana dituduhkan.

Tak berhenti pada dugaan keterlibatan jaringan politik, Sri Radjasa juga menyinggung keberadaan seorang advokat berinisial MR yang menurut klaimnya berada di lokasi penggerebekan sebuah rumah di kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan.

Ia mengaku memperoleh informasi mengenai keberadaan advokat tersebut dari sumber yang dikaitkannya dengan Divisi Profesi dan …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Para Ketua Umum Partai Sudah Berbincang dengan Prabowo soal Rencana Pemakzulan Gibran

Oleh Redaksi · 9 Nov, 17.08 WIB



BANDA ACEH – Sejumlah ketua umum partai Politik telah berbincang dengan Presiden Prabowo Subianto mengenai wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Informasi ini muncul di tengah menguatnya dinamika politik di DPR usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait dokumen pendidikan Gibran.Menurut laporan Tempo.co yang dirilis sekitar 8–9 November 2026, gagasan pemakzulan semakin mengerucut. DPR dikabarkan merancang dokumen hak menyatakan pendapat untuk merespons ide pelengseran Gibran. Sementara itu, Prabowo disebut sedang menimbang relasinya dengan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi), ayah Gibran.

Latar Belakang Putusan MK dan MA

Wacana pemakzulan menguat setelah MK pada 6 Oktober 2026 menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri setara SMA saat mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. MK menegaskan tidak memiliki kewenangan untuk mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya, namun membuka ruang bagi proses politik di lembaga lain.

Putusan itu diperkuat oleh MA pada 30 Oktober 2026 yang mengabulkan kasasi dan menyatakan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran tidak sah serta batal demi hukum. Kedua putusan itu menjadi dasar bagi sebagian pihak, termasuk penggugat Denny Indrayana, untuk mendorong proses pemakzulan melalui mekanisme Pasal 7A dan 7B UUD 1945.

Sikap Partai dan Peran Kunci Prabowo

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh pada 8 November 2026 menyatakan bahwa pemakzulan bisa dijalankan jika seluruh persyaratan konstitusional telah terpenuhi dan tidak ada jalan alternatif lain. "Kalau semua persyaratan sudah terpenuhi, tidak ada jalan lain lagi, ya jalan saja apa yang terbaik untuk kemajuan kita berbangsa dan bernegara," ujarnya. Paloh menyebut situasi ini memprihatinkan, mengingat pemerintahan Prabowo-Gibran baru berjalan sekitar dua tahun.

Sejumlah partai koalisi pemerintah (Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PKB, NasDem, dan PKS) yang menguasai mayoritas kursi di DPR masih berhati-hati. Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie dan pengamat lain berulang kali menekankan bahwa secara prosedural pemakzulan mungkin, tetapi secara politik sangat bergantung pada sikap Prabowo—baik sebagai Presiden maupun Ketua Umum Partai Gerindra. "Faktor terpentingnya Presiden Prabowo. Apa dia mau wakilnya itu diganti?" kata Jimly.

Koalisi besar yang dipimpin Gerindra dinilai solid, sehingga langkah pemakzulan sulit berjalan tanpa restu atau arahan dari Prabowo.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Soal Desakan Pemakzulan Gibran, Surya Paloh: Tragis, Tapi Jalankan Saja!

Oleh Redaksi · 8 Nov, 19.53 WIB

BANDA ACEH – Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyebut wacana pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka sebagai situasi tragis yang tidak diharapkan terjadi dalam kehidupan Politik nasional.

Meski demikian, Surya Paloh menegaskan mekanisme konstitusional tetap harus dihormati.

Apabila seluruh persyaratan dan prosedur telah terpenuhi, sementara pemakzulan menjadi satu-satunya jalan penyelesaian, maka proses tersebut dapat dijalankan saja dengan baik.

Pernyataan itu disampaikan Surya Paloh saat meresmikan kantor baru Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Karawang, Minggu (8/11/2026).

Ia merespons polemik yang berkembang menyusul kabar mengenai Surat Keterangan (Suket) penyetaraan ijazah SMA Gibran Rakabuming Raka yang disebut dinyatakan tidak sah oleh Mahkamah Agung (MA).

"Aturannya sudah tersedia, jika memang itu sebagai satu-satunya alternatif ya silakan (dimakzulkan), kan sudah ada aturannya.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Dasco Buka-bukaan soal Progres Wacana Pemakzulan Gibran

Oleh Redaksi · 9 Nov, 16.11 WIB



BANDA ACEH -Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai santer di kalangan anggota DPR lintas fraksi. Sejumlah organisasi masyarakat (ormas) dan anggota DPR kabarnya ingin membawa persoalan tersebut ke forum resmi parlemen.

Namun DPR belum dapat menindaklanjuti aspirasi tersebut secara kelembagaan. Pasalnya, masa persidangan baru akan dibuka pada Selasa besok, 10 November 2026.

Demikian disampaikan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 9 November 2026.

"Mengenai dinamika yang ada, memang dari banyak organisasi masyarakat maupun anggota-anggota DPR lintas fraksi ingin menyampaikan aspirasi melalui mekanisme yang ada di DPR mengenai masalah wapres," kata Dasco.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu mengatakan, DPR belum menggelar rapat pimpinan (rapim) maupun rapat Badan Musyawarah (Bamus) yang melibatkan perwakilan fraksi-fraksi.

Di sisi lain, DPR masih menunggu salinan lengkap putusan Mahkamah Agung (MA) sebelum menentukan langkah lebih lanjut.

"Kami juga sampai dengan saat ini masih menunggu keputusan lengkap dari Mahkamah Agung," kata Dasco.

Dasco menegaskan, DPR belum bisa memastikan langkah kelembagaan yang akan ditempuh untuk merespons aspirasi terkait Gibran. Keputusan baru dapat dibahas setelah masa persidangan dibuka dan mekanisme internal DPR berjalan.

"Kami belum dapat menyampaikan langkah-langkah apa yang kemudian akan diambil oleh DPR," kata Dasco.

Ia kembali menekankan bahwa pembahasan wacana tersebut sejauh ini masih berlangsung secara informal di antara anggota DPR lintas fraksi.

Sejumlah anggota DPR yang ingin menyampaikan aspirasi meminta agar persoalan itu dibawa ke forum resmi sesuai mekanisme dan tata tertib parlemen.

"Ya, itu secara informal masih pembahasan lintas fraksi, karena memang masih belum masuk masa sidang dan mereka minta dalam forum yang diatur secara mekanisme, mereka akan minta pembahasan secara resmi," demikian Dasco.

Wacana pemakzulan Gibran dan penggunaan Hak Angket kembali menguat setelah MA mengabulkan permohonan kasasi perkara tata usaha negara Nomor 742 K/TUN/2026 pada Jumat, 30 Oktober 2026.

Dalam putusan tersebut, majelis hakim kasasi yang dipimpin Hakim Agung Yulius bersama hakim anggota Hari Sugiharto dan Maftuh Effendi membatalkan putusan peradilan tingkat sebelumnya (judex facti) dan mengabulkan seluruh gugatan M Subhan Palal.

"742 K/TUN/2026. Kabul kasasi. Batal judex facti. Adili sendiri: Kabul gugatan penggugat seluruhnya," demikian bunyi amar putusan kasasi yang tercantum dalam …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Giring Ganesha Mundur dari PSI

Oleh Redaksi · 9 Nov, 16.22 WIB



BANDA ACEH - Wakil Menteri KebudayaanGiring Ganesha mengumumkan pengunduran dirinya dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Giring mengaku keputusan tersebut diambil setelah melalui pertimbangan pribadi yang matang karena merasa ada hal-hal dalam perjalanan berpartai yang tidak lagi sejalan dengan perjuangannya sejak awal.

Pengumuman itu disampaikan Giring melalui pernyataan yang diawali dengan mengenang perjalanan pertamanya terjun ke dunia Politik. Dia menyebut cita-citanya sejak awal adalah menjadi pelayan publik yang mampu membawa perubahan nyata bagi Indonesia.

"Saya pertama kali terjun ke dunia politik, cita-cita saya sederhana, menjadi pelayan publik yang bisa membawa perbaikan nyata bagi Indonesia tercinta. Perjalanan ini memberikan begitu banyak pengalaman, persahabatan, dan juga pelajaran hidup yang sangat-sangat berharga," ujarnya dalam akun Instagram @giring dikutip Senin (9/11/2026).

Giring juga mengenang momen ketika Presiden Prabowo Subianto menghubunginya pada September 2024. Saat itu, Prabowo mengajaknya untuk berjuang bersama dalam pemerintahan yang akan dipimpinnya.

"Tanpa ragu, saya menjawab, Siap Bapak Prabowo. Siap, Bapak Presiden," kata Giring.

Dia mengaku mendapatkan banyak pengalaman, persahabatan, dan pelajaran berharga selama menjalani perjalanan politik. Pengalaman tersebut semakin memperkuat pemahamannya mengenai tanggung jawab dalam melayani bangsa dan negara.

Namun, Giring mengungkapkan adanya perbedaan yang membuatnya memutuskan untuk mengakhiri keanggotaannya di PSI.

"Berpartai, saya merasa ada hal-hal yang sudah tidak lagi sejalan dengan apa yang saya perjuangkan sejak awal. Setelah melalui pertimbangan pribadi yang matang, minggu lalu saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari keanggotaan Partai Solidaritas Indonesia," ujarnya.

Giring turut menyampaikan terima kasih kepada keluarga besar PSI atas kepercayaan dan kebersamaan selama ini. Dia menyebut berbagai pengalaman selama berada di partai tersebut akan menjadi pelajaran yang terus dibawanya.

"Hari ini saya izin pamit dari Partai Solidaritas Indonesia," ucapnya.

Saat ini Giring diketahui menjabat sebagai Wakil Menteri Kebudayaan pada 21 Oktober 2024 dalam Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dia mendampingi Fadli Zon yang menjabat sebagai Menteri Kebudayaan.

Sebelum menjabat Wakil Menteri Kebudayaan, Giring merupakan salah satu tokoh yang aktif di PSI. Dia pernah dipercaya menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PSI pada 2019 hingga 2023, menggantikan Grace Natalie.

Posisi tersebut kemudian digantikan oleh Kaesang Pangarep yang menjabat sebagai Ketua Umum PSI

NASIONAL

Luke Susilo Sebut Kesaksian Jokowi di Sidang Janggal, Pertanyakan Foto Wisuda UGM

Oleh Redaksi · 8 Nov, 09.00 WIB

BANDA ACEH - Aktivis Terus Jadi Anti Pembual (Terjal), Luke Susilo, menyoroti sejumlah kejanggalan dan ketidaksesuaian fakta terkait kesaksian Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dalam persidangan kasus dugaan fitnah terkait polemik ijazah dengan terdakwa Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa. Luke menilai, kehadiran Jokowi di persidangan dengan membawa ijazah asli belum mampu menjawab keraguan publik.

Menurutnya, kesaksian tersebut justru memunculkan pertanyaan baru terkait data dan fakta historis yang disampaikan. Salah satu poin yang disoroti Luke adalah pernyataan Jokowi mengenai jumlah peserta wisuda Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 19 November 1985. Di hadapan majelis hakim, Jokowi menyebut dirinya diwisuda bersama 14 orang lainnya.

"Pak Jokowi menyebutkan di persidangan bahwa wisudanya berjumlah 14 orang. Namun, jika kita mencocokkan dengan foto wisuda yang beredar luas di publik dan sempat diunggah Prof. Henri Subiakto, di foto tersebut terpampang jelas ada 15 orang," ujar Luke Susilo di Jakarta.

Luke mempertanyakan perbedaan jumlah tersebut yang dinilainya tidak konsisten.

"Saya sampai mengulang-ulang mendengarkan kesaksian beliau. Di sidang kedua Dokter Tifa pun beliau bilang diwisuda bersama 14 orang lainnya. Kalau di foto ada 15 orang, lalu satu orang ini siapa? Apakah ini yang dulu kerap diistilahkan sebagai 'penumpang gelap'?" cetusnya.

Selain jumlah wisudawan, Luke juga menyoroti asal-usul foto ijazah beresolusi tinggi yang belakangan beredar di media sosial melalui akun Dian Sandi dan sejumlah akun lainnya. Dia mempertanyakan mengapa sumber foto tersebut belum terungkap, meski penanganan laporan hukum kasus ini telah berlangsung sejak 30 April 2025.

"Ini sudah berjalan satu setengah tahun lebih sejak laporan dibuat. Sangat tidak masuk akal jika penyidik atau pihak terkait masih belum mengusut dari mana sumber foto asli tersebut berasal. Dulu pada 2022 saat isu ini mencuat, pihak UGM memamerkan foto ijazah via proyektor. Mengapa tidak ditelusuri siapa yang mengunggah atau memegang file aslinya saat itu?" tegas Luke.

Dia juga menyinggung dugaan kebocoran dokumen dari lingkaran terdekat. Luke menyebut, sebelum akun Dian Sandi mengunggah foto ijazah pada 1 April 2025, terdapat akun lain, seperti Ahmad Kriwil dan Handik Hermanto, yang mengunggah foto serupa sehari sebelumnya, yakni 31 Maret 2025.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

LINGKUNGAN

Belum Pulih dari Banjir, Desa Pertik Gayo Lues Kembali Diterjang Air Bah

Oleh Van · 8 Nov, 16.07 WIB

GAYO LUES — Banjir bandang Desa Pertik Aceh dilaporkan terjadi pada Minggu, 8 November 2026, dini hari setelah hujan berintensitas tinggi mengguyur kawasan tersebut sejak Sabtu sore.

Informasi kejadian dibagikan akun Threads @puturmdn pada Minggu, 8 November 2026. Luapan air sungai disebut menerjang permukiman warga di Desa Pertik, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues.

"Akibat hujan dgn intensitas tinggi sedari Sabtu Sore mengakibat debit air sungai dari kawasan Pintu Rime meluap drastis," tulis akun @puturmdn.

Banjir Bandang Kembali Terjadi di Gayo Lues

Dalam unggahan tersebut, air bah disebut mengalir deras hingga menerjang kawasan permukiman. Pengunggah berharap peristiwa itu tidak menimbulkan korban jiwa.

Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) sebelumnya mencatat sejumlah kejadian banjir dan longsor di Kabupaten Gayo Lues sepanjang Oktober hingga awal November 2026.

Pada 29 Oktober 2026, BPBA melaporkan banjir dan angin puting beliung melanda sejumlah permukiman di Gayo Lues. Sementara pada 3 November 2026, longsor menutup beberapa ruas jalan di kabupaten tersebut.

Penanganan dan Kondisi Korban Masih Perlu Dipastikan

BPBA juga mencatat 26 kejadian banjir melanda Aceh sepanjang Oktober 2026.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Wacana Pemakzulan Gibran Disorot Media Asing, 4 Parpol Mulai Bersikap

Oleh Redaksi · 9 Nov, 16.31 WIB



BANDA ACEH - Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai mendapat perhatian di parlemen. Empat partai Politik disebut tengah mempertimbangkan penyelidikan terhadap pemenuhan syarat Gibran sebagai wakil presiden.

Kabar ini diungkap kantor berita Reuters dalam laporan 5 November 2026. Menariknya, tiga dari empat partai yang disebut sedang mempertimbangkan langkah tersebut merupakan bagian dari koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan komunikasi antarpartai di DPR semakin intensif untuk menggunakan hak konstitusional parlemen. Sementara itu, perwakilan PKS Muhammad Kholid menyebut partainya masih mengkaji sejumlah opsi dan menjalin komunikasi dengan partai lain.

Namun, belum ada kesepakatan resmi untuk mengajukan pemakzulan. Reuters juga tidak menyebut secara lengkap tiga partai lain yang dimaksud.

Polemik ini berkaitan dengan persoalan dokumen pendidikan Gibran yang sebelumnya menjadi objek gugatan di MK dan MA.

Dalam putusan 6 Oktober 2026, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat.

Namun, permohonan tersebut tidak diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. MK juga menegaskan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran melalui perkara perselisihan hasil pemilu.

Tak berselang lama, MA mengabulkan kasasi Subhan Palal melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026. MA menyatakan Surat Keterangan Penyetaraan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tidak sah dan batal demi hukum serta memerintahkan agar surat tersebut ditarik untuk dimusnahkan.

Dua putusan itu kini menjadi rujukan dalam desakan agar persoalan syarat pendidikan Gibran ditindaklanjuti melalui jalur politik.

DPR memiliki mekanisme untuk mengajukan hak menyatakan pendapat terkait dugaan tidak terpenuhinya persyaratan presiden atau wakil presiden. Berdasarkan Pasal 210 UU MD3, usulan itu dapat diajukan sedikitnya 25 anggota DPR dengan disertai bukti yang sah.

Jika disetujui dalam rapat paripurna, pendapat DPR akan dibawa ke MK untuk diuji. Apabila MK membenarkan pendapat tersebut, proses dapat berlanjut ke MPR untuk memutuskan pemberhentian.

Peta kekuatan partai di DPR membuat perkembangan ini semakin menarik. Reuters mencatat koalisi Prabowo menguasai sekitar 81% kursi parlemen. PDIP menjadi satu-satunya partai di luar koalisi, sementara tujuh partai lainnya mendukung pemerintahan.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Jimly: Operasi Listyo Sigit Prabowo Bisa Masuk Unsur Makar, Ancaman Maksimal Hukuman Mati

Oleh Redaksi · 9 Nov, 18.11 WIB



BANDA ACEH - Penyadapan oleh Mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo ke Presiden Prabowo Subianto mendapat sorotan tajam dari kacamata hukum tata negara. Ia bahkan disebut-sebut terancam hukuman mati.Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Prof. Jimly Asshiddiqie, menegaskan bahwa kejahatan tingkat tinggi tersebut tidak bisa dipandang sebelah mata karena sangat berpotensi memenuhi unsur makar.

Prof. Jimly memberikan dukungan penuh kepada pihak kepolisian untuk memberantas dan membersihkan para pelaku makar siber di tubuh Polri ini hingga ke akar-akarnya.

Menurutnya, dari kacamata Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), tindakan spionase ilegal ini sudah pasti mengantongi ancaman pidana minimal 10 tahun penjara. Namun, jika eskalasi niat jahatnya terbukti untuk menggulingkan kekuasaan, ancamannya akan jauh lebih berat.

"Nah, semua itu bisa masuk unsur makar, yang ancamannya bisa hukuman mati. Tapi belum bisa kita langsung tetapkan demikian karena ini baru indikasi. Nanti pembuktiannya di forum pengadilan," urai Jimly dikutip Senin (9/11/2026).

Jimly mendesak agar proses peradilan kelak benar-benar membuktikan indikasi makar tersebut tanpa keraguan meski harus menghadapi petinggi dalam kepolisian dari Indonesia.

Adapun Bareskrim Polri resmi mengumumkan tersangka keempat dalam mega-skandal penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ia adalah Kadiv TIK Polri (Nonaktif), Irjen Pol Slamet Uliandi.

Penetapan ini melengkapi daftar komplotan intelijen gelap yang sebelumnya telah menjerat mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi Santoso.

Keempatnya telah melanggar Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010. Hal itu terkait dengan operasi mereka yang tidak memiliki legalitas penegakan hukum sama sekali dalam melakukan penyadapan.

Operasi penyadapan ini secara brutal mengintai ruang privasi kepala negara, jajaran menteri hingga pimpinan redaksi media. Selain itu, guna menutupi kejahatannya, para tersangka bahkan nekat menghapus jejak log penyadapan pada Oktober 2026.

Atas kejahatan berlapis ini, keempatnya telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan Pasal 258 dan Pasal 332 UU KUHP Nasional serta Pasal 32 UU ITE. Hal itu mengancam mereka dengan kurungan maksimal 10 tahun penjara.

NASIONAL

Henri Subiakto: Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Oleh Redaksi · 8 Nov, 08.55 WIB

BANDA ACEH - Guru Besar Universitas Airlangga, Prof Henri Subiakto, mengaku mulai mengubah pandangannya terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi sejak akhir 2022.

Perubahan itu terjadi setelah dirinya menemukan sejumlah bukti yang menurutnya menunjukkan perbedaan antara citra Jokowi dengan kenyataan.

Henri mengaku sebelumnya percaya bahwa Jokowi merupakan sosok pemimpin yang jujur dan sederhana.

Informasi negatif mengenai Jokowi kala itu dianggapnya sekadar berasal dari pihak-pihak yang tidak menyukainya.

Namun, pandangannya berubah setelah menemukan berbagai hal yang membuatnya mempertanyakan sosok mantan Wali Kota Solo tersebut.

"Dulu saya juga percaya Jokowi itu pemimpin jujur dan sederhana. Kalau ada informasi yang mengungkap keburukan Jokowi, saya anggap hanyalah produk orang-orang yang membencinya. Tapi sejak akhir 2022 saya menemukan banyak bukti, yang membuat makin meyakini bahwa Jokowi itu, antara apa yang diucapkan dan ditampilkan sangat beda dengan kenyataan," ujar Henri, lewat akun X miliknya, Minggu, 8 November 2026.

Ia mengakui Jokowi telah membangun berbagai infrastruktur selama menjabat sebagai presiden.

Namun, menurut Henri, capaian tersebut tidak menghapus persoalan lain yang ditimbulkan selama kepemimpinannya.

Henri bahkan melontarkan kritik keras terhadap Jokowi dan keluarganya.

Ia menilai berbagai persoalan yang dikaitkan dengan keluarga Jokowi selama ini tertutupi oleh strategi komunikasi dan pencitraan yang masif.

"Jokowi walau sudah membangun infrastruktur, tapi faktanya di sisi lain dia adalah sumber masalah bangsa ini. Jokowi dan keluarganya itu asli sangat greedy tapi semua keburukan nyata itu bisa ditutupi," katanya.

Menurut Henri, pembentukan citra positif Jokowi dilakukan melalui strategi komunikasi yang melibatkan buzzer, lembaga survei, berbagai media, organisasi kemasyarakatan, hingga para pendukungnya.

Strategi tersebut, lanjutnya, membuat Jokowi dipandang sebagai sosok pemimpin yang baik dan layak dihormati oleh sebagian besar masyarakat.

Henri meyakini, seiring berjalannya waktu, berbagai fakta yang selama ini dipersoalkan publik akan semakin terbuka dan tidak bisa terus ditutupi.

Ia menyinggung persoalan identitas dan ijazah Jokowi hingga dugaan penyadapan yang belakangan menjadi sorotan.

Henri mengaitkan persoalan penyadapan tersebut dengan orang-orang yang menurutnya selama ini dekat dan loyal kepada Jokowi.

"Kebenaran senantiasa akan muncul untuk menghukum dan menenggelamkan kejahatan yang nyata. Dimulai dengan persoalan identitas dan ijazah.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

SPORT

Start dari Posisi 14, Veda Ega Pratama Finis Keempat di Moto3 Qatar 2026

Oleh Redaksi · 8 Nov, 20.51 WIB

BANDA ACEH, LUSAIL – Pebalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, menunjukkan performa impresif pada balapan Moto3 Qatar 2026. Memulai lomba dari posisi ke-14, pebalap Honda Team Asia tersebut berhasil menembus empat besar setelah melewati persaingan ketat hingga lap terakhir.

Balapan seri ke-20 Moto3 2026 berlangsung di Sirkuit Lusail, Qatar, Minggu (8/11/2026) malam WIB. Maximo Quiles mengawali lomba dari posisi terdepan, sedangkan Veda harus berjuang dari barisan tengah.

Veda langsung memperlihatkan kemajuan sejak lampu start padam. Ia berhasil memperbaiki posisinya dan mengakhiri lap pertama di urutan ke-10. Pergerakannya berlanjut pada lap kedua dengan naik ke posisi kedelapan.

Memasuki lap ketiga, pebalap Indonesia itu kembali memperbaiki posisi ke urutan ketujuh. Satu lap berikutnya, Veda sudah berada di posisi keenam. Sementara itu, persaingan di barisan depan juga berubah setelah David Almansa mengambil alih pimpinan lomba dari Quiles.

Persaingan antarpembalap semakin ketat pada lap-lap berikutnya. Veda sempat turun ke posisi kedelapan pada lap keenam, tetapi mampu bangkit dan kembali menempati urutan kelima pada lap ketujuh.

Namun, posisinya belum sepenuhnya aman. Veda kembali kehilangan tempat setelah disalip Joel Esteban dan harus …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Misteri Motifnya Operasi Listyo Sigit: Apa Betul Mau Membunuh atau Melumpuhkan Pemerintahan Prabowo?

Oleh Redaksi · 9 Nov, 18.04 WIB



BANDA ACEH - Operasi Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo dalam melakukan penyadapan ilegal menyimpan teka-teki besar mengenai motif sesungguhnya sosok tersebut melakukan penyadapan terhadap sejumlah pihak termasuk Presiden Prabowo Subianto.Pakar Hukum Tata Negara, Prof. Jimly Asshiddiqie meyakini bahwa operasi intelijen gelap yang menyasar presiden ini bukanlah kejahatan siber biasa, melainkan bagian dari desain besar permainan Politik dan ekonomi yang sedang berlangsung di Indonesia.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut menolak untuk sekadar melihat kasus ini dari kacamata pelanggaran administratif atau UU ITE. Ia mendesak agar meja hijau kelak tidak hanya mengadili tindakan penyadapannya, tetapi juga menguliti habis niat utama (mens rea) dari komplotan perwira kepolisian dalam memata-matai kepala negaranya sendiri.

"Pasti di forum pengadilan akan terungkap motifnya apa. Apa betul mau membunuh presiden? Mau membuat presiden lumpuh tidak lagi menjalankan pemerintahan? Atau misalnya untuk berkhianat pada kepentingan negara?" kata Jimly dikutip Senin (9/11/2026).

Pertanyaan Jimly ini merefleksikan kekhawatiran publik atas betapa berbahayanya penyalahgunaan wewenang aparat keamanan di level tertinggi. Kendati demikian, ia meminta semua pihak untuk tidak mendahului proses peradilan.

Sebelumnya, Bareskrim Polri resmi mengumumkan tersangka keempat dalam mega-skandal penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ia adalah Kadiv TIK Polri (Nonaktif), Irjen Pol Slamet Uliandi.

Penetapan ini melengkapi daftar komplotan intelijen gelap yang sebelumnya telah menjerat mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi Santoso.

Keempatnya telah melanggar Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010. Hal itu terkait dengan operasi mereka yang tidak memiliki legalitas penegakan hukum sama sekali dalam melakukan penyadapan.

Operasi penyadapan ini secara brutal mengintai ruang privasi kepala negara, jajaran menteri hingga pimpinan redaksi media. Selain itu, guna menutupi kejahatannya, para tersangka bahkan nekat menghapus jejak log penyadapan pada Oktober 2026.

Atas kejahatan berlapis ini, keempatnya telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan Pasal 258 dan Pasal 332 UU KUHP Nasional serta Pasal 32 UU ITE. Hal itu mengancam mereka dengan kurungan maksimal 10 tahun penjara.

NASIONAL

Bakal Dipilih Prabowo? Ini 3 Nama Besar yang Berpotensi Gantikan Gibran

Oleh Redaksi · 9 Nov, 21.56 WIB



BANDA ACEH - Pengamat Politik Refly Harun mengungkapkan tiga sosok dari partai Politik yang dinilai berpotensi dipilih Presiden Prabowo Subianto untuk menggantikan posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.Menurut Refly, ketiga tokoh tersebut adalah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketua DPP PDIP Puan Maharani, dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

Selain ketiga nama tersebut, Refly juga menyebut Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia sebagai salah satu calon potensial. Namun, ia mengaku kurang yakin dengan peluang Bahlil karena menilai posisi kepemimpinan di Partai Golkar relatif mudah berganti.

"Jadi dari spektrum partai politik itu kita harus menaruh AHY dan Puan serta Zulkifli Hasan sebagai yang terdepan plus Bahlil, tapi Bahlil saya enggak percaya karena tadi kepemimpinan di partai politik Golkar itu mudah sekali digantikan," ujarnya dalam kanal YouTube Refly Harun, dikutip Senin (9/11).

"Karena selalu bahwa tidak ada mental oposisi. Jadi, kalaupun mereka kecewa dengan pemerintah, tetap saja mereka akan berdiri di bawah pemerintahan," imbuhnya.

Refly kemudian menegaskan bahwa tiga nama yang dinilainya paling kuat adalah AHY, Puan Maharani, dan Zulkifli Hasan.

Sebagai informasi, Gibran saat ini tengah didesak untuk mundur dari jabatan wapres buntut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait persoalan ijazahnya.

Pada 6 Oktober 2026, dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang setara dengan pendidikan sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat.

Sementara itu, pada 30 Oktober 2026, MA menyatakan Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Pendidikan SMA luar negeri milik Gibran tidak sah dan batal demi hukum.

ACEH

Illiza Buka Pentas Gerakan Seniman Masuk Sekolah 2026

Oleh Redaksi · 8 Nov, 20.49 WIB

BANDA ACEH – Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa'aduddin Djamal secara resmi membuka Pentas Gerakan Seniman Masuk Sekolah (GSMS) Kota Banda Aceh tahun 2026, di Taman Budaya Aceh, Sabtu (8/11/2026).

Pentas tersebut menjadi ajang penampilan hasil pembelajaran seni budaya yang telah diikuti siswa SD dan SMP terpilih di ibu kota selama mengikuti program GSMS yang digagas Pemerintahan Illiza-Afdhal.

Dalam sambutannya, Illiza menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan GSMS, mulai dari dinas pendidikan dan kebudayaan, kepala sekolah, seniman pelatih, guru pendamping, hingga para peserta didik.

"Apa yang kita saksikan hari ini bukan sesuatu yang muncul begitu saja. Ada latihan, ada kerja keras, ada keberanian, dan tentu ada bimbingan dari para seniman serta guru-guru yang mendampingi," ujarnya.

Ia menjelaskan, GSMS merupakan salah satu program prioritas Pemerintah Kota Banda Aceh yang diarahkan untuk memperkuat pendidikan seni dan budaya di sekolah.

Program ini ditujukan kepada siswa SD dan SMP, dengan melibatkan para seniman, komunitas, dan pegiat budaya yang ada di Kota Banda Aceh.

"Tujuannya jelas. Kita ingin anak-anak semakin mengenal dan mencintai seni budaya, sekaligus memiliki ruang untuk mengembangkan bakat dan kreativitasnya," kata Illiza.

Menurutnya, sekolah tidak hanya menjadi tempat belajar mata pelajaran di dalam kelas.

"Sekolah juga harus menjadi ruang bagi anak-anak untuk berekspresi, berkreasi, berinovasi, dan mengenal kekayaan budaya daerahnya," ujarnya.

Illiza menyebut, program GSMS sudah dilaksanakan sedari 2025. Usai dicanangkan, program ini diikuti 40 sekolah, yang terdiri dari 30 SD dan 10 SMP, dengan melibatkan 448 siswa.

Pada 2026, program ini pun diperluas. Tahun ini GSMS melibatkan 51 sekolah SD dan SMP dengan 626 siswa-siswi, yang mendapatkan pembelajaran seni secara langsung dari 26 seniman dan pelatih.

Setiap sekolah mendapatkan pembelajaran sebanyak 20 kali pertemuan.

"Artinya, anak-anak tidak hanya datang untuk tampil hari ini. Mereka telah melalui proses belajar dan latihan yang cukup panjang," ujar Illiza.

Pada pentas hari ini, para peserta menampilkan berbagai karya seni yang telah dipelajari, antara lain Tari Ranup Lampuan, Ratoh Jaroe, Likok Pulo, Rapa'i Geleng, Rateb Meuseukat, baca puisi, pantomim, dan hikayat.

Masih menurut Illiza, seluruh aktivitas seni budaya tersebut masing-masing memiliki nilai, cerita, dan cara tersendiri dalam mengajarkan anak-anak …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

LAPANGAN PEKERJAAN

Ini Aturan Pesangon PHK Terbaru 2026, Cek Besaran Berdasarkan Masa Kerja

Oleh Redaksi · 8 Nov, 19.21 WIB

BANDA ACEH -Aturan pesangon PHK terbaru 2026 resmi diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Regulasi ini memuat ketentuan pemberian uang pesangon bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), dengan besaran yang disesuaikan berdasarkan masa kerja.

DPR RI sebelumnya telah menyetujui dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang. Pengesahan tersebut dilakukan dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Selasa (6/10/2026).

Mengutip laman resmi DPR RI, pembentukan undang-undang ketenagakerjaan terbaru ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi pekerja, pemberi kerja, pengusaha, dan pemerintah.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

LINGKUNGAN

Gelombang Kelvin dan Rossby Terpantau Aktif, Warga Diimbau Waspadai Cuaca Ekstrem

Oleh Redaksi · 8 Nov, 16.43 WIB



BANDA ACEH — Pemerintah Aceh meminta masyarakat mewaspadai potensi cuaca ekstrem pada periode 6–12 November 2026. Peringatan ini merujuk pada analisis terbaru BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Iskandar Muda Banda Aceh.

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, mengatakan dinamika atmosfer saat ini memicu peningkatan curah hujan di Aceh. Gelombang Kelvin dan Rossby Ekuatorial terpantau aktif. Daerah belokan angin dan konvergensi turut mendukung pertumbuhan awan hujan.

"Suhu muka laut berkisar 29–31 derajat Celsius dengan kelembapan udara 70–100 persen. Kondisi ini menambah uap air dan meningkatkan pembentukan awan hujan di Aceh," kata Nurlis di Banda Aceh.

Nurlis merinci dua kategori wilayah yang berpotensi terdampak cuaca ekstrem tersebut, yaitu Hujan Lebat hingga Sangat Lebat (disertai petir dan angin kencang): Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Aceh Jaya, Pidie, Nagan Raya, Aceh Tenggara, Gayo Lues, Aceh Tengah, Aceh Utara, Aceh Timur, dan Bener Meriah.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Diungkap Dasco, Pertemuan Prabowo dengan 10 Eks Kapolri Singgung Kasus Penyadapan

Oleh Redaksi · 9 Nov, 16.14 WIB



BANDA ACEH -Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkap isi pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan 10 mantan Kapolri di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Minggu kemarin, 8 November 2026.

Dasco mengatakan bahwa Presiden Prabowo bersama 10 mantan Kapolri turut membahas kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo bersama sejumlah perwira tinggi Polri. Di mana saat ini tengah ditangani aparat penegak hukum sempat disinggung dalam pertemuan tersebut.

"Yang saya dengar memang ada sedikit pembahasan soal itu, soal penyadapan ilegal yang kemudian memang kita sama-sama tahu pada saat ini sudah kemudian ditangani oleh aparat penegak hukum," kata Dasco, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 9 November 2026.

Kendati begitu, Dasco menjelaskan bahwa pertemuan tersebut tidak secara khusus membahas persoalan penyadapan ilegal. Menurutnya, agenda pertemuan juga diisi dengan silaturahmi serta pemaparan Presiden Prabowo mengenai visi dan misi pemerintah ke depan.

"Ya, bahwa kemarin memang betul, kita sama-sama lihat di media massa dan saya juga sudah konfirmasi, bahwa presiden kemudian menerima para mantan Kapolri dan juga didampingi oleh Kapolri dan pejabat utama dari Mabes Polri," kata Dasco.

Dalam kesempatan itu, kata Dasco, Prabowo memaparkan sejumlah hal terkait upaya memajukan Indonesia, menggerakkan roda perekonomian, serta meminta dukungan dari para mantan Kapolri yang hadir.

"Tentunya meminta dukungan dari pati-pati atau mantan Kapolri yang hadir pada saat kemarin. Nah, itu yang saya tahu," demikian Dasco.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan para Mantan Kapolri di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu, 8 November 2026.

Sepuluh mantan Kapolri turut hadir, yakni Jenderal Polisi (Purn) Roesmanhadi, Jenderal Polisi (Purn) Roesdihardjo, Jenderal Polisi (Purn) Surojo Bimantoro, Jenderal Polisi (Purn) Da'i Bachtiar, Jenderal Polisi (Purn) Sutanto, Jenderal Polisi (Purn) Bambang Hendarso Danuri, Jenderal Polisi (Purn) Timur Pradopo, Jenderal Polisi (Purn) Sutarman, Jenderal Polisi (Purn) Badrodin Haiti, dan Jenderal Polisi (Purn) Tito Karnavian.

Hadir pula Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin, serta Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

Berikutnya Kapolri Jenderal Jenderal Suyudi Ario Seto beserta pejabat Mabes Polri di antaranya Astamaops Komjen Roycke Harry Langie, Wakapolri Komjen Wahyu Hadiningrat.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

LINGKUNGAN

Satu Kru Helikopter Pemadam Karhutla Masih Dalam Pencarian, Pilot Australia Selamat

Oleh Redaksi · 8 Nov, 19.16 WIB

BANDA ACEH -Satu kru warga negara Indonesia (WNI) masih dalam pencarian setelah helikopter Super Puma H-225 bernomor registrasi VH-HGM jatuh di perairan Sungai Barito, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, Minggu, 8 November 2026.

Sementara itu, dua awak berkewarganegaraan Australia berhasil ditemukan dalam kondisi selamat.

Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan mengatakan, ketiga awak helikopter tersebut yakni Hugh Andrew John Page dan Michael John Betteridge, warga negara Australia, serta Yayan Supyansuri, warga negara Indonesia.

Hugh Andrew John Page bertugas sebagai pilot, Michael John Betteridge sebagai pilot, sedangkan Yayan Supyansuri merupakan Helicopter Landing Officer (HLO).

"Berdasarkan laporan awal Kantor Basarnas Banjarmasin, dari tiga awak helikopter, ada dua yang telah ditemukan dalam kondisi sehat, yaitu Hugh Andrew John Page dan Michael John Betteridge. Sementara itu, satu orang awak lainnya yaitu Yayan Supyansuri masih dalam pencarian," kata Berton dalam konferensi pers secara virtual.

Berton memastikan BNPB memberikan perhatian penuh terhadap pencarian Yayan. Koordinasi dengan Basarnas dan unsur terkait juga terus dilakukan untuk mendukung operasi pencarian dan pertolongan.

"Kami memberikan perhatian penuh terhadap upaya pencarian tersebut. Seluruh unsur terkait telah berkoordinasi untuk mendukung proses pencarian dan pertolongan," ujarnya.

Adapun dua awak yang telah ditemukan dipastikan mendapatkan pemeriksaan kesehatan dan penanganan medis sesuai kebutuhan.

Berdasarkan laporan Kantor SAR Banjarmasin, tim penyelamat diberangkatkan menuju lokasi kejadian pada pukul 13.10 WITA. Sebanyak 18 personel dikerahkan menggunakan kendaraan penyelamat dan kapal rigid inflatable boat (RIB).

Lokasi kecelakaan diperkirakan berjarak sekitar 141 kilometer dari Kantor SAR Banjarmasin atau 71 mil laut dari Dermaga SAR Basirih. Perjalanan menuju lokasi diperkirakan memakan waktu sekitar lima jam.

Operasi pencarian melibatkan Kantor SAR Banjarmasin, TNI Angkatan Udara, Polri, Babinsa, serta masyarakat setempat. Sejumlah peralatan turut dikerahkan, antara lain RIB, kendaraan penyelamat, perahu karet, peralatan penyelaman, Aqua Eye, alat komunikasi, dan perlengkapan …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Fraksi PAN di MPR Minta Gibran Mundur Sukarela

Oleh Redaksi · 9 Nov, 20.07 WIB



BANDA ACEH -Fraksi PAN MPR RI tegas meminta ada tindak lanjut konkret atas putusan Mahkamah Agung (MA) terkait Surat Keterangan (Suket) penyetaraan SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

MA telah mengabulkan kasasi gugatan perbuatan melawan hukum dan menyatakan Surat Keterangan penyetaraan SMA milik Gibran yang digunakan pada Pemilu Presiden 2024 tidak sah.

Untuk itu, menurut Ketua Fraksi PAN MPR RI, Syarifuddin Sudding, Putusan MA tersebut bersifat eksekutorial sehingga harus dieksekusi. Sebab, Gibran dinilai tidak lagi memenuhi syarat konstitusional sebagai wakil presiden pasca dibatalkan syarat tersebut.

"Saya kira dengan dibatalkannya persyaratan pada saat dia mendaftar, itu berarti wakil presiden sudah tidak memenuhi syarat sebagai konsekuensi hukum dari Putusan Mahkamah Agung.," kata Sudding kepada wartawan, Senin 9 November 2026.

"Kalau yang bersangkutan (Gibran) tidak mundur dengan putusan Mahkamah Agung itu, harus ada dieksekusi lewat jalur Politik," sambungnya.

Anggota Komisi III DPR RI ini menyarankan Gibran sebaiknya meletakkan jabatannya secara suka rela demi menghormati peradilan, karena sudah tidak memiliki legitimasi pasca diputus tidak sah oleh MA.

"Sebaiknya yang bersangkutan mundur. Kan sudah tidak memiliki legitimasi, baik secara yuridis karena persyaratan formal tidak terpenuhi sebagai wakil presiden. Saya kira juga secara moral, masyarakat ini persoalan trust, karena ini jabatan publik," jelas dia.

Namun, Sudding mengatakan DPR RI bisa menggunakan hak konstitusionalnya apabila Gibran tidak mau mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden.

Langkah politik tersebut sesuai amanat konstitusi dalam Pasal 7A dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) tahun 1945.

"Kalau tidak mundur, DPR bisa menggunakan hak konstitusionalnya untuk mengambil sikap hak menyatakan pendapat (HMP) dengan dasar Putusan Mahkamah Agung yang bersifat eksekutorial," tandasnya.

EKONOMI

Pengangguran Aceh Tembus 152 Ribu Orang pada 2026

Oleh Van · 8 Nov, 16.01 WIB

BANDA ACEH – Persoalan ketenagakerjaan di Aceh masih menjadi pekerjaan rumah serius. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh mencatat sekitar 152 ribu orang belum memperoleh pekerjaan hingga Agustus 2026. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan kesempatan kerja belum sepenuhnya mampu menyerap angkatan kerja yang tersedia.

Kepala BPS Aceh, Agus Andria, menyampaikan bahwa berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2026, jumlah penduduk yang bekerja di Aceh mencapai 2,52 juta orang dari total 2,67 juta orang angkatan kerja. Sementara itu, sekitar 152 ribu orang masih berstatus sebagai pengangguran.

Agus menjelaskan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Aceh pada Agustus 2026 berada di angka 5,70 persen. Dengan kata lain, dari setiap 100 orang yang masuk dalam angkatan kerja, terdapat sekitar lima hingga enam orang yang belum memiliki pekerjaan.

Pernyataan tersebut disampaikan Agus dalam keterangan pers resmi statistik BPS Aceh yang ditayangkan melalui kanal YouTube BPS Aceh. Pemaparan itu diketahui pada Jumat, 6 November 2026.

BPS juga melaporkan bahwa jumlah penduduk usia kerja di Aceh pada Agustus 2026 mencapai 4,22 juta orang. Dari keseluruhan jumlah tersebut, sebanyak 2,67 juta orang tergolong sebagai angkatan kerja, sedangkan 1,55 juta orang lainnya merupakan penduduk bukan angkatan kerja.

Di sisi lain, kondisi pasar tenaga kerja Aceh justru memperlihatkan perkembangan yang perlu mendapat perhatian. Jika dibandingkan dengan Agustus 2025, jumlah penduduk yang berhasil terserap dalam pekerjaan mengalami penyusutan sekitar 43 ribu orang.

Pada periode yang sama, TPT Aceh juga mengalami kenaikan sebesar 0,06 poin persentase dibandingkan tahun sebelumnya. Agus menyebutkan, peningkatan angka pengangguran tersebut tidak terlepas dari pengaruh bencana yang melanda sejumlah wilayah menjelang penghujung 2025.

"Peningkatan pengangguran tersebut turut dipengaruhi dampak bencana yang terjadi menjelang akhir 2025," kata Agus.

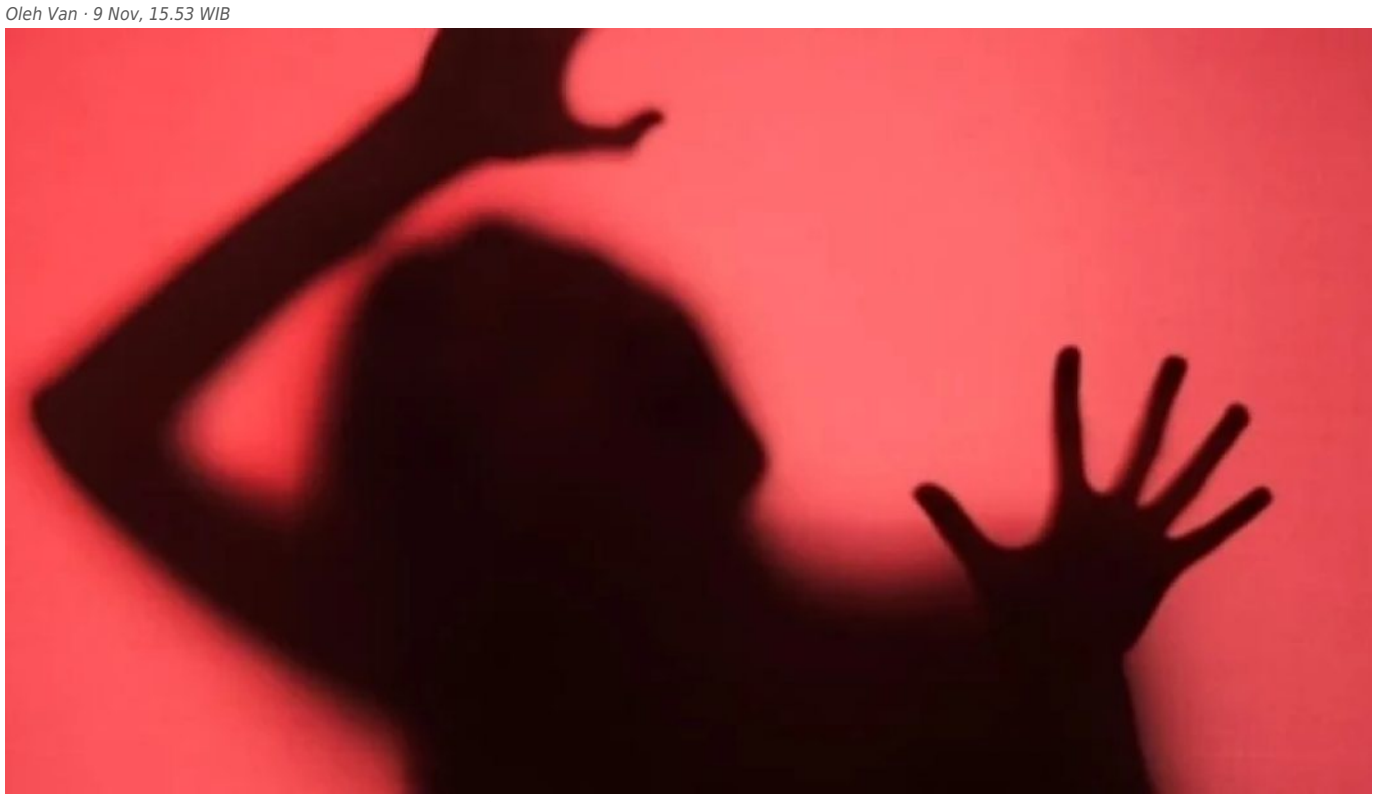
» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Viral Oknum Dosen Universitas Lampung Diduga Lecehkan Mahasiswi S2, Rektor Janji Kawal Penanganan

Oleh Van · 9 Nov, 15.53 WIB



Sebuah bayangan misterius yang menyampaikan perasaan ketakutan dan keputusasaan di bawah cahaya merah yang intens.

LAMPUNG — Seorang mahasiswi pascasarjana Universitas Lampung (Unila) mengungkap dugaan pelecehan seksual yang dilakukan seorang oknum dosen berinisial RF.

Korban membagikan kronologi peristiwa tak menyenangkan yang diterimanya dari oknum dosen tersebut melalui akun Instagram pribadinya pada Minggu, 8 November 2026 dan menuai perhatian publik.

Pihak kampus melalui pernyataan dari Rektor Unila, Lusmeilia Afriani, menyatakan telah melakukan penanganan sejak beberapa bulan lalu.

“Ibu sangat tidak mendukung tindakan yang tidak sesuai dengan norma kesusilaan. Ibu turut prihatin dengan apa yang dialami oleh ananda,” tulis Lusmeilia dalam tanggapannya melalui kolom komentar akun Instagram korban, dikutip pada Senin, 9 November 2026.

“Dan untuk laporan terkait dosen tersebut, sebenarnya dari beberapa bulan yang lalu sudah diusut, namun memang prosesnya lumayan panjang,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Lusmeilia berjanji bakal mengawal kasus tersebut dan meminta korban untuk bersabar dalam penyelesaian kasus.

“Kita sama-sama kawal prosesnya ya, Nak, agar kasus ini bisa segera selesai. Beberapa hari lalu juga sudah Ibu follow up lagi dengan dekan tersebut. Bersabar, Nak,” sambungnya.

Kronologi Dugaan Pelecehan yang Dilakukan Oknum Dosen

Dalam unggahannya, mahasiswi program magister tersebut menceritakan dugaan tindakan tidak pantas yang dialaminya saat bertemu RF untuk mengurus berkas akademik.

Peristiwa itu disebut terjadi pada 5 Mei 2026, setelah korban mengikuti seminar hasil tesis, di mana korban datang bersama seorang rekannya ke ruangan dosen yang diketahui juga menjabat sebagai ketua program studi (kaprodi).

Menurut pengakuan korban, ketika rekannya keluar ruangan untuk memperbaiki berkas, RF diduga melakukan tindakan fisik yang tidak diinginkan. Korban mengaku pipi dan telinganya dielus, kemudian dipeluk serta dicium keningnya.

Korban juga mengungkapkan kekhawatiran terhadap kelanjutan pendidikannya karena masih harus menyelesaikan sejumlah tahapan akademik yang berkaitan dengan dosen tersebut.

“Setelah saya keluar dari ruangannya, tubuh saya kaku, gemeteran, dan ketakutan. Saya terdiam sejenak, setelahnya saya keluar dari gedung tersebut,” ungkap korban.

Setelah kejadian tersebut, korban mengaku mengalami ketakutan dan khawatir terhadap keberlanjutan pendidikannya karena sejumlah tahapan akademik serta proses administrasi masih berkaitan dengan oknum dosen tersebut.

Korban juga mengunggah sejumlah tangkapan layar pesan chat WhatsApp dari oknum dosen yang beberapa kali mengajak bertemu di luar kampus.(*)

EKONOMI

OJK Bongkar Pelanggaran 7 Emiten, Ada Masalah Laporan Keuangan hingga Transaksi Afiliasi

Oleh Van · 8 Nov, 15.21 WIB

JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi administratif kepada tujuh emiten yang melakukan pelanggaran ketentuan pasar modal. Sanksi tersebut berupa denda hingga peringatan tertulis, dengan nilai terbesar dikenakan kepada PT Asri Karya Lestari Tbk (ASLI).

Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Khoirul Muttaqien dalam keterangan resminya pada Minggu, (7/11/2026), menjelaskan salah satu pelanggaran berkaitan dengan penyajian informasi aset dalam laporan keuangan ASLI.

"Pada LKTT 2024, LKT 2024 dan LKTT 2025, PT Asri Karya Lestari Tbk terdapat aset dengan nilai yang material yang tidak dapat diyakini keandalan nilai dan informasi atas aset tersebut berdasarkan dokumen pendukungnya," ungkap Khoirul.

Selain ASLI, enam emiten lain yang turut dikenai sanksi adalah PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI), PT Adhi Commuter Properti Tbk (ADCP), PT Widodo Makmur Unggas Tbk (WMUU), PT Kalbe Farma Tbk (KLBF), PT Enseval Putera Megatrading Tbk (EPMT), dan PT Limas Indonesia Makmur Tbk (LMAS).

Pelanggaran yang ditemukan OJK beragam, mulai dari ketidakandalan informasi aset dalam laporan keuangan, ketidaksesuaian prosedur transaksi afiliasi dan material, hingga tidak diselenggarakannya rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST).

Atas pelanggaran tersebut, ASLI dikenai denda sebesar Rp1,35 miliar. Tiga anggota direksinya, yakni Sulistiono, Yudra Saputra, dan Didik Hariyanto, juga dijatuhi denda Rp645 juta secara tanggung renteng.

Sementara itu, Akuntan Publik Arief Prima yang bertindak sebagai auditor laporan keuangan tahunan ASLI 2024 dikenai denda Rp107,5 juta.

Jika digabungkan, total denda yang berkaitan dengan perkara ASLI mencapai Rp2,1025 miliar.

OJK juga menjatuhkan sanksi kepada ADHI dan ADCP terkait perjanjian pinjaman pemegang saham atau shareholder loan.

Kedua perusahaan tersebut dinilai tidak menjalankan prosedur transaksi afiliasi sesuai ketentuan POJK Nomor 42/POJK.04/2020.

Masing-masing perusahaan dikenai denda Rp450 juta. Selain itu, dua penilai yang memberikan pendapat kewajaran setelah transaksi dilakukan, Toto Suharto dan Syaiful Hasan, masing-masing dikenai denda Rp65 juta.

Dengan demikian, total sanksi yang berkaitan dengan ADHI dan ADCP mencapai Rp1,03 miliar.

Pelanggaran berbeda ditemukan pada PT Widodo Makmur Unggas Tbk (WMUU).

Emiten tersebut dikenai denda Rp925 juta karena tidak menjalankan prosedur transaksi material yang sekaligus merupakan transaksi afiliasi atas penerimaan …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

BGN Bantah PHK Massal Relawan SPPG, Ternyata Ini Aturan Jumlah Tenaga di Dapur MBG

Oleh Van · 9 Nov, 16.04 WIB



Mochamad Herviano memberikan penjelasan resmi dengan gestur tangan yang tegas.

JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) membantah adanya kewajiban pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Klarifikasi tersebut dikutip pada (9/11/2026) melalui siaran pers BGN, menyusul penyesuaian kebutuhan tenaga dan biaya operasional dapur.

BGN menyebut jumlah relawan dapat disesuaikan berdasarkan banyaknya penerima manfaat yang dilayani setiap dapur, bukan melalui kewajiban pengurangan pekerja.

BGN Bantah PHK Massal Relawan SPPG

Juru Bicara BGN Tysa Novenny menegaskan bahwa lembaganya tidak pernah meminta mitra dapur mengurangi jumlah relawan.

“Perlu kami sampaikan bahwa tidak ada kewajiban bagi dapur SPPG untuk mengurangi relawan,” kata Tysa dalam siaran pers BGN.

BGN memberikan alternatif perhitungan kebutuhan tenaga berdasarkan kapasitas pelayanan, dengan batas maksimal biaya operasional Rp3.000 per penerima manfaat per hari.

Dalam acuan tersebut, dapur yang melayani lebih dari 3.000 penerima manfaat dapat menggunakan perhitungan 47 relawan per hari.

Sementara itu, dapur dengan 2.500–2.999 penerima manfaat memiliki acuan 42 relawan, sedangkan kapasitas 2.000–2.499 penerima manfaat sebanyak 33 relawan.

Untuk dapur yang melayani 1.500–1.999 penerima manfaat, acuannya 24 relawan, sedangkan kapasitas 1.000–1.499 penerima manfaat sebanyak 15 relawan.

BGN menegaskan angka tersebut bukan batas maksimal jumlah relawan, melainkan alternatif perhitungan kebutuhan tenaga sesuai skala pelayanan.

Mitra SPPG juga dapat menerapkan sistem shifting atau pergiliran jadwal kerja agar kebutuhan tenaga disesuaikan dengan pelayanan harian.

“Sekali lagi, kami tidak pernah meminta dapur SPPG untuk mengurangi jumlah relawan,” ujar Tysa.

Transformasi MBG 2.0 Fokus Efisiensi Anggaran

Kebijakan penyesuaian tersebut berjalan di tengah transformasi MBG 2.0 yang dipimpin Kepala BGN Sudaryono.

Dalam siaran pers pada Kamis, 29 Oktober 2026, BGN menyebut transformasi diarahkan pada pemberantasan praktik koruptif, penguatan tata kelola, pengawasan, transparansi, dan kolaborasi.

BGN mencatat efisiensi dan pengembalian anggaran mencapai Rp44 triliun selama 100 hari kerja kepemimpinan Sudaryono.

Angka tersebut terdiri atas efisiensi anggaran BGN Rp38 triliun, insentif yayasan Rp2,5 triliun, operasional dapur Rp3 triliun, serta pengembalian saldo virtual account sekitar Rp500 miliar.

Dalam periode yang sama, BGN mencatat sekitar 1,03 juta tenaga kerja aktif terlibat dalam pelaksanaan program MBG. (*)

LINGKUNGAN

Helikopter Jatuh di Sungai Barito Kalsel saat Padamkan Karhutla

Oleh Redaksi · 8 Nov, 13.30 WIB

BANDA ACEH - Helikopter jenis WB Super Puma dengan nomor registrasi VH-HGM jatuh di Sungai Barito, Desa Tabatan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan (Kalsel), saat misi pemadaman karhutla, Minggu (8/11/2026).

Helikopter tersebut merupakan armada sewaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan mengangkut tiga kru.

"Telah terjadi kecelakaan heli WB super puma VH-HGM jatuh ke Sungai Barito," ujar Plt Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan saat dikonfirmasi.

Berton membenarkan helikopter tersebut merupakan armada yang disewa BNPB. Dia menyebut ada tiga kru di dalam helikopter saat kecelakaan terjadi.

"Jumlah kru tiga orang," katanya.

Helikopter itu diduga jatuh saat mengambil air untuk misi pemadaman karhutla. Namun, Berton mengatakan BNPB masih mendalami aktivitas helikopter sebelum kecelakaan.

Kidzania 2026 di Karhutla, Nana Mirdad hingga Pandji Pragiwaksono Buka Suara

"Kalau lihat videonya demikian (sedang angkut air), nanti kami sampaikan setelah informasi utuh," tuturnya

NASIONAL

Jokowi Ketakutan Jika Gibran Ditumbangkan Massa Revolusioner

Oleh Redaksi · 9 Nov, 15.55 WIB



Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto. FOTO/Net.

BANDA ACEH -Suka atau tidak suka, saat ini Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi praktis sudah tidak mempunyai lagi dukungan Politik yang kuat di parlemen.

"Apalagi operator-operator politiknya di beberapa institusi, seperti di Polri, satu per satu sudah ditumbangkan oleh kekuatan Prabowo Subianto," kata analis politik Saiful Huda Ems kepada RMOL, Senin 9 November 2026.

Saiful mengaku menerima informasi ada tujuh partai politik dari delapan partai politik atau fraksi di DPR, telah sepakat untuk segera melakukan Hak Menyampaikan Pendapat guna menurunkan Wapres Gibran Rakabuming Raka.

"Kita tunggu saja sampai akhir masa reses anggota-anggota DPR hari ini," kata Saiful.

Menurut Saiful, pilihan rasionalnya bagi Jokowi adalah Wapres Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri.

Sebab jika Gibran tidak mundur, maka akan kedahuluan dengan konsolidasi massa revolusioner yang akan bergerak secara militan untuk meminta putera sulung Jokowi itu mundur dengan waktu secepatnya.

Selain itu juga akan segera terbangun kekompakan masing-masing fraksi di DPR, untuk terlaksananya Hak Menyampaikan Pendapat yang akan berujung pada Sidang MPR dan menurunkan Wapres Gibran.

"Lalu MPR memilih satu dari dua Cawapres yang akan disodorkan oleh Presiden Prabowo Subianto," kata Saiful.

Meskipun demikian, kata Saiful, hal yang paling ditakutkan Jokowi itu sebetulnya bukan gerakan Hak Menyampaikan Pendapat di parlemen.

"Sebab itu nantinya bisa dimanfaatkan oleh Jokowi untuk mendulang simpati rakyat, dimana dia yang sangat lihai menggunakan jurus playing victim akan berusaha membalik persepsi publik," kata Saiful.

"Jika awalnya Gibran dianggap melakukan perbuatan tercela dan melanggar konstitusi, menjadi dianggap telah dizalimi DPR," sambungnya.

Tetapi yang paling ditakutkan Jokowi adalah jika massa revolusioner yang bergerak untuk menjatuhkan Wapres Gibran.

"Kenapa bisa demikian? Karena itu akan berpotensi untuk "meNepalkan" keluarga Jokowi. Karena jika hal ini yang terjadi, maka Jokowi dan keluarganya hanya seperti sedang menunggu kutukan rakyat," kata Saiful.

Karena itu, Saiful menilai, pilihan paling rasional yang akan dilakukan Jokowi dalam waktu dekat ini adalah Gibran mundur dari posisinya sebagai Wapres.

"Jokowi selanjutnya akan lebih fokus untuk memohon pertolongan pada Presiden Prabowo Subianto untuk melindungi keluarganya dari jerat hukum," pungkas Saiful

NASIONAL

DPR Wajib Bergerak Jika Gibran Tak Sukarela Mundur

Oleh Redaksi · 9 Nov, 16.08 WIB



BANDA ACEH -Desakan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie agar pimpinan partai Politik di DPR segera bermusyawarah merespons tuntutan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ditanggapi Anggota Komisi II DPR RI, Indrajaya.

“Saya mengapresiasi Prof. Jimly yang berbicara sebagai penjaga konstitusi. Ketika beliau mengingatkan putusan MK dan MA harus menjadi pegangan, itu suara akal sehat yang wajib didengar dan DPR tidak mungkin mengabaikan dua putusan itu,” ujar Indrajaya di Jakarta, Senin , 9 November 2026.

Polemik mengenai kedudukan hukum Wakil Presiden dipandang bukan lagi sebatas perdebatan dinamika politik semata, melainkan ujian atas penegakan hukum nasional.

“Jangan sampai konstitusi hanya menjadi macan kertas. Putusan pengadilan bukan sekadar dokumen, tetapi harus dihormati dan ditindaklanjuti oleh lembaga negara sesuai kewenangannya, termasuk DPR,” tegasnya.

Legislator PKB tersebut menyoroti tiga persoalan hukum saling berkaitan yang melandasi tuntutan pemakzulan dan wajib menjadi bahan pertimbangan utama fraksi-fraksi di parlemen.

DPR diimbau untuk menjalankan fungsi pengawasan dan mekanisme checks and balances tanpa harus tersandera oleh kalkulasi politik kompromistis.

"Konsolidasi politik memang penting, tetapi jangan sampai terlalu lama sehingga menggerus kepercayaan publik. DPR harus berani mengambil langkah konstitusional karena bijaksana bukan berarti diam,” kata Indrajaya.

Ia memperingatkan para elite politik agar membaca eskalasi ketidakpercayaan publik (political distrust) yang tecermin dari maraknya aksi ketidakpuasan warga di berbagai daerah, seperti aksi penurun foto Wapres di Yogyakarta.

Pengalaman pahit gejolak politik reformasi 1998 diimbau untuk dijadikan pelajaran berharga agar krisis kepercayaan nasional tidak berulang.

“Ini menunjukkan adanya political distrust yang tidak boleh dianggap remeh. Jangan biarkan persoalan ini menggantung dan berkembang menjadi krisis kepercayaan yang lebih besar bagi bangsa,” ucapnya.

Indrajaya sependapat bahwa langkah musyawarah antarpimpinan partai politik di parlemen pada masa persidangan mendatang menjadi pintu masuk terbaik untuk mengurai kebuntuan hukum. Opsi pengunduran diri secara terhormat dinilai dapat menjadi solusi bermartabat untuk menjaga stabilitas pemerintahan.

“Pengunduran diri secara terhormat dapat menjadi salah satu jalan penyelesaian. Namun jika tidak ada langkah sukarela, DPR wajib mempertimbangkan penggunaan hak konstitusionalnya sesuai UUD 1945,” katanya.

BISNIS

Kejagung Bongkar Dugaan Suap Penyelenggara Negara di Tambang Nikel Sultra, Siapa Penerimanya?

Oleh Redaksi · 8 Nov, 09.09 WIB

BANDA ACEH - Dugaan praktik korupsi dalam tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara (Sultra) semakin mengarah pada persoalan serius. Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah membongkar dugaan pemberian suap dari sejumlah perusahaan tambang nikel ilegal kepada penyelenggara negara untuk memuluskan berbagai kepentingan bisnis pertambangan.

Dugaan tersebut bukan sekadar menyangkut pengurusan administrasi perizinan. Penyidik juga menelusuri kemungkinan adanya praktik pemberian uang yang berkaitan dengan proses produksi hingga penjualan hasil tambang nikel.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Saiful Bahri, mengungkapkan bahwa penyidik menemukan fakta mengenai dugaan pemberian sesuatu kepada penyelenggara negara untuk mempermudah proses administrasi pertambangan.

"Serta dalam proses-proses pengelolaan pertambangan, perusahaan-perusahaan ini telah melakukan pemberian sesuatu untuk mempermudah segala proses administrasi berupa suap kepada penyelenggara negara," kata Saiful di Gedung Bundar Kejaksaan Agung dikutip Minggu (8/11/2026).

Pernyataan tersebut menjadi sorotan karena dugaan praktik suap itu berkaitan dengan sektor strategis yang menyangkut pengelolaan sumber daya alam. Jika terbukti, persoalannya bukan hanya mengenai aktivitas perusahaan tambang, tetapi juga dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh penyelenggara negara.

Saat ditanya mengenai pihak penyelenggara negara yang diduga menerima pemberian tersebut, Saiful menjelaskan bahwa dugaan suap berkaitan dengan kewenangan dalam penerbitan izin pertambangan, produksi, hingga penjualan nikel.

"Kemudian terkait dengan adanya pemberian-pemberian kepada penyelenggara negara, tentunya dalam proses pengelolaan tambang nikel, tentunya dalam proses-proses itu ada kaitan dengan penyelenggara negara dalam pemberian izin-izin, dan produksi, serta penjualan," ujarnya.

Saiful menegaskan, dugaan pemberian suap tersebut terungkap berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh penyidik dari pemeriksaan sejumlah saksi.

"Di situ dari fakta-fakta hasil pemeriksaan yang kami lakukan terhadap saksi-saksi, diperoleh adanya fakta-fakta itu. Dan nantinya tentunya ini masih materi penyidikan, nanti akan kami sampaikan dalam surat dakwaan nanti akan tergambar," ungkapnya.

Arif Kurniawan Kendalikan Enam Perusahaan Tambang

Di balik pengusutan dugaan suap tersebut, Kejagung juga mengungkap sosok berinisial AK yang disebut sebagai pengendali sejumlah perusahaan tambang nikel ilegal di Sulawesi Tenggara.

Keterangan penyidik menyebut, dugaan peran AK sebagai pengendali didasarkan pada hasil pemeriksaan terhadap 38 saksi.

"Fakta yang kami jelaskan bahwa dia sebagai pengendali adalah dari keterangan-keterangan yang telah kami periksa sebanyak 38 orang saksi.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

LIFESTYLE

5 Alasan Victoria Hotel Pilihan Tepat Hotel Keluarga di Jogja

Oleh Redaksi · 8 Nov, 18.04 WIB

YOGYAKARTA - Kota Jogja masih menjadi tujuan wisata utama bagi banyak orang. Kota ini menawarkan destinasi wisata budaya dan tempat hiburan untuk anak maupun orang tua.

Berwisata bersama keluarga tentunya membutuhkan akomodasi yang nyaman saat merencanakan liburan ke Yogyakarta.

Karena itu, memilih hotel keluarga di Jogja dengan fasilitas yang sesuai dapat membantu keluarga menjalani rangkaian kegiatan wisata dengan lebih praktis.

The Victoria Hotel Jogja menawarkan fasilitas untuk kebutuhan liburan bersama keluarga.

Hotel yang berlokasi di Jalan Laksda Adisutjipto ini juga menyediakan fasilitas ramah anak.

Victoria Hotel Jogja dapat menjadi pilihan bagi Anda yang mencari tempat menginap dengan kamar keluarga dan wahana rekreasi di dalam hotel. Berikut ulasannya.

The Victoria Hotel Jogja menyediakan New Superior Room seluas 24 meter persegi dengan kapasitas dua orang dewasa dan satu anak. Hotel ini juga menawarkan tipe Superior seluas 24 meter persegi serta Deluxe seluas 25 meter persegi. Pilihan tersebut memberi keluarga alternatif kamar sesuai kebutuhan selama menginap.

Setiap kamar dilengkapi pendingin udara, televisi pintar, serta pembuat teh dan kopi. Tamu juga dapat menggunakan shower dengan pilihan air panas dan dingin. Fasilitas tersebut mendukung kebutuhan istirahat dan rutinitas keluarga selama berada di hotel, termasuk saat orang tua dan anak berbagi waktu di kamar.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Anwar Sadad Kembali Dipanggil KPK, Kasus Dana Hibah Jatim Seret Puluhan Nama

Oleh Van · 9 Nov, 15.49 WIB



Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Anwar Sadad. FOTO/Net.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Anwar Sadad, untuk diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah kelompok masyarakat (Pokmas) di Jawa Timur, Senin, 9 November 2026.

Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan pengurusan dana hibah Pokmas yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2021–2022.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa pemeriksaan dijadwalkan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Anwar Sadad Dipanggil KPK Bersama Tersangka Lain

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," kata Budi Prasetyo dalam keterangannya, Senin, 9 November 2026.

Selain Anwar, penyidik juga memanggil Bagus Wahyudyono, pihak swasta yang turut ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Belum ada keterangan mengenai materi pemeriksaan yang akan didalami penyidik terhadap keduanya.

KPK juga belum menyampaikan konfirmasi kehadiran Anwar maupun Bagus dalam agenda pemeriksaan tersebut.

Anwar merupakan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019–2024 sebelum menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2024–2029.

Kasus Dana Hibah Jatim Berawal dari Pengembangan OTT

Perkara dugaan korupsi dana hibah Jatim merupakan pengembangan penyidikan dari operasi tangkap tangan terhadap mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak pada Desember 2022.

Pada 2 Oktober 2025, KPK mengumumkan penetapan 21 orang sebagai tersangka dalam pengembangan perkara tersebut.

Mereka terdiri atas empat pihak yang diduga menerima suap dan 17 pihak yang diduga memberikan suap terkait pengurusan dana hibah Pokmas.

Anwar Sadad termasuk dalam kelompok tersangka penerima bersama mantan Ketua DPRD Jatim Kusnadi, Wakil Ketua DPRD Jatim Achmad Iskandar, serta Bagus Wahyudyono.

Dalam dokumen penyidikan KPK, perkara yang melibatkan Anwar berkaitan dengan dugaan penerimaan hadiah atau janji dari sejumlah pihak dalam pengurusan dana hibah Pokmas APBD Jawa Timur tahun anggaran 2021–2022.

KPK kemudian menghentikan penyidikan terhadap Kusnadi pada 16 Desember 2025 karena yang bersangkutan telah meninggal dunia.

Pemanggilan Anwar pada Senin ini menjadi salah satu perkembangan lanjutan penanganan perkara yang telah diusut KPK sejak pengembangan kasus Sahat Tua Simanjuntak.

NASIONAL

Didatangi Relawan G-BRAN, Kepala MA Grobogan Pasang Kembali Foto Wapres Gibran

Oleh Redaksi · 9 Nov, 16.18 WIB



BANDA ACEH - – Kasus penurunan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Madrasah Aliyah (MA) Plus Al Hidayah Karangrayung, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, berbuntut panjang.

Kepala MA Al-Hidayah, Ahmad Zaki Iqbal didatangi relawan pendukung Gibran yang tergabung dalam Pengurus Cabang Gerakan Berani Nusantara (G-BRAN) Grobogan, Senin (9/11/2026).

Kedatangan relawan yang mendapat pengawalan langsung dari aparat TNI-Polri serta tim pengawas pendidikan bertujuan meminta klarifikasi resmi dari Kepala MA Plus Al Hidayah, Ahmad Zaki Iqbal, terkait motif pencopotan foto lambang negara tersebut.

Dalam mediasi tersebut, Zaki Iqbal menjelaskan, penurunan foto wapres dilakukan karena pihak sekolah mengkhawatirkan berkembangnya polemik serta isu terkait ijazah Gibran di tengah masyarakat.

"Pencopotan tersebut bukan dimaksudkan untuk memicu kegaduhan publik. Kami menyampaikan permohonan maaf atas video penurunan foto yang telah terlanjur viral," ujar Ahmad Zaki Iqbal.

Usai mendengarkan klarifikasi dan mencapai kesepakatan damai, foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akhirnya kembali dipasang di dinding kantor sekolah pada posisi semula, bersanding dengan foto Presiden Prabowo Subianto dan lambang negara Garuda Pancasila.

Pemasangan kembali ini disaksikan langsung oleh jajaran relawan G-BRAN, jajaran TNI-Polri, serta pengawas sekolah.

Ketua Cabang G-BRAN Grobogan, Suwadi, mengimbau kepada seluruh pihak, khususnya lembaga institusi pendidikan, agar tetap menghormati simbol dan kedudukan konstitusional Gibran sebagai Wakil Presiden.

"Kami meminta seluruh elemen masyarakat dan lembaga pendidikan untuk menghormati kedudukan Wapres. Kami berharap peristiwa serupa tidak kembali terulang di kemudian hari," kata Suwadi.

Selain kesepakatan damai dan pemasangan kembali foto resmi Wapres, tim pengawas pendidikan setempat meminta Kepala MA Plus Al Hidayah untuk membuat surat permohonan maaf tertulis serta surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatan serupa.

Sebelumnya, sebuah video berdurasi 49 detik yang merekam aksi penarikan bingkai foto Wapres Gibran dari dinding sekolah terekam kamera dan beredar luas hingga memantik beragam reaksi dari warganet

EKONOMI

Awas! Akun Saham Dibobol, Saham Investor Bisa Dijual Tanpa Izin dan Uangnya Dialihkan

Oleh Van · 8 Nov, 15.25 WIB

JAKARTA – Bursa Efek Indonesia (BEI) mengingatkan investor ritel untuk memperketat keamanan rekening efek dan rekening dana nasabah (RDN).

Peringatan ini disampaikan menyusul maraknya kasus pembobolan akun saham yang masih terjadi sepanjang 2025 hingga 2026.

Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI, Irvan Susandy dalam keterangan resminya pada Minggu, (7/11/2026) mengungkapkan pembobolan akun dapat membuat saham milik investor dijual tanpa izin.

Dana hasil penjualan kemudian dialihkan untuk membeli saham lain yang memiliki likuiditas lebih rendah.

“Jadi mereka membobol akun teman-teman, kemudian saham-saham yang bagus dijual, hasil penjualan dibeliin saham-saham yang kurang bagus, yang di mana di sisi sebelahnya adalah temannya dia, di mana uang itu akhirnya berpindah-pindah-pindah,” kata Irvan.

Menurutnya, aksi tersebut tidak selalu dilakukan oleh satu orang. Dalam sejumlah kasus, pembobolan melibatkan komplotan yang bekerja sama untuk memindahkan dana hasil transaksi ke pihak lain.

Irvan menjelaskan, pelaku biasanya mengambil alih akses akun investor terlebih dahulu.

Setelah berhasil masuk, mereka menjual saham-saham yang memiliki fundamental atau kinerja baik.

Uang hasil penjualan tersebut kemudian digunakan untuk membeli saham lain yang kurang likuid.

Transaksi itu diduga menjadi bagian dari skema pemindahan dana antarpihak dalam komplotan.

“Pembobolan akun nasabah yang mengakibatkan saham nasabah dijual, uangnya dipakai untuk membeli saham lain di mana ini sifatnya adalah komplotan, bukan individual,” paparnya.

Modus tersebut membuat investor berpotensi mengalami kerugian karena saham dalam portofolionya dapat berpindah tanpa persetujuan.

Sementara itu, transaksi pembelian saham lain membuat aliran dana semakin sulit ditelusuri.

BEI pun meminta investor tidak menganggap remeh keamanan akun perdagangan saham, termasuk perangkat elektronik yang digunakan untuk mengakses aplikasi sekuritas.

Menurut Irvan, salah satu penyebab pembobolan akun adalah kelalaian investor dalam menjaga informasi akses.

Penggunaan kata sandi yang mudah ditebak atau tidak pernah diperbarui dapat membuka peluang bagi pelaku untuk mengambil alih akun.

Selain itu, membagikan password kepada orang lain juga meningkatkan risiko penyalahgunaan.

Orang yang diberi akses tidak selalu berasal dari lingkungan yang jauh. Dalam beberapa kasus, investor justru membagikan kata sandi kepada orang terdekat, seperti asisten pribadi, sekretaris, pacar, hingga pasangan.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

OPINI

Pencemaran Nama Baik, Fitnah, dan Pelanggaran UU ITE

Oleh Redaksi · 8 Nov, 13.25 WIB

Oleh: Sugiyono((Anggota Associate Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef); Pengajar Universitas Mercu Buana))

AKSA Penuntut Umum mendakwa Roy Suryo Notodipuro dan Tifauzia Tyassuma dengan UU KUHP Nomor 1 Tahun 2023 dan UU ITE.

Delik aduan resmi Joko Widodo tersebut adalah tentang pencemaran nama baik, fitnah, dan pelanggaran UU ITE terkait tuduhan ijazah palsu.

Terdakwa diduga melakukan pencemaran nama baik melalui tulisan/media, namun terdakwa gagal membuktikan tuduhannya saat diberikan kesempatan, sehingga dapat dikategorikan sebagai dakwaan primer pelanggaran UU KUHP Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 434 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1).

Juga terhadap pencemaran nama baik secara tertulis atau melalui sarana media/gambar yang menyerang kehormatan seseorang di muka umum, sebagai dakwaan subsider yang melanggar Pasal 433 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1).

Pasal 433 ayat (1) mengatur tentang setiap orang yang dengan kesadaran dan kehendak penuh menyerang reputasi korban (Joko Widodo).

Terdakwa hendak dibuktikan telah merendahkan martabat, harga diri, atau reputasi korban.

Terdakwa melakukan atau menyebarkan tuduhan dengan niat yang jelas agar didengar, dibaca, atau diketahui oleh orang banyak, misalnya di ruang publik atau melalui media sosial.

Tenggat waktu pengajuan aduan adalah 6 bulan sejak korban mengetahui adanya perbuatan terdakwa.

Terdakwa juga didakwa melanggar UU Nomor 11 Tahun 2023 tentang ITE, khususnya Pasal 32 juncto Pasal 48 ayat (1) juncto UU Nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Gibran Dimakzulkan, Prabowo Subianto Lepas Bayang-bayang Jokowi

Oleh Redaksi · 9 Nov, 11.15 WIB



Gambar menunjukkan Prabowo Subianto di sisi kiri mengenakan jas biru tua dan Gibran Rakabuming Raka di sisi kanan mengenakan jas hitam. Keduanya memakai peci hitam dan lencana resmi pada pakaian mereka dengan latar belakang gelap yang samar. Tatapan mereka lurus ke depan dengan ekspresi wajah yang serius dan formal. FOTO/Net.

BANDA ACEH - Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai berpotensi mengubah peta kekuatan Politik nasional sekaligus membuka ruang bagi Presiden Prabowo Subianto untuk melepaskan diri dari bayang-bayang mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, menilai, masa depan politik Gibran tidak hanya berkaitan dengan persoalan hukum dan konstitusi, tetapi juga menyangkut kalkulasi kekuasaan, kepentingan partai politik di parlemen, serta konfigurasi politik menjelang Pilpres 2029.

Menurut Arifki, apabila Gibran kehilangan jabatan wakil presiden, Prabowo berpotensi memiliki ruang konsolidasi politik yang lebih leluasa.

Kondisi tersebut sekaligus dapat mengurangi irisan kepentingan politik dengan Jokowi yang selama ini memiliki modal elektoral dan jaringan politik tersendiri.

"Jika Gibran keluar dari pemerintahan, Prabowo berpeluang mengurangi bayang-bayang politik Jokowi. Ini bisa menjadi momentum bagi Prabowo untuk membangun komunikasi yang lebih luas dengan berbagai kekuatan politik, termasuk tokoh-tokoh senior seperti SBY dan Megawati, maupun para ketua umum partai politik untuk mempersiapkan konfigurasi politik 2029," ujar Arifki kepada wartawan, Senin, 9 November 2026.

Meski demikian, keluarnya Gibran dari pemerintahan juga memiliki konsekuensi politik bagi Prabowo.

Sebab, selama ini polemik seputar Gibran menjadi salah satu isu yang menyerap perhatian kelompok kritis terhadap pemerintah.

Jika Gibran tidak lagi berada dalam pemerintahan, sasaran kritik politik berpotensi bergeser lebih langsung kepada Prabowo.

"Secara politik, Gibran ini bisa disebut sebagai samsak politik yang mahal bagi pemerintahan Prabowo. Banyak energi kritik dari masyarakat sipil maupun kelompok politik seperti PDIP, PKS, dan Demokrat terserap pada persoalan Gibran. Ketika Gibran tidak lagi berada di pemerintahan, bukan tidak mungkin tekanan politik justru akan lebih langsung diarahkan kepada Prabowo," katanya.

Di sisi lain, partai-partai politik di parlemen juga memiliki kalkulasi tersendiri terhadap posisi Gibran.

Arifki melihat putra Jokowi tersebut berpotensi menjadi salah satu kompetitor dalam kontestasi politik 2029.

Selain faktor usia yang relatif muda, Gibran juga memiliki popularitas serta membawa nama besar Jokowi yang masih menjadi bagian dari dinamika politik nasional.

"Partai-partai tentu memiliki perhitungan politik terhadap posisi Gibran. Mereka tidak ingin Gibran justru mendapatkan keuntungan politik dari sebuah krisis. Apalagi jika situasi tersebut membuat popularitas dan ruang manuver politiknya semakin besar menjelang 2029.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Raja Juli dan Giring Mendadak Mundur dari PSI, Ini Sebabnya

Oleh Redaksi · 9 Nov, 20.01 WIB



Gambar ini menampilkan kolase dua pria Indonesia, Giring Ganesha di sebelah kiri dan Raja Juli Antoni di sebelah kanan. Keduanya mengenakan jaket merah resmi tim nasional Indonesia

BANDA ACEH - Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha Djumaryo mundur dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Raja Juli di PSI menjabat Sekretaris Jenderal. Sementara Giring sebatas anggota partai.

"Hari ini saya sudah menyampaikan Surat Pengunduran Diri saya dan berkomunikasi langsung dengan Ketua Umum DPP PSI, Mas Kaesang Pangarep," kata Raja Juli dalam keterangan tertulisnya, Senin, 9 November 2026.

Raja Juli menjelaskan, langkah mundur dari jajaran pengurus partai tersebut diambil agar ia dapat mendedikasikan seluruh waktunya untuk mengawal program-program prioritas pemerintah di sektor kehutanan.

"Intinya saya mundur sebagai Sekjen DPP PSI dan segala aktivitas partai. Alasannya hanya satu. Saya ingin 'full time' dan konsentrasi penuh membantu Bapak Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Kehutanan," ujar Raja Juli.

Sementara Giring mengungkapkan, cita-citanya ketika pertama kali terjun ke dunia Politik sederhana, yaitu menjadi pelayan publik yang bisa membawa perbaikan nyata bagi Indonesia tercinta.

Ia masih ingat momen di bulan September 2024, di mana Presiden Prabowo Subianto menelepon dan mengajaknya berjuang bersama di dalam pemerintahan.

"Tanpa ragu saya menjawab, 'Siap Bapak Prabowo, Siap Bapak Presiden'," kata Giring.

Dua tahun mengabdi di Kabinet Merah Putih, lanjutnya, Giring semakin memahami besarnya tanggung jawab melayani bangsa dan negara sekaligus memperkuat tekad saya untuk terus memberikan yang terbaik bagi Indonesia tercinta.

"Namun dalam perjalanan berpartai, saya merasa ada hal-hal yang sudah tidak lagi sejalan dengan apa saya perjuangkan sejak awal. Setelah melalui pertimbangan pribadi, yang matang, minggu lalu saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari keanggotaan Partai Solidaritas Indonesia," demikian Giring.

BISNIS

KAMAKSI Desak Dirut KAI Bobby Rasyidin Mundur

Oleh Redaksi · 8 Nov, 09.15 WIB

BANDA ACEH -Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap dugaan korupsi pengadaan proyek digitalisasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) kembali menjadi sorotan publik. Terbaru, KPK menyita uang senilai Rp2 miliar dari Bobby Rasyidin, yang saat ini menjabat sebagai Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero).

Penyitaan tersebut dikonfirmasi Juru Bicara KPK Budi Prasetyo pada Jumat 6 November 2026. Bobby diketahui pernah diperiksa sebagai saksi dalam perkara tersebut ketika menjabat Direktur Utama PT Len Industri (Persero) periode 2021–2025.

Perkembangan ini memunculkan perhatian serius terhadap aspek transparansi, integritas, dan akuntabilitas pengelolaan perusahaan milik negara, terlebih karena Bobby saat ini menduduki posisi strategis sebagai pimpinan perusahaan transportasi publik nasional.

Ketua Umum DPP Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI), Joko Priyoski, mendesak Bobby Rasyidin bertanggung jawab moral dan kelembagaan dengan mengundurkan diri dari jabatan Direktur Utama KAI.

Menurut Joko, penyitaan uang Rp2 miliar oleh KPK merupakan perkembangan hukum serius yang tidak boleh dipandang sebagai persoalan biasa. Pimpinan BUMN harus memiliki kepekaan terhadap persoalan integritas, kepercayaan publik, dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance).

"Kami mendesak Bobby Rasyidin mundur secara legowo dari jabatan Direktur Utama KAI. Ini bukan semata-mata persoalan jabatan, melainkan menyangkut tanggung jawab moral, integritas kepemimpinan, dan kepercayaan publik terhadap perusahaan negara," kata Joko melalui keterangan tertulis, dikutip Minggu 8 November 2026.

Ia menambahkan, KAI merupakan BUMN strategis yang mengemban mandat pelayanan transportasi masyarakat. Karena itu, kepemimpinannya harus terbebas dari persoalan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, keraguan publik, maupun gangguan terhadap kredibilitas institusi.

"Jangan sampai persoalan hukum yang sedang didalami KPK justru menjadi beban bagi institusi KAI," kata Joko.

KAMAKSI juga meminta KPK mengusut secara menyeluruh asal-usul uang Rp2 miliar yang disita, tujuan pemberian, pihak-pihak yang berkaitan, serta kemungkinan adanya aliran dana kepada pihak lain.

Berdasarkan perkembangan penyidikan, perkara digitalisasi SPBU diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp322,18 miliar berdasarkan penghitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kerugian tersebut terdiri atas pengadaan perangkat Automatic Tank Gauge (ATG) sebesar Rp193,75 miliar dan pengadaan perangkat Electronic Data Capture (EDC) sebesar Rp128,42 miliar.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Mengejutkan, Tiba-tiba Raja Juli Antoni Mundur dari PSI

Oleh Redaksi · 9 Nov, 19.58 WIB



Menteri Kehutanaan (Menhut) Raja Juli Antoni. FOTO/Net.

BANDA ACEH - Menteri Kehutanaan (Menhut) Raja Juli Antoni mundur dari kepengurusan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Keputusan itu telah disampaikan langsung Raja Juli kepada Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep.

"Hari ini saya sudah menyampaikan Surat Pengunduran Diri saya dan berkomunikasi langsung dengan Ketua Umum DPP PSI, Mas Kaesang Pangarep. Intinya saya mundur sebagai Sekjen DPP PSI dan segala aktivitas partai," ujar Raja Juli dalam keterangannya, Senin (9/11/2026).

Raja Juli mengungkapkan alasan mundur dari PSI. Dia mengaku ingin fokus bekerja di pemerintahan.

"Alasannya hanya satu. Saya ingin 'full time' dan konsentrasi penuh membantu Bapak Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Kehutanan," ujar Raja Juli.

"Banyak perintah Bapak Presiden Prabowo dalam pembangunan sektor kehutanan seperti merehabilitasi hutan, restorasi ekosistem dan menjaga biodiversiti kita terutama pasca Karhutla," imbuhnya.

Raja Juli mengatakan Kaesang menerima alasan pengunduran dirinya.

"Ketua Umum, Mas Kaesang Pangarep, bisa memahami dan menerima pengunduran diri saya dan berpesan agar saya bekerja lebih keras lagi mengabdi kepada negara yang kita cintai bersama," pungkasnya.

NASIONAL

Pengamat: Citra Polri Rusak Ulah Listyo Sigit Prabowo

Oleh Redaksi · 9 Nov, 11.07 WIB



BANDA ACEH - Kepala Kepolisian RI (Kapolri), Jenderal Suyudi Ario Seto tengah memperbaiki citra Kepolisian RI. Namun usaha tersebut dirusak oleh mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) karena melakukan penyadapan illegal kepada Presiden Prabowo Subianto.

Demikian disampaikan pakar ekonomi Politik Ichsanuddin Noorsy, Jakarta, Senin (9/11/2026).

“Dalam bahasa yang sederhana sesungguhnya, ketika Listyo melakukan seperti ini, Listyo telah menjadi beban kepolisian. Listyo telah menggerogoti kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian. Dan untuk menumbuhkembangkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap polisi tidaklah mudah,” ucap Noorsy.

Sebelumnya citra Polri juga dihantam dengan kasus Sukoharjo. Walaupun Mabes Polri sudah bertindak cepat untuk mengganti Kapolres dan meminta maaf kepada masyarakat, namun belum serta merta menyurutkan kekecewaan masyarakat.

“Nah penyalahgunaan wewenang Listyo ini menambah kekecewaan masyarakat. Berarti betul berarti Listyo punya kepentingan politik. Kepentingan politik tidak mungkin tanpa motivasi. Motivasi tidak mungkin tanpa visi misi. Nah gitu ngukurnya,” jelasnya.

Oleh karena itu, pria yang pernah mengajar di Sespimti Polri itu meminta aparat penegak hukum untuk membongkar tuntas kasus penyadapan illegal itu sehingga citra Polri kembali membaik di mata masyarakat.

“Orang tahu bahwa Listyo bagian dari Geng Solo. Ketika kita tahu dari Geng Solo, maka pertanyaan besarnya menjadi begini. Sebenarnya visi misinya Geng Solo ngapain dengan menugaskan Listyo kayak gitu? Itu yang harus dibongkar,” tegasnya.

Di internal Polri, Noorsy menyebut terdapat tiga kelompok polisi dengan berbagai kepentingan dan tujuan.

“Ada polisi putih, polisi yang memperkaya diri, dan polisi yang tidak peduli dengan apapun, yang penting dia mendapatkan jabatan dengan begitu cepat. Polisi putih adalah polisi yang menegakkan citra polisi dalam hal ini yang kata Suyudi sekarang, polisi yang bersih itu, polisi yang dipercayai masyarakat,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto menerima mantan Kapolri yang pernah memimpin institusi kepolisian sejak era reformasi hingga 2019.

Adapun mantan Kapolri yang diterima Presiden Prabowo Subianto adalah Jenderal Polisi (Purn) Roesmanhadi, Jenderal Polisi (Purn) Roesdihardjo, Jenderal Polisi (Purn) Surojo Bimantoro, Jenderal Polisi (Purn) Da'i Bachtiar, Jenderal Polisi (Purn) Sutanto, Jenderal Polisi (Purn) Bambang Hendarso Danuri, Jenderal Polisi (Purn) Timur Pradopo, Jenderal Polisi (Purn) Sutarman, Jenderal Polisi (Purn) Badrodin Haiti, dan Jenderal Polisi (Purn) Tito Karnavian.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

LINGKUNGAN

Belum Pulih Hampir Setahun, SMKN 1 Badiri Masih Belajar di Tenda Setelah Banjir Sumatera

Oleh Van · 8 Nov, 15.16 WIB

TAPANULI TENGAH — Kondisi SMKN 1 Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, kembali menjadi sorotan menjelang setahun bencana banjir yang melanda wilayah tersebut pada November 2025.

Sorotan itu muncul setelah akun Threads @thesecretttttt12 mengunggah kondisi sekolah pada Sabtu, 7 November 2026. Unggahan tersebut menyebut bangunan sekolah masih belum pulih.

"SMK N 1 Badiri Tapanuli. Salah satu wilayah terdampak banjir Sumatera yg hingga detik ini masih belum pulih. Mereka sekolah masih dengan dinding & atap yg kalau diguyur hujan air masih tetap akan masuk," tulis akun tersebut.

SMKN 1 Badiri menjadi salah satu satuan pendidikan yang terdampak bencana di Sumatera Utara. Kondisi sekolah dan kelanjutan kegiatan belajar mengajar menjadi perhatian setelah kerusakan bangunan akibat bencana.

SMKN 1 Badiri Sempat Lumpuh Setelah Banjir

Dalam laporan pada Jumat, 23 Januari 2026, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Sumatera Utara menyebut aktivitas pendidikan di sekolah tersebut masih lumpuh total.

Bangunan sekolah tertimbun tanah akibat bencana sehingga kegiatan belajar tatap muka tidak dapat dilaksanakan. Sebanyak 646 siswa saat itu menjalani pembelajaran jarak jauh.

Dari lima bangunan yang dimiliki sekolah, hanya satu bangunan yang tersisa. Namun, fasilitas tersebut tidak mampu menampung seluruh kegiatan pembelajaran.

BPMP Sumatera Utara menyalurkan bantuan perlengkapan sekolah atau school kits serta bantuan operasional kebersihan melalui program Satuan Pendidikan Aman Bencana.

Kepala SMKN 1 Badiri, Julpiner Simanungkalit, saat itu merekomendasikan relokasi sekolah ke lokasi yang lebih aman demi keselamatan siswa dan tenaga pendidik.

Pemerintah Janjikan Pemulihan Sekolah Terdampak

Kemendikdasmen menyatakan terus mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi satuan pendidikan terdampak bencana di Sumatera melalui siaran pers pada Kamis, 18 Juni 2026.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menegaskan, "Tidak boleh ada anak Indonesia yang kehilangan hak belajarnya karena terdampak bencana."

Kemendikdasmen mencatat 4.922 satuan pendidikan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terdampak bencana berdasarkan data per 9 Juni 2026.

Dari jumlah tersebut, 35 sekolah masih menggunakan tenda dan 52 sekolah memanfaatkan ruang kelas darurat. Pemerintah menargetkan tidak ada lagi sekolah yang belajar di tenda pada tahun ajaran baru Juli 2026.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Tito Karnavian Bantah Dicekal dan Rumahnya Jadi Tempat Kumpul Listyo Cs

Oleh Redaksi · 9 Nov, 22.07 WIB



BANDA ACEH - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian membantah dirinya mendapat surat pencekalan ke luar negeri.Kabar tersebut dikonfirmasi Tito buntut adanya kabar yang menyebut dirinya dicekal karena

tengah penyidikan kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden RI Prabowo Subianto yang menyeret mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

Hoaks Munaslub Golkar Diduga Digerakkan Kader Internal, Doli Sudah Kantongi Inisial

“Saya di sini, ke mana? Enggak ada (surat pencekalan),” kata Tito kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).

Tito menyebut banyak informasi tidak benar yang beredar di media sosial, termasuk kabar mengenai pertemuan dengan Listyo cs di rumahnya.

“Ada banyak, terlalu banyak hoaksnya. Ada yang bilang lagi bahwa apa, katanya kumpul di rumahnya Tito Karnavian di Widya Chandra 4. Rumah saya kan Widya Chandra 1. Bukan 4, gitu,” ujarnya.

Giring dan Raja Juli Cabut dari PSI, Prabowo Didesak Sekalian Tendang dari Kabinet

“Hoaks ya. Makasih,” ucapnya menambahkan.

Tito menjelaskan dirinya sudah tidak lagi terlibat dalam urusan kepolisian sejak pensiun pada 2019. Saat ini, ia fokus menjalankan tugas sebagai Mendagri.

“Saya dari tahun 2019, saya sudah pensiun, baik dari polisi maupun dari Kapolri. Dan saya enggak pernah ikut urusan polisi. Tugas saya, saya mendapat tugas kepercayaan sebagai Mendagri, saya jalankan dengan sebaik-baiknya. Dan itu pun sudah menyita waktu saya luar biasa, ya. Kegiatannya banyak sekali,” paparnya.

NASIONAL

Ada Agenda Politik di Balik Penyadapan Presiden

Oleh Redaksi · 9 Nov, 10.07 WIB



BANDA ACEH -Kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan lingkungan Istana bukan sekadar tindakan biasa, melainkan bagian dari agenda kelompok tertentu untuk merebut kekuasaan.

Anggota Komisi III DPR RI, Benny K Harman, meyakini dugaan penyadapan yang melibatkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama sejumlah jenderal Polri merupakan langkah awal dari upaya menggoyang kekuasaan yang sah.

Menurut Benny, penyelidikan dan penyidikan harus dilakukan secara transparan dan akuntabel agar seluruh fakta di balik kasus tersebut terungkap.

"Ini akan terungkap jika Mabes Polri melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus ini secara transparan dan akuntabel," tegasnya lewat akun X, Senin, 9 November 2026.

Karena itu, dia mendesak Mabes Polri berani mengusut tuntas kasus tersebut, termasuk mengungkap siapa dalang di baliknya, motif, hingga target akhir tindakan penyadapan.

"Itu sebabnya saya meminta Mabes Polri harus usut tuntas kasus ini, siapa dalangnya, apa motifnya, dan target akhirnya apa," tandasnya

NASIONAL

Jangan Buru-buru Simpulkan Jokowi Aktor Penyadapan

Oleh Redaksi · 9 Nov, 11.13 WIB



BANDA ACEH - Direktur Pusat Riset Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam meminta penyidik Bareskrim Polri mengusut tuntas dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara. Menurutnya, pengungkapan perkara tidak boleh berhenti pada pelaku teknis, tetapi harus menelusuri siapa yang memerintahkan dan berkepentingan di balik operasi tersebut.

Saiful mengingatkan agar publik tidak terburu-buru menyimpulkan Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi sebagai aktor utama penyadapan. Namun, kemungkinan keterlibatan Jokowi juga tidak boleh ditutup begitu saja sebelum seluruh fakta terungkap.

"Jadi, posisi saya jelas, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa aktor penyadapan adalah Jokowi, tetapi jangan pula menutup kemungkinan tersebut sebelum seluruh fakta diperiksa. Semua pihak yang memiliki keterkaitan harus terbuka terhadap proses pengungkapan yang objektif dan berdasarkan bukti," kata Saiful kepada RMOL, Senin, 9 November 2026.

Menurut Saiful, dalam perkara yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) dan sejumlah pihak lainnya, pertanyaan paling mendasar bukan sekadar siapa yang melakukan penyadapan, melainkan siapa yang memberikan perintah, siapa yang berkepentingan, dan untuk tujuan apa penyadapan dilakukan.

Ia menilai, penyidik harus mengungkap motif penyadapan, apakah berkaitan dengan penegakan hukum, kepentingan intelijen negara, agenda politik, atau justru kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.

"Apabila penyadapan dilakukan berdasarkan kewenangan yang sah, dengan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan dan tujuan yang dibenarkan hukum, tentu penilaiannya akan berbeda dengan penyadapan yang dilakukan secara ilegal untuk mengawasi, menekan, mengendalikan, atau menjatuhkan pihak tertentu," ujarnya.

Saiful menegaskan, nama seseorang yang muncul dalam analisis politik tidak otomatis menjadikannya sebagai pihak yang terlibat, apalagi sebagai pemberi perintah. Sebaliknya, tidak boleh ada pihak yang dikecualikan dari pemeriksaan hanya karena memiliki posisi, pengaruh, atau kedekatan dengan kekuasaan.

"Keterbukaan terhadap kemungkinan bukan berarti membenarkan tuduhan tanpa bukti. Nama seseorang yang muncul dalam analisis politik tidak otomatis menjadikannya sebagai pihak yang terlibat, apalagi sebagai pihak yang memberikan perintah. Sebaliknya, tidak boleh pula ada pihak yang secara otomatis dikecualikan dari pemeriksaan hanya karena memiliki posisi, pengaruh, atau kedekatan dengan kekuasaan," tegasnya.

Lebih jauh, Saiful mengingatkan bahwa pelaksana penyadapan di lapangan belum tentu merupakan pihak yang memiliki kepentingan terbesar terhadap hasil operasi.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Megawati: Saya Tak Punya HP karena Saya Disadap

Oleh Redaksi · 9 Nov, 16.27 WIB



BANDA ACEH - - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Sukarnoputri kembali menegaskan dirinya tidak memiliki handphone (HP). Pernyataan itu disampaikan di tengah mencuatnya kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto hingga sejumlah ketua umum partai Politik yang menyeret nama mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

"Waktu saya bilang, ini, ini kan banyak yang nanya, oh saya enggak punya, ini, ibu kan enggak punya HP," kata Megawati saat berpidato dalam acara Pekan Peduli Sampah Nasional (PPSN) 2026 di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Senin (9/11/2026).

"Saya memang enggak punya HP, memang gak punya aku," lanjutnya.

Presiden kelima RI itu kemudian menjelaskan alasan dirinya tidak memiliki handphone. Megawati mengaku mengetahui bahwa dirinya menjadi target penyadapan.

"Kenapa? Saya kan bilang, oh ini viral lagi toh. Bilangnya lho karena saya orang yang disadap. Nah buktinya? Ayo," ujarnya.

Diketahui, Bareskrim Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Mereka yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Tiga tersangka, yakni Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi Santoso, telah ditahan di Rutan Mako Brimob. Sementara itu, Slamet Uliandi belum ditahan.

Asep Safrudin mengungkapkan, dugaan penyadapan ilegal tersebut berlangsung pada periode 2025-2026. Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.

"Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa prosedur seperti diatur dalam tata cara penyadapan Polri di Perkap Nomor 5 Tahun 2010," ucap Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin.

Selain Prabowo, dugaan penyadapan tersebut juga menyasar sejumlah pihak lain, mulai dari elite partai politik, aktivis, hingga media

EKONOMI

Bank Aceh Syariah Cetak Laba Rp373,62 Miliar per September 2026, Didorong Efisiensi dan Penguatan Dana Murah

Oleh Redaksi · 8 Nov, 09.00 WIB

BANDA ACEH - Kinerja keuangan Bank Aceh terus menunjukkan tren positif sepanjang tahun 2026.

Hingga periode September 2026, bank plat merah kebanggaan masyarakat Aceh ini berhasil membukukan laba sebelum pajak sebesar Rp373,62 miliar.

Angka ini tercatat naik 1,38 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp368,53 miliar.

Berdasarkan laporan publikasi resmi Bank Aceh Syariah, pertumbuhan laba tersebut utamanya didorong oleh penerapan efisiensi operasional yang disiplin serta penguatan signifikan pada penghimpunan dana murah (Current Account Savings Account/CASA).

Hingga kuartal III 2026, dana murah bank ini tumbuh pesat sebesar 33,95 persen menjadi Rp21,96 triliun.

Efisiensi operasional tercermin jelas dari penurunan beban operasional lainnya sebesar 3,48 persen menjadi Rp1,04 triliun dari sebelumnya Rp1,08 triliun.

Selain itu, beban bagi hasil untuk pemilik dana investasi juga tercatat turun tajam sebesar 40,92 persen menjadi Rp218,44 miliar.

Penurunan beban ini secara langsung berkontribusi dalam menjaga margin keuntungan, sehingga pendapatan bank setelah distribusi bagi hasil tetap solid di angka Rp1,42 triliun.

Dari sisi fungsi intermediasi, Bank Aceh Syariah mencatatkan pertumbuhan penyaluran pembiayaan sebesar 6,82 persen menjadi Rp21,99 triliun.

Sejalan dengan ekspansi bisnis tersebut, total aset bank juga tumbuh 4,27 persen menjadi Rp32,35 triliun.

Kualitas aset tetap terjaga dengan sangat baik. Rasio pembiayaan bermasalah (Non-Performing Financing/NPF) gross berhasil dipertahankan di level 2,67 persen, sementara NPF net berada di angka 1,26 persen.

Kedua rasio ini masih jauh di bawah batas aman 5 persen yang ditetapkan oleh regulator, yang mengindikasikan bahwa kualitas pembiayaan bank tetap terkendali.

Kesehatan perbankan juga ditopang oleh fondasi permodalan yang kuat. Modal inti Bank Aceh Syariah tumbuh 20,14 persen menjadi Rp3,96 triliun.

Penguatan ini mendorong rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) meningkat menjadi 20,88 persen dari sebelumnya 20,26 persen.

Dari aspek rentabilitas, kemampuan bank dalam menghasilkan laba menunjukkan kinerja yang stabil dan produktif.

Return on Assets (ROA) tercatat di level 1,66 persen, sementara Return on Equity (ROE) mengalami peningkatan menjadi 11,69 persen dari 11,66 persen pada periode sebelumnya.

Dengan fondasi kinerja keuangan yang solid selama sembilan bulan pertama tahun 2026 ini, Bank Aceh Syariah memiliki modal strategis untuk terus …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Politisi Senior Panda Nababan Meninggal Dunia

Oleh Redaksi · 9 Nov, 10.47 WIB



BANDA ACEH - Politisi dan juga jurnalis seniorPanda Nababanmeninggal dunia pada Senin (9/11/2026). Kabar duka tersebut turut disampaikan pegiat media sosial Palti Hutabarat melalui akun X miliknya.

Dalam unggahannya, Palti menyebut Panda Nababan meninggal dunia setelah berjuang melawan penyakit leukemia. Dia juga menyampaikan bahwa Panda mengembuskan napas terakhir pada pukul 09.37 WIB.

"Dengan ini kami sampaikan, paman kami Bapak Panda Nababan baru saja wafat pada pk 9.37 lalu setelah berjuang melawan leukemia," tulis Palti.

Kabar duka tersebut juga dibenarkan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDIP, Yoseph Aryo Adhi Dharmo saat dikonfirmasi wartawan. "Iya benar," ucap Adhi.

"Mohon doanya bagi Beliau dan keluarga yang ditinggalkan," ujarnya.

Panda Nababan dikenal sebagai politisi PDI Perjuangan (PDIP) sekaligus wartawan senior.

Dia pernah menjadi anggota DPR dan dikenal sebagai salah satu tokoh yang cukup lama berkecimpung dalam dunia jurnalistik dan Politik Indonesia

NASIONAL

MA Batalkan Suket Pendidikan Gibran, PDIP dan PAN Kompak Singgung Desakan Mundur

Oleh Redaksi · 9 Nov, 08.31 WIB



Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. FOTO/Net.

BANDA ACEH - Desakan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya semakin menguat setelah Mahkamah Agung (MA) menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA yang digunakannya untuk mendaftar sebagai calon wakil presiden tidak sah dan batal demi hukum.

Putusan tersebut tertuang dalam Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026.

Dalam putusan itu, MA menyatakan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 tidak sah dan batal demi hukum.

Sejumlah tokoh Politik turut menyoroti putusan tersebut. Bahkan, muncul desakan agar Gibran secara sukarela mengundurkan diri hingga wacana penggunaan mekanisme politik di DPR untuk menindaklanjutinya.

Hasto Sebut Legitimasi Kepemimpinan Gibran Cacat

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menilai Gibran telah kehilangan legitimasi moral maupun konstitusional sebagai pemimpin nasional.

Menurut Hasto, ada tiga catatan mendasar yang menjadi pijakan sikap PDIP dalam memandang persoalan legitimasi kepemimpinan putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut.

"Bagi PDI Perjuangan, sejak awal kami sudah memberikan tiga catatan penting. Yang pertama, lahirnya Putusan MK Nomor 90 Tahun 2023 sebagai bentuk akrobat hukum," ujar Hasto di Kota Blitar, Jawa Timur, Jumat (7/11/2026).

Catatan kedua, lanjut Hasto, berkaitan dengan dinamika penyelenggaraan Pemilu 2024, mulai dari pemilihan presiden, pemilihan legislatif, hingga pilkada yang dinilai banyak diwarnai intervensi aparat serta penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power.

Sementara itu, catatan ketiga menyangkut dugaan rekayasa regulasi teknis pemilu terkait pemenuhan syarat minimal pendidikan.

"Kemudian yang ketiga, munculnya pasal selundupan untuk melakukan pemaksaan ketika Saudara Gibran Rakabuming tidak bisa menunjukkan ijazah SMA atau sederajat, sebagaimana temuan dari Mahkamah Konstitusi," ujarnya.

Berdasarkan tiga catatan tersebut, Hasto menyimpulkan bahwa status kepemimpinan Gibran sudah bermasalah sejak proses pencalonan.

"Dari tiga aspek ini saja, maka otomatis yang bersangkutan sudah tidak memiliki legitimasi sebagai sosok pemimpin. Tidak hanya proses dari Saudara Gibran yang cacat, tetapi juga syarat-syarat untuk menjadi pemimpin, baik dari aspek usia maupun ijazah, ternyata kan tidak dipenuhi," tegas Hasto.

Hasto juga mengungkapkan bahwa PDIP terus menjalin dialog politik dengan fraksi-fraksi lain di DPR RI.

Menurutnya, parlemen perlu mengambil langkah politik konkret untuk merespons persoalan tersebut.

"Karena itulah ketika ini harus dilanjutkan ke proses politik, PDI Perjuangan juga berdialog dengan fraksi-fraksi yang ada di DPR …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Rapat Khusus dengan Polri : Komisi III Ingin Bongkar Dalang Penyadapan Prabowo

Oleh Redaksi · 9 Nov, 16.04 WIB



BANDA ACEH -Komisi III DPR akan segera menggelar rapat bersama Polri untuk membahas kelanjutan kasus penyadapan ilegal yang menyeret nama mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo bersama sejumlah perwira tinggi Polri sebagai tersangka.

"Kita sudah berkoordinasi dengan Mabes Polri, kami akan menyelenggarakan rapat kerja khusus, terkait kejahatan serius penyadapan Kepala Negara," kata Ketua Komisi III DPR Habiburokhman kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin, 9 November 2026.

Adapun rapat khusus dijadwalkan antara Rabu 11 November atau Kamis 12 November 2026 mendatang.

"Yang menjadi isu utama adalah agar kasus ini diungkap dengan jelas apa motifnya dan siapa yang mengambil manfaat Politik terbesarnya siapa? Ya. Karena yang disadap adalah kepala negara, tokoh-tokoh bangsa, ketua-ketua umum partai," kata Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra ini.

Habiburokhman mengungkapkan bahwa Komisi III DPR berharap para terduga pelaku penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh nasional hingga masyarakat sipil tersebut jangan hanya dijerat UU ITE.

Atas dasar itu, Habiburokhman mendesak agar kasus penyadapan ilegal tersebut diusut tuntas tidak hanya berhenti pada Listyo Sigit. Sebab, ia meyakini masih ada pihak-pihak lain yang terlibat dan diuntungkan dari hasil penyadapan ilegal ini.

"Karena itu, pasti ada pihak, ya, pastinya dalam konteks politik, ada pihak, sosok besar yang apa namanya, menikmati atau mengambil manfaat dari penyadapan ilegal ini," kata Habiburokhman.

"Nah, ini harus bisa dibongkar, ya, oleh penyidik nantinya. Jadi, pasalnya dikenakan adalah, kita minta, pasal makar dan pasal-pasal terkait keamanan negara, ya. Harus didorong ke sana," demikian Habiburokhman

EKONOMI

APKLI Merah Putih: Penyadapan Presiden Prabowo Biang Kerok Ekonomi Tidak Stabil

Oleh Redaksi · 8 Nov, 13.37 WIB



BANDA ACEH -Roda ekonomi Usaha Kecil Menengah Pedagang Kaki Lima (UKM PKL) membutuhkan stabilitas nasional yang kokoh, demikian juga ekonomi Indonesia.

Namun faktanya, selama dua tahun terakhir terjadi pasang surut gelombang ekonomi rakyat kecil. Bahkan omzet dan pendapatan UKM PKL menurun di semua kawasan ekonomi strategis dan sentra ekonomi rakyat.

Demikian dikatakan Ketua Umum Dewan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Usaha Kecil, Mikro, Dan Pedagang Kaki Lima Indonesia Merah Putih (DPP APKLI MP), Ali Mahsun usai melantik kepengurusan DPP APKLI MP periode 2026-2031 di Gedung Joeang 45, Menteng, Jakarta, Minggu 8 November 2026.

Ali melihat bahwa kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang dilakukan Listyo Sigit Prabowo cs merupakan dalang nyaris terpuruknya ekonomi Indonesia

"Untuk itu para pelaku penyadapan harus diusut tuntas, dan dihukum mati, kenapa? Karena menjadi biang kerok ekonomi rakyat dan ekonomi nasional bergerak 'stagnan', tidak stabil.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Bahlil Dituding Terlibat Penyadapan Presiden, Golkar: Tidak Ada Main 2 Kaki dalam Politik

Oleh Redaksi · 9 Nov, 08.25 WIB



BANDA ACEH - Golkar menegaskan dukungannya kepada Ketua Umum Bahlil Lahadalia dalam memimpin partai. Semua kader bekerja tegak lurus, tidak boleh bersikap spukaltif atau bermain dua kaki.

Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga DPP Partai Golkar, Datuk H Said Aldi Al Idrus mengatakan, jajaran kader OKP Karya Kekaryaan Partai Golkar, termasuk AMPG satu suara mendukung Bahlil.

AMPG bersama OKP Karya Kekaryaan akan membentuk tim untuk menelusuri pihak-pihak yang menjadi biang kerok munculnya fitnah kepada Bahlil. Partai akan menjaga nama baik ketua umum.

"Di bawah kepemimpinan Ketum Bahlil Lahadalia,Pembinaan Pemuda dikelola dengan baik oleh Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP) Kekaryaan," kata Said, Senin (9/11).

Sebagai Ketua Umum AMPG, Said mengingatkan kepada kader muda agar tidak bertindak gegabah. Kader yang melanggar akan dikenakan sanksi tegas.

"Tidak ada di dalam Politik main dua atau tiga kaki. Saat ini, Ketum Bahlil Lahadalia harus sama sama kita kawal dalam kondisi normal atau tidak normal kalau ada kader yang main main akan kita sikat atau kita selesaikan secara adat," jelasnya.

Bahlil Tepis Isu Terlibat Penyadapan

Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Bahlil Lahadalia menepis kabar yang mengarahkan bahwa dirinya terlibat dalam kasus dugaan penyadapan atau ilegal akses terhadap Presiden Prabowo Subianto. Dia berniat melakukan somasi hingga menempuh jalur hukum atas beredarnya kabar tersebut.

Hal itu disampaikan oleh Bahlil saat menyampaikan sambutan dalam acara Pelantikan Pengurus DPD I Golkar Maluku pada Sabtu (7/11). Meski tidak menyebut nama, Bahlil menyebutkan bahwa ada senior berkacamata yang pintar bicara dalam siniar atau podcast.

”Senior saya yang merasa paling pintar bicara, sering pakai kacamata orangnya, di podcast, saya bilang kalau memang itu dinyatakan bahwa diduga saya (terlibat kasus dugaan penyadapan), buktikan. Kalau tidak, saya akan somasi. Kalau tidak, saya akan proses secara hukum,” ucap Bahlil.

Politisi yang juga menteri energi dan sumber daya mineral itu menyatakan bahwa kabar luas di media sosial itu berbahaya. Dia bahkan menyebut, tuduhan dirinya terlibat dalam penyadapan tersebut sama berbahayanya dengan ilegal akses yang terjadi.

”Apa maksudnya memberikan berita-berita yang kurang bagus? Membangun persepsi macam-macam itu. Nah, ini menurut saya nggak sehat,” sesalnya.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Sikapi Penyadapan Presiden Prabowo, 41 Kiai Sepuh Keluarkan 5 Seruan Kebangsaan

Oleh Redaksi · 9 Nov, 10.55 WIB



BANDA ACEH – Puluhan kiai sepuh dari berbagai pondok pesantren terkemuka berkumpul dalam musyawarah tertutup di Pondok Pesantren Bayt Al-Hikmah, Kota Pasuruan, Jawa Timur, Minggu (8/11/2026) sore.

Pertemuan 41 Kiai sepuh ini digelar khusus untuk menyikapi isu hangat terkait dugaan penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Musyawarah yang berlangsung khidmat selama kurang lebih tiga jam tersebut dihadiri oleh sejumlah ulama terkemuka, di antaranya KH Yahya Cholil Staquf, KH Ubaidullah Shodaqoh, KH Agoes Ali Masyhuri, KH Idris Hamid, serta KH Muhibbul Aman Aly.

Dari hasil pertemuan tersebut, para kiai sepuh mengeluarkan lima poin seruan kebangsaan yang secara khusus ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto dan jajaran penegak hukum.

Poin utama dari seruan tersebut adalah ketegasan sikap menolak segala bentuk pengkhianatan terhadap amanah negara, termasuk dugaan penyadapan ilegal terhadap kepala negara apabila terbukti secara hukum.

Para kiai sepuh mendorong Presiden Prabowo untuk mengambil tindakan tegas demi memulihkan kewibawaan serta keutuhan pemerintahan.

Selain itu, para ulama mendesak agar aparat penegak hukum segera mengusut tuntas perkara tersebut secara terbuka, profesional, dan berkeadilan tanpa membedakan jabatan maupun latar belakang pihak yang terlibat.

"Pertemuan ini sebagai bentuk seruan dan panduan moral untuk menjaga stabilitas serta wibawa negara," ujar Pengasuh Ponpes Raudlatul Ulum Kejayan, Pasuruan, KH Muhibbul Aman Aly, dalam keterangannya.

Senada dengan hal tersebut, Rais Syuriyah PWNU Jawa Tengah, KH Ubaidullah Shodaqoh, menekankan pentingnya sinergi antara masyarakat dan pemerintah agar tatanan bernegara tetap kuat menghadapi berbagai cobaan.

Dalam seruan kebangsaan kelima, para kyai juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk senantiasa menjaga persatuan, ketenteraman bangsa, serta tidak mudah terprovokasi oleh berbagai informasi yang belum teruji kebenarannya di tengah dinamika Politik saat ini.

Melalui langkah moral ini, para kiai sepuh berharap pemerintah dapat segera mengambil langkah konkret demi memastikan penegakan hukum berjalan adil serta stabilitas nasional tetap terjaga dengan baik

NASIONAL

Bongkar Tuh Siapa Penyelenggara Negara Penerima Suap Kasus 'Raja Nikel' Arif Kurniawan

Oleh Redaksi · 9 Nov, 08.15 WIB



BANDA ACEH - Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah mengusut dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) periode 2013–2025.

Dalam penyidikan tersebut, penyidik mendalami dugaan aliran suap dari sejumlah perusahaan tambang nikel kepada oknum pejabat atau penyelenggara negara untuk memuluskan pengurusan perizinan, proses produksi hingga tata niaga penjualan nikel.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Saiful Bahri Siregar, mengungkapkan bahwa pemberian suap tersebut diduga dilakukan perusahaan-perusahaan tambang untuk mempermudah berbagai proses administrasi pertambangan.

"Dalam proses-proses pengelolaan pertambangan, perusahaan-perusahaan ini telah melakukan pemberian sesuatu untuk mempermudah segala proses administrasi berupa suap kepada penyelenggara negara," ujar Saiful Bahri, dikutip Senin (9/11/2026).

Menurut Saiful, dugaan pemberian kepada penyelenggara negara tersebut berkaitan dengan kewenangan pejabat dalam proses penerbitan izin pertambangan, pengaturan produksi, hingga pengawasan penjualan nikel.

"Kemudian terkait dengan adanya pemberian-pemberian kepada penyelenggara negara, tentunya dalam proses pengelolaan tambang nikel, tentunya dalam proses-proses itu ada kaitan dengan penyelenggara negara dalam pemberian izin-izin, dan produksi, serta penjualan," ujarnya.

Saiful menjelaskan, fakta mengenai dugaan pemberian suap tersebut diperoleh penyidik dari hasil pemeriksaan sejumlah saksi. Namun, Kejagung belum mengungkap secara terperinci identitas penyelenggara negara yang diduga menerima pemberian tersebut karena masih menjadi materi penyidikan.

"Di situ dari fakta-fakta hasil pemeriksaan yang kami lakukan terhadap saksi-saksi, diperoleh adanya fakta-fakta itu. Dan nantinya tentunya ini masih materi penyidikan, nanti akan kami sampaikan dalam surat dakwaan nanti akan tergambar," imbuhnya.

Dalam perkara ini, penyidik mengungkap lima perusahaan tambang nikel, yakni PT BSJ, PT KAA, PT ANI, PT AMI, PT AMID, dan PT HJ, yang diduga dikendalikan oleh Arif Kurniawan (AK) selaku penerima manfaat (beneficial owner).

Salah satu temuan penyidik berkaitan dengan dugaan manipulasi izin usaha pertambangan (IUP) PT BSC dan PT KAA yang seharusnya berakhir pada 2015.

Namun, kedua perusahaan tersebut disebut mendapatkan penangguhan atau suspend hingga tiga kali. Menurut penyidik, pemberian penangguhan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

" Tetapi dikenakan suspend sebanyak tiga kali, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga terkait suspend ini harusnya izin IUP-nya itu dilakukan dihentikan dan dikembalikan kepada negara," pungkas Saiful.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Jokowi Diduga Otak Skenario di Balik Polemik Penyadapan Presiden Prabowo

Oleh Redaksi · 9 Nov, 10.04 WIB



Foto jarak dekat yang memperlihatkan Mantan Presiden Joko Widodo mengenakan peci hitam dan kemeja batik bermotif cokelat. Di latar belakang, terlihat dinding dengan panel kayu vertikal

BANDA ACEH - Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto menduga Presiden ke-7, Joko Widodo alias Jokowi berada di balik skenario Politik yang berkembang dalam polemik penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara.

Hari menilai, untuk membuktikan dugaan adanya instruksi langsung Jokowi kepada mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) dkk dalam perkara penyadapan tersebut memang tidak mudah. Namun, ia melihat rekam jejak hubungan LSP dengan Jokowi selama berada di pemerintahan hingga setelah Jokowi tidak lagi menjabat presiden patut menjadi perhatian.

Menurutnya, dugaan keterlibatan Jokowi tidak harus selalu dibaca sebagai pemberi instruksi langsung. Ada kemungkinan peran yang lebih jauh, yakni sebagai pihak yang mengatur skenario politik di balik berbagai polemik nasional.

"Untuk menduga aktor penyadapan secara instruksi langsung kepada Jokowi mungkin agak sulit, tapi kebijakan dan keberpihakan hukum yang selama ini menguntungkan Jokowi dan keluarga bisa saja," kata Hari kepada RMOL, Senin, 9 November 2026.

Hari menilai, rekam jejak LSP bersama Jokowi selama berada di pemerintahan maupun setelah pergantian kekuasaan perlu dicermati untuk melihat arah keberpihakan politik keduanya.

Lebih jauh, Hari menduga Jokowi bukan sekadar pihak yang mungkin mengetahui dinamika tersebut, melainkan berpotensi menjadi pembuat skenario dari berbagai peristiwa politik yang berkembang.

"Kalaupun Jokowi bukan menjadi aktor, tapi pembuat skenario dari jalan cerita penyadapan ini," tegasnya.

Hari juga menyinggung polemik ijazah Jokowi yang selama ini menjadi perbincangan publik. Ia menilai, isu tersebut hingga polemik penyadapan presiden membuat nama Jokowi terus menjadi sorotan dalam berbagai lini politik nasional.

"Jokowi menikmati setiap permainan yang ada dari polemik ijazah palsu sampai isu penyadapan. Jokowi menjadi perguncingan dalam semua lini," ungkapnya.

Atas dasar itu, Hari menduga terdapat peran Jokowi dalam mengatur rangkaian dinamika politik tersebut.

"Dan mengindikasikan kuat bahwa otak dan penulis skenarionya adalah Joko Widodo," pungkas Hari.

NASIONAL

Jenderal Terseret Kasus Penyadapan, Syahganda: Tak Ada yang Kebal Hukum

Oleh Redaksi · 9 Nov, 08.18 WIB



BANDA ACEH - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, menyebut Presiden Prabowo Subianto ingin mengubah wajah penegakan hukum di Indonesia. Dia menegaskan tidak boleh ada pejabat yang kebal hukum, termasuk jenderal sekalipun.

Pernyataan itu disampaikan Syahganda merespons penangkapan sejumlah jenderal dalam kasus dugaan penyadapan. Menurut dia, pengungkapan kasus tersebut menunjukkan komitmen Prabowo untuk memastikan hukum berlaku bagi siapa pun.

"Penangkapan oknum jenderal penyadap pembangkang yang terindikasi makar menegaskan tidak ada lagi yang kebal aturan," ujar Syahganda dalam keterangan tertulis, Minggu (8/11/2026).

Dia mengatakan Prabowo ingin mengingatkan para pejabat dan birokrat bahwa jabatan serta fasilitas yang mereka nikmati berasal dari rakyat. Karena itu, pemerintah harus memastikan kebijakannya berpihak kepada masyarakat.

Syahganda juga menyoroti sejumlah program pemerintah yang disebutnya sebagai wujud keberpihakan Prabowo kepada rakyat. Program tersebut antara lain Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), Sekolah Rakyat, Perlindungan Sosial (Perlinsos), Cek Kesehatan Gratis (CKG), hingga Makan Bergizi Gratis (MBG).

Di sektor pertanian, dia mengeklaim pemerintah telah memangkas ratusan aturan yang selama ini mempersulit petani, termasuk dalam memperoleh pupuk bersubsidi.

"Kini, pupuk gampang didapat. Angka Nilai Tukar Petani tembus 132, paling tinggi yang pernah ada," imbuhnya.

Syahganda juga menyebut Indonesia telah mencapai swasembada delapan komoditas dalam dua tahun pemerintahan Prabowo. Dia menambahkan produksi dan cadangan beras nasional kini berada pada posisi tertinggi.

Meski mengklaim sejumlah capaian tersebut, Syahganda mengingatkan bahwa pekerjaan pemerintah belum selesai. Dia menilai persatuan tetap menjadi modal penting untuk melanjutkan pembangunan.

"Perjuangan belum selesai. Persatuan adalah modal terbesar kita," tegasnya

NASIONAL

Buntut Copot Foto Wapres Gibran, Kepala MA Al Hidayah Grobogan Ngaku Didatangi Aparat

Oleh Redaksi · 9 Nov, 10.51 WIB



BANDA ACEH – Kepala Madrasah Aliyah (MA) Al Hidayah, Karangayung, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Zaki Iqbal mengaku didatangi aparat usai aksinya menurunkan foto Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka viral di media sosial.

Zaki menuturkan, pascaviralnya video tersebut di dunia maya, dirinya sempat didatangi serta menerima tekanan dari sejumlah pihak instansi terkait hingga aparat keamanan.

"Aksi penurunan foto tersebut saya lakukan secara spontan. Saya tidak menyangka rekaman aksi itu menyebar luas dan menjadi perbincangan publik di media sosial," ujar Zaki Iqbal, Senin (9/11/2026).

Di tengah derasnya sorotan publik dan kegaduhan yang timbul, Zaki secara terbuka menyampaikan permohonan maaf atas tindakan spontannya yang telah memicu polemik di tengah masyarakat.

Dalam rekaman video berdurasi singkat yang beredar luas, Kepala MA Al Hidayahm. Zaki Iqbal terlihat berjalan mendekati dinding kantor, lalu naik ke atas kursi untuk mencopot bingkai foto Wapres Gibran. Foto tersebut kemudian diletakkan begitu saja di atas meja dan tidak dipasang kembali.

Dikonfirmasi terkait hal itu, Zaki mengakui bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk keecewaannya terhadap kondisi dan regulasi sistem pendidikan di Indonesia saat ini.

Menurutnya, keabsahan dokumen ijazah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki setiap warga negara untuk melanjutkan pendidikan maupun mencari kerja.

Sebab itu, munculnya polemik serta kontroversi dugaan keabsahan ijazah Wapres Gibran menjadi salah satu pemantik ketidakpuasannya hingga nekat melancarkan aksi tersebut

ACEH

11 BERITA

ACEH

Syech Muharram Minta Keuchik Selaraskan Visi Daerah Dalam Membangun Gampong

Oleh Redaksi · 9 Nov, 22.30 WIB



ACEH BESAR – Bupati Aceh Besar Muharram Idris atau Syech Muharram meminta Keuchik (kepala desa-red) agar membangun gampong searah dengan visi Pemerintah Daerah.

"Salah satu tujuan retret ini adalah untuk menyelaraskan pembangunan gampong, searah dengan visi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar," ujar Syech Muharram, pada saat membuka secara resmi reatret 234 Keuchik di Gedung SKB Kota Jantho, Senin (9/11/2026).

Visi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dibawah pimpinan Bupati Muharram Idris bersama Wakil Bupati Syukri yaitu "Aceh Besar Bermarwah dan Bermartabat, Adil, Makmur, Sejahtera, Bersyariah dalam Bingkai Ahlulsunnah Wal Jamaah".

Pada kesempatan yang sama Bupati mengatakan gampong merupakan fondasi pembangunan daerah.

"Keuchik bukan sekadar pemegang jabatan, melainkan pemimpin masyarakat, pengayom warga, penggerak pembangunan, dan teladan dalam kehidupan bermasyarakat," tegasnya.

Salah seorang Keuchik Peserta retreat Dedy Novreza mengaku pembangunan gampong seharusnya mengikuti arah kebijakan daerah, maka pelaksanaan retret 234 keuchik se-Kabupaten Aceh Besar diharapkan menjadi penyatuan visi pembangunan Aceh Besar dari gampong.

"Pembangunan gampong seyogyanya mendukung visi Bupati Aceh Besar dalam membangun daerah, untuk itu retret ini harus mengarah kesana," ujar Dedy Novreza, Keuchik Lam Trieng Kecamatan Kuta Baro.

Selain itu, retret juga diharapkan menjadi ruang pembelajaran bagi para pemimpin gampong untuk memperkuat kemampuan manajerial sekaligus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

"Semoga ini menjadi pengalaman dan pengetahuan baru yang dapat diterapkan dalam menjalankan pemerintahan, sehingga mampu menjawab kebutuhan masyarakat," harap Dedy.

Kepemimpinan gampong, katanya membutuhkan kemampuan mengelola pemerintahan sekaligus membangun komunikasi dan kepercayaan masyarakat. Keuchik juga dituntut mampu mengarahkan perangkat gampong agar pelayanan dan pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai harapan warga.

Karena itu, peningkatan kapasitas melalui kegiatan seperti retret dinilai penting untuk memperkuat kesiapan para keuchik menghadapi berbagai tantangan pemerintahan di tingkat lokal.

Pemerintah Kabupaten Aceh Besar melaksanakan retret yang diikuti 234 keuchik dari seluruh wilayah kabupaten. Kegiatan telah dimulai sejak kemaren yang diawali dengan apel penerimaan peserta di halaman Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) dan Jamuan Makan malam oleh Bupati Aceh Besar di Meuligoe di Kota Jantho semalam.

Melalui kegiatan tersebut, para keuchik diharapkan memperoleh tambahan wawasan, memperkuat karakter kepemimpinan, serta meningkatkan kemampuan dalam mengelola pemerintahan gampong.[]

ACEH

BPOM Aceh Perkuat Sinergi KKS melalui Inovasi Sanger Ureueng Aceh

Oleh Redaksi · 9 Nov, 19.21 WIB



BANDA ACEH – Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banda Aceh turut berpartisipasi dalam Rapat Pembentukan Tim Pembina Kabupaten/Kota Sehat (KKS) Provinsi Aceh yang diselenggarakan oleh Pemerintah Aceh melalui Sekretariat Daerah Aceh, Senin (9/11/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Biro Keistimewaan Aceh dan Kesra, Sekretariat Daerah Aceh ini menjadi langkah awal untuk memperkuat kelembagaan dan sinergi lintas sektor dalam mendukung penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat di Aceh.

Rapat dihadiri Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Aceh, Ferdiyus, perwakilan instansi vertikal, serta Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) terkait. BBPOM di Banda Aceh diwakili Suryani Fauzi selaku Kepala Tim Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) BBPOM di Banda Aceh.

Dalam pembahasan, Ferdiyus menegaskan bahwa penyelenggaraan KKS bukan hanya tanggung jawab sektor kesehatan, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan.

"Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat membutuhkan komitmen dan kerja sama semua sektor. Setiap instansi perlu berperan sesuai tugas dan kewenangannya agar program dapat berjalan terpadu dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ujar Ferdiyus.

Ia berharap Tim Pembina KKS Provinsi Aceh dapat memperkuat koordinasi sekaligus melaksanakan pembinaan, pendampingan, konsultasi teknis, monitoring, dan evaluasi terhadap kabupaten/kota. Upaya tersebut perlu didukung pembagian tugas yang jelas serta rencana kerja dengan target terukur.

Penyelenggaraan KKS mencakup sembilan tatanan, mulai dari kehidupan masyarakat sehat mandiri, permukiman dan fasilitas umum, satuan pendidikan, pasar, perkantoran dan perindustrian, pariwisata, transportasi dan tertib lalu lintas jalan, perlindungan sosial, hingga penanggulangan bencana. Seluruhnya membutuhkan dukungan lintas sektor, termasuk dalam aspek keamanan obat dan makanan.

Sebagai bentuk kontribusi, BBPOM di Banda Aceh memperkenalkan inovasi "Sanger Ureueng Aceh (Sharing Informasi Aneuk Nanggroe dan Edukasi Registrasi)". Inovasi ini memanfaatkan budaya ngopi dan keberadaan warung kopi (warkop) di Aceh sebagai sarana komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat.

Ketua Tim Publikasi dan KIE BBPOM Aceh, Suryani Fauzi menjelaskan bahwa warung kopi memiliki potensi sebagai ruang edukasi karena dekat dengan aktivitas dan kebiasaan masyarakat Aceh.

"Kami ingin menjadikan warung kopi bukan hanya sebagai tempat berkumpul, tetapi juga sebagai ruang berbagi informasi mengenai keamanan obat dan makanan serta edukasi registrasi produk. Melalui Sanger Ureueng Aceh, edukasi BPOM dapat hadir lebih dekat dengan masyarakat," jelas Suryani.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ACEH

Tutup Maulid, Ketua DPRK Irwansyah Ajak Para Orang Tua Tingkatkan Ilmu Parenting Kekinian

Oleh Redaksi · 9 Nov, 18.05 WIB



BANDA ACEH – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Irwansyah menekankan kepada orang tua agar meningkatkan ilmu parenting. Pesan itu disampaikan Irwansyah peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang diselenggarakan TPQ Fathun Qarib di kompleks Masjid Fathun Qarib UIN Ar-Raniry, Minggu (8/11/2026).

Di hadapan para orang tua dan wali santri TPQ serta masyarakat yang hadir, Irwansyah mengingatkan pentingnya perhatian orang tua terhadap perkembangan pendidikan anak di rumah.

Ia mengajak para orang tua untuk menyesuaikan pendekatan komunikasi dalam mendidik anak, mempelajari ilmu parenting terbaru, serta membangun hubungan yang lebih bersahabat dengan anak.

Menurutnya, perkembangan teknologi informasi telah mendorong perubahan lingkungan kehidupan yang sangat dahsyat. Kondisi tersebut menghadirkan tantangan yang tidak ringan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak.

"Karena itu, orang tua tidak boleh terus menggunakan pendekatan pendidikan yang sama tanpa mempertimbangkan perubahan zaman," kata Irwansyah.

Irwansyah menambahkan salah satu persoalan pendidikan keluarga dewasa ini bukan semata-mata kurangnya perhatian orang tua kepada anak, melainkan terkadang kurang tepatnya cara orang tua menyampaikan perhatian tersebut.

"Ada orang tua yang sangat mencintai anaknya, tetapi komunikasi yang dibangun justru membuat anak takut berbicara. Ada yang menginginkan anaknya menjadi pribadi disiplin, tetapi terlalu sering menggunakan ancaman. Ada pula yang mengharapkan anak tumbuh mandiri, tetapi seluruh keputusan anak selalu ditentukan orang tua," ujarnya.

Anak-anak hari ini tumbuh dalam lingkungan yang berbeda dengan lingkungan masa kecil orang tuanya. Mereka berhadapan dengan telepon pintar, permainan digital, media sosial, video pendek, kecerdasan buatan, dan berbagai informasi yang dapat diakses hampir tanpa batas.

Kemajuan tersebut membawa manfaat besar bagi pendidikan. Namun, tanpa pendampingan, anak juga berpotensi terpapar informasi yang tidak sesuai dengan usianya, kekerasan digital, perundungan, perilaku konsumtif, penggunaan gawai berlebihan, serta berbagai nilai yang bertentangan dengan akhlak Islam.

Karena itu, pendidikan anak tidak cukup hanya dengan melarang penggunaan teknologi. Orang tua harus memahami teknologi, mengenali lingkungan digital anak, dan membangun kemampuan anak untuk memilih informasi secara bijaksana.

"Pendekatan parenting kontemporer mengajarkan pentingnya hubungan yang hangat, komunikasi dua arah, penghargaan terhadap perkembangan anak, serta ketegasan yang disertai kasih sayang," sebutnya.

Acara ini dihadiri satusan santriwan dan santriwati, beserta orang tua dan ustazah, dilanjutkan dengan ceramah agama yang disampaikan oleh Ustad Rusdi Suardi, turut dihadiri …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ACEH

Pj Sekda Aceh Ikuti Rakor Pelibatan Pihak Ketiga dalam Pembersihan Sedimentasi Sungai

Oleh Redaksi · 9 Nov, 20.55 WIB



BANDA ACEH – Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Aceh, Taufik, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pelibatan Pihak Ketiga dalam Upaya Pembersihan Sedimentasi Sungai bersama sejumlah kementerian dan instansi terkait melalui sambungan Zoom, di ruang rapat Sekda Aceh, Senin (9/11/2026).

Turut mendampingi, para asisten Sekda, kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), serta kepala biro terkait. Sementara itu, para peserta dari kementerian dan lembaga terkait mengikuti rapat dari kantor masing-masing.

Rapat dipimpin Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Safrizal ZA, yang juga bertugas sebagai Kepala Posko Wilayah Aceh dalam Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Wilayah Sumatera.

Dalam penjelasannya, Safrizal menyampaikan bahwa rapat koordinasi tersebut dilaksanakan menyikapi terjadinya banjir susulan di sejumlah wilayah Aceh dalam beberapa waktu terakhir. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah kondisi sungai yang mengalami kerusakan dan pendangkalan akibat sedimentasi, sehingga berpotensi mengurangi kapasitas sungai dalam menampung dan mengalirkan debit air.

Menurutnya, kondisi sungai yang mengalami sedimentasi membutuhkan penanganan secara terencana dan terukur. Karena itu, diperlukan upaya percepatan pembersihan sedimentasi dengan membuka peluang pelibatan pihak ketiga untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

Rakor tersebut secara khusus membahas mekanisme dan tata kelola pelibatan pihak ketiga agar pelaksanaannya berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa upaya pembersihan sedimentasi benar-benar berorientasi pada kepentingan penanggulangan bencana dan pemulihan fungsi sungai, bukan justru menimbulkan persoalan baru.

Pelibatan pihak ketiga diharapkan dapat membantu mempercepat penanganan sedimentasi, termasuk melalui dukungan sumber daya, peralatan, dan kemampuan teknis yang dibutuhkan. Namun, pelaksanaannya tetap harus memperhatikan aspek lingkungan, keselamatan, serta ketentuan pemanfaatan material hasil pembersihan sungai.

Pemerintah Aceh melalui perangkat daerah terkait turut mengikuti pembahasan tersebut sebagai bagian dari koordinasi lintas sektor dalam upaya penanganan dampak bencana dan pemulihan infrastruktur sumber daya air di Aceh. []

ACEH

MSI Aceh Angkat Sosok Teungku Fakinah dalam Seminar Nasional Sejarah

Oleh Redaksi · 9 Nov, 17.36 WIB



BANDA ACEH – Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) Provinsi Aceh akan menggelar seminar nasional untuk membahas sosok Teungku Fakinah, ulama perempuan sekaligus pejuang dalam Perang Aceh yang dinilai belum banyak dikenal masyarakat luas.

Seminar bertajuk "Teungku Fakinah: Ulama dan Pahlawan Perempuan yang Terlupakan" tersebut dijadwalkan berlangsung di Auditorium Lantai III Gedung Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Syiah Kuala (USK), Selasa (10/11/2026).

"Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan literasi kesejarahan masyarakat Aceh, terutama mengenai sejarah dan peran perempuan dalam perjuangan bangsa," kata Ketua Panitia, Teuku Bahagia Kesuma, Senin (9/11/2026).

Teuku Bahagia mengatakan, sosok Teungku Fakinah memiliki peran penting dalam sejarah Aceh. Ulama perempuan tersebut dikenal sebagai pendidik sekaligus panglima perang yang terlibat dalam perjuangan melawan kolonial Belanda.

Teungku Fakinah diperkirakan lahir pada 1856 di Lam Diran, Gampong Lam Krak, Kecamatan Siampang Tiga, Aceh Besar. Ia berasal dari keluarga ulama dan tumbuh dalam lingkungan pendidikan dayah.

Sejak muda, Teungku Fakinah dikenal memiliki kemampuan keilmuan hingga dipercaya mengajar dan memimpin dayah.

Ketika Belanda melancarkan agresi ke Aceh dan sejumlah dayah menjadi sasaran penghancuran, Teungku Fakinah turut terjun dalam perjuangan.

Ulama perempuan itu, kata Teuku Bahagia, meninggalkan aktivitas pendidikan untuk mengangkat senjata dan memimpin pasukan dalam perlawanan terhadap kolonial bahkan memimpin 4 Batalion yang dikenal dengan Sukey Fakinah.

MSI Aceh menilai perjalanan hidup Teungku Fakinah memperlihatkan perpaduan peran sebagai ulama, pendidik, dan pejuang. Namun, kontribusinya dinilai belum memperoleh ruang yang sebanding dalam narasi sejarah nasional.

Seminar tersebut juga akan membahas persoalan historiografi, termasuk kemungkinan adanya bias gender, keterbatasan sumber sejarah, sentralisme penulisan sejarah nasional, serta minimnya dokumentasi dan diseminasi sejarah tokoh perempuan di tingkat lokal.

"Kami ingin memperkenalkan sosok Teungku Fakinah secara lebih utuh kepada masyarakat. Beliau bukan hanya dikenal sebagai pejuang perempuan, tetapi juga seorang ulama dan pendidik yang memiliki kontribusi besar dalam sejarah Aceh," kata Teuku Bahagia.

Melalui seminar tersebut, kata ketua panitia, MSI Aceh berharap literasi sejarah perempuan semakin meningkat dan mendorong lahirnya penelitian lanjutan, baik dalam bentuk skripsi mahasiswa maupun karya masyarakat umum.

Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat membuka ruang dokumentasi dan penulisan ulang sejarah lokal melalui berbagai media, termasuk publikasi populer dan konten digital.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ACEH

Sambut Prabowo, Aceh Barat Gelar Zikir Bersama

Oleh Aceh Barat · 9 Nov, 21.15 WIB



Bupati Aceh Barat, Tarmizi SP, MM, memberikan hormat saat berada di mimbar,FOTO/HA1

MEULABOH – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat akan menggelar zikir dan doa bersama untuk menyambut kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto yang dijadwalkan pada 11 November 2026. Kegiatan tersebut akan melibatkan ulama, santri, mahasiswa, dan masyarakat.

Bupati Aceh Barat, Tarmizi SP, MM, mengatakan Prabowo dijadwalkan mengunjungi Kabupaten Nagan Raya dan Aceh Barat dalam rangkaian kunjungan ke wilayah Barat Selatan Aceh, bertepatan dengan momentum Hari Pahlawan.

"Persiapan terus kita matangkan. Sejumlah pihak dari pemerintah pusat juga sudah tiba di Aceh untuk mempersiapkan kedatangan Presiden," kata Tarmizi, Senin (9/11/2026).

Menurutnya, kegiatan penyambutan akan dipusatkan di Kampus Universitas Teuku Umar (UTU). Ia berharap kunjungan Presiden dapat mendorong dukungan pemerintah pusat terhadap pengembangan kampus tersebut yang masih membutuhkan anggaran ratusan miliar rupiah.

Selain pengembangan UTU, Tarmizi berharap kunjungan itu menjadi kesempatan untuk menyampaikan sejumlah kebutuhan pembangunan Aceh Barat, termasuk penyelesaian irigasi Lhok Guci yang membutuhkan anggaran sekitar Rp2,5 triliun, pembangunan rumah sakit, serta peningkatan infrastruktur jalan.

"Melalui kunjungan ini, kita berharap berbagai kebutuhan pembangunan Aceh, khususnya Aceh Barat, mendapat perhatian dan dukungan pemerintah pusat," ujarnya.

Tarmizi menambahkan, zikir dan doa bersama juga bertujuan memohon agar Indonesia, khususnya Aceh dan Aceh Barat, senantiasa aman dan kondusif.

Ia berharap masyarakat tetap bersatu serta daerah tersebut dijauhkan dari bencana, marabahaya, dan berbagai gangguan keamanan dan ketertiban.[]

Editor : Biro Meulaboh.

ACEH

Irwansyah Serukan TPG Perempuan Berperan Atasi KDRT dan Perceraian

Oleh Redaksi · 9 Nov, 16.32 WIB



BANDA ACEH – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Irwansyah, mengajak perempuan yang tergabung dalam Tuha Peut Gampong (TPG) untuk lebih aktif mengambil peran dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial di tingkat gampong, terutama menyangkut kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perceraian, perlindungan anak, dan keharmonisan keluarga.

Ajakan tersebut disampaikan Irwansyah dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama sekitar 100 perempuan anggota TPG dari 90 gampong se-Banda Aceh yang berlangsung di Gedung DPRK Rabu (4/11/2026).

Pertemuan tersebut turut dihadiri anggota DPRK Syarifah Munira, serta unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) Banda Aceh.

Dalam pertemuan itu, Irwansyah menyampaikan bahwa amanah yang diemban perempuan anggota TPG kini semakin besar. Selain menjalankan peran dalam keluarga, mereka juga memiliki tanggung jawab untuk ikut memikirkan dan menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat di gampong.

Menurutnya, perempuan anggota TPG memiliki posisi strategis dalam membantu menangani persoalan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan keluarga dan masyarakat, seperti KDRT, pencegahan perceraian, stunting, perlindungan anak, hingga konflik antarwarga.

Irwansyah juga menerima sejumlah masukan dari peserta. Di antaranya, masih adanya anggota TPG perempuan yang menghadapi hambatan ketika menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintahan gampong. Bahkan, ada yang mendapat anggapan bahwa perempuan TPG tidak memiliki kewenangan untuk mengurus persoalan gampong.

Menanggapi hal tersebut, Irwansyah menegaskan bahwa TPG memiliki fungsi semacam lembaga legislatif di tingkat gampong yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

“TPG itu ibarat DPR di tingkat gampong. Karena itu, jalankan fungsi dan tanggung jawab sesuai aturan, tetapi tetap jaga sinergi dan koordinasi dengan pemerintah gampong. Jangan sampai perbedaan pandangan justru menimbulkan konflik. Setiap persoalan sebaiknya diselesaikan melalui musyawarah,” ujarnya.

Ia menambahkan, apabila berbagai persoalan dapat diselesaikan di tingkat gampong, hal tersebut secara langsung akan membantu pemerintah kota dalam mewujudkan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kalau semua gampong memiliki semangat menyelesaikan persoalan di gampong masing-masing, seperti stunting, KDRT, konflik, judol. Ketika semua perangkat gampong bersatu untuk menyelesaikan, tentu akan membantu pembangunan kota,” lanjut Irwansyah.

Dalam kesempatan itu, perempuan anggota TPG juga menyampaikan aspirasi mengenai kebutuhan peningkatan kapasitas, di antaranya pelatihan public speaking, kemampuan menyusun produk hukum (legal drafting), serta pembekalan terkait tugas dan …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ACEH

Nagan Raya Bidik Rekor MURI Lewat Bentangan Merah Putih 24 Km

Oleh Aceh Barat · 9 Nov, 17.27 WIB



Arafiq A. Karim,S.Sos.,MPA Kepala Dinas Komonikasi.dan Informatika (Kominsa) Kabupaten,Nagan Raya,FOTO/ist

NAGAN RAYA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nagan Raya, Aceh, bersiap menggelar aksi pembentangan bendera Merah Putih sepanjang 24 kilometer pada 11 November mendatang. Kegiatan yang melibatkan ribuan masyarakat tersebut ditargetkan dapat mencatatkan rekor di Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI).

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kabupaten Nagan Raya, Arafiq A. Karim, S.Sos., MPA, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kecintaan masyarakat terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sekaligus memperkuat semangat persatuan dan nasionalisme.

“Bendera Merah Putih sepanjang 24 kilometer ini bukan sekadar kain. Ini merupakan simbol bahwa Nagan Raya dan Aceh cinta Indonesia. Kami ingin menunjukkan bahwa semangat nasionalisme dari ujung barat Aceh tidak pernah padam,” ujar Arafiq, Senin (9/11/26).

Ia menjelaskan, bentangan bendera tersebut direncanakan dimulai dari Bandara Cut Nyak Dhien hingga Masjid Agung Baitul A'la (Giok), dengan melintasi sejumlah wilayah di Kecamatan Kuala Pesisir, Kuala, dan Suka Makmue.

Kegiatan ini juga direncanakan menjadi bagian dari penyambutan kedatangan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Menurut Arafiq, pelaksanaan kegiatan membutuhkan ribuan relawan yang terdiri atas masyarakat, pelajar, dan santri. Mereka akan berdiri berjajar memegang bendera secara estafet di sepanjang rute yang telah ditentukan, dengan dukungan pengamanan TNI dan Polri.

Pemkab Nagan Raya mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi menyukseskan kegiatan tersebut.

“Kami mengajak seluruh masyarakat, mulai dari pelajar hingga orang tua, petani dan seluruh elemen masyarakat untuk ikut ambil bagian. Ini merupakan kegiatan milik kita bersama,” tutupnya.[]

Editor : Biro Meulaboh.

ACEH

Pemerintah Aceh dan Komnas HAM Bahas Penanganan Bentrokan Warga dan Aparat di Pidie

Oleh Redaksi · 9 Nov, 15.59 WIB



BANDA ACEH – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI bertemu dengan pemangku kebijakan Pemerintah Aceh di Kantor Gubernur Aceh, Senin (9/11/2026), untuk membahas penanganan bentrokan antara warga dan aparat militer di Desa Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, yang terjadi pada 4 November 2026.

Pertemuan tersebut membahas langkah penanganan pascaperistiwa yang mengakibatkan korban jiwa dan luka-luka, termasuk upaya mendorong investigasi, kepastian hukum, serta pemulihan hak-hak korban.

Dalam pertemuan tersebut, dari pihak Pemerintah Aceh dihadiri Pj Sekretaris Daerah Aceh Taufik, Asisten Pemerintahan, Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Aceh Syakir, Kepala Biro Hukum Amrizal J Prang, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Aceh Munawar, serta Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

Sementara dari Komnas HAM RI hadir Ketua Komnas HAM Anis Hidayah, Plh. Kepala Sekretariat Komnas HAM Aceh Cut Ernawati, serta anggota Komnas HAM Aceh Darmadi, Eka Azmiyadi, dan Sri Mauliani.

Anis Hidayah mengatakan, peristiwa tersebut tidak bisa dilihat sebagai kejadian tunggal. Menurutnya, terdapat latar belakang sosial, hukum, dan politik yang menjadi bagian dari akar persoalan hingga terjadinya insiden pada 4 November lalu.

Karena itu, Anis menekankan pentingnya keseriusan dalam memperjuangkan keadilan dan memastikan tanggung jawab negara terhadap masyarakat yang menjadi korban.

Ia menyebutkan, ada dua hal utama yang perlu didorong Pemerintah Aceh, yakni kepastian hukum terkait bendera Aceh dan investigasi terhadap peristiwa bentrokan tersebut.

“Ada dua hal yang harus didorong pemerintah provinsi, yaitu kepastian hukum bendera dan investigasi peristiwa,” kata Anis.

Selain investigasi, Anis juga mempertanyakan pihak yang bertanggung jawab terhadap pemulihan para korban. Menurutnya, Pemerintah Aceh harus memiliki posisi yang jelas dalam mendorong penyelesaian persoalan tersebut, mengingat peristiwa itu telah menimbulkan korban jiwa dan luka-luka.

Ia mengatakan, keluarga korban saat ini menunggu adanya penyelesaian melalui jalur hukum. Karena itu, Pemerintah Aceh diharapkan tidak hanya memantau perkembangan kasus, tetapi juga mengambil peran aktif dalam mendorong investigasi.

“Posisi Pemerintah Aceh harus jelas agar masyarakat merasa terwakili. Ini yang ditunggu masyarakat, khususnya keluarga korban yang meminta penyelesaian secara hukum,” ujarnya.

Anis menegaskan, pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab pemerintah. Untuk itu, ia berharap Pemerintah Aceh lebih memperkuat koordinasi dalam memastikan hak-hak masyarakat terpenuhi, termasuk hak korban untuk memperoleh keadilan …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ACEH

Said Fadheil Targetkan Pendidikan Aceh Barat Terbaik pada 2028

Oleh Aceh Barat · 9 Nov, 17.04 WIB



Momen pelantikan pengurus cabang PGRI di Aceh Barat untuk masa bakti 2025-2030.

MEULABOH– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Barat menargetkan daerah itu menjadi salah satu daerah dengan kualitas pendidikan terbaik di Provinsi Aceh pada 2028. Untuk mencapai target tersebut, diperlukan sinergi pemerintah, guru, dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan.

Hal itu disampaikan Wakil Bupati Aceh Barat, Said Fadheil, SH, saat menghadiri pelantikan pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Cabang Kecamatan Johan Pahlawan dan Meureubo di Aula Gedung B Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat, Senin (9/11/2026).

Said mengatakan, pencapaian target tersebut harus didukung pembenahan manajemen pendidikan, peningkatan kompetensi guru, serta perbaikan sarana dan prasarana sekolah. Pemerintah juga berkomitmen memastikan pemerataan akses dan layanan pendidikan bagi anak-anak di wilayah pedalaman, pesisir, maupun perkotaan.

Menurutnya, peningkatan mutu pendidikan tidak hanya berorientasi pada kemampuan akademik, tetapi juga harus diiringi pembentukan karakter generasi muda yang disiplin, berakhlak mulia, dan menjunjung tinggi nilai-nilai syariat Islam.

Ia meminta seluruh sekolah menjalankan instruksi bupati terkait pembiasaan membaca Al-Qur'an selama 15 menit sebelum pembelajaran dimulai serta pelaksanaan salat berjamaah di lingkungan sekolah.

“Guru harus menjadi teladan bagi siswa, baik dalam kedisiplinan, sikap maupun perilaku sehari-hari. Sekolah juga harus menjadi lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak-anak untuk belajar dan mengembangkan potensi,” ujarnya.

Said turut menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi tenaga pendidik, mulai dari peningkatan kompetensi hingga persoalan kesejahteraan. Karena itu, ia berharap PGRI dapat menjadi jembatan komunikasi antara guru dan pemerintah daerah dalam menyampaikan aspirasi serta mencari solusi atas berbagai persoalan pendidikan.

Ia juga mengajak seluruh pengurus dan anggota PGRI memperkuat kekompakan, meningkatkan profesionalisme, serta menghadirkan inovasi dalam proses pembelajaran.

“Jadikan PGRI sebagai mitra aktif pemerintah dalam mewujudkan pendidikan Aceh Barat yang lebih baik,” pungkasnya.[]

Editor : Biro Meulaboh.

ACEH

BBPOM Aceh Perkuat Kompetensi Apoteker melalui Workshop CDOB dan CAPA

Oleh Redaksi · 9 Nov, 12.04 WIB



ACEH BESAR – Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh (BBPOM Aceh) terus memperkuat sinergi dengan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) dalam memastikan rantai distribusi dan pelayanan obat berjalan sesuai standar.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui keterlibatan BBPOM Aceh dalam rangkaian Workshop Pekan Ilmiah Tahunan (PIT) Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia (PD IAI) Aceh Tahun 2026 yang mengusung tema "United Pharmacist, One Standard for Seamless Pharmaceutical Care".

Kegiatan dilaksanakan dalam dua tahapan, yaitu secara daring pada Rabu (4/11/2026) dan dilanjutkan secara luring pada Jumat (6/11/2026) di Hotel The Pade, Aceh Besar.

BBPOM Aceh menghadirkan dua narasumber dari Tim Inspeksi Obat, yaitu Ketua Tim Inspeksi Obat, Naila, bersama staf, Eko Aprianto. Materi yang disampaikan menyasar apoteker dari berbagai sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian.

Salah satu sesi workshop secara khusus ditujukan kepada 30 Apoteker Penanggung Jawab Pedagang Besar Farmasi (APJ PBF) se-Provinsi Aceh. Dalam sesi ini, Naila menyampaikan materi Bimbingan Teknis Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 20 Tahun 2025.

Pembahasan difokuskan pada penguatan penerapan Sistem Manajemen Mutu, termasuk pentingnya pelaksanaan Kajian Manajemen Puncak secara berkala. Kajian tersebut menjadi bagian penting dalam mengevaluasi efektivitas sistem yang telah berjalan, mengidentifikasi aspek yang perlu ditingkatkan, serta mendorong perbaikan berkelanjutan (continual improvement) dalam kegiatan distribusi obat.

Naila menekankan bahwa penerapan CDOB tidak boleh hanya dipandang sebagai pemenuhan persyaratan administrasi atau sertifikasi, tetapi harus menjadi budaya kerja dalam setiap proses distribusi obat.

"Setiap PBF harus memastikan bahwa sistem manajemen mutu benar-benar diterapkan secara konsisten. Kajian manajemen puncak menjadi salah satu instrumen penting untuk mengevaluasi kinerja, mengidentifikasi kendala, dan menetapkan langkah perbaikan agar mutu obat tetap terjaga sepanjang rantai distribusi," jelas Naila.

Selain itu, peserta juga mendapatkan pemahaman mengenai implementasi sertifikasi dan sertifikasi ulang CDOB berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 27 Tahun 2025. Kepatuhan terhadap ketentuan terbaru menjadi aspek penting bagi PBF dalam memastikan seluruh proses distribusi obat dilaksanakan sesuai standar, sehingga mutu dan keabsahan obat tetap terjaga dari sarana distribusi hingga diterima masyarakat.

Pada sesi pleno yang diikuti sekitar 300 apoteker dari berbagai sarana pelayanan dan distribusi kefarmasian, Eko Aprianto membawakan materi bertajuk "CAPA Across Pharmacy Practice: Dari Temuan Menuju Perbaikan Berkelanjutan".

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ANEKA BERITA

8 BERITA

EDUKASI

Mahasiswa Magister FKIP USK Motivasi Santri Dayah Wakaf Barbate, Dorong Gantung Cita-Cita Setinggi Langit

Oleh Hamdani · 9 Nov, 19.08 WIB



Mahasiswa Program Magister Pendidikan Bahasa Inggris FKIP Universitas Syiah Kuala (USK) bersama pengurus, pembina, dan santri Dayah Wakaf Barbate saat kunjungan silaturahmi dan pemberian motivasi di kawasan Kebun Kurma, Kecamatan Blang Bintang, Aceh Besar, Minggu (8/11/2026). Kegiatan tersebut diisi dengan berbagi pengalaman pendidikan, motivasi meraih cita-cita,

ACEH BESAR — Sebanyak 22 mahasiswa Program Magister Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Syiah Kuala (USK) mengunjungi Dayah Wakaf Barbate yang berlokasi di kawasan Kebun Kurma, Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar, Minggu (8/11/2026).

Kunjungan tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus berbagi pengalaman dan motivasi kepada para santri, khususnya dalam membangun semangat belajar, meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris, serta menumbuhkan keberanian untuk meraih cita-cita setinggi mungkin.

Kedatangan rombongan mahasiswa magister angkatan 2026 itu dilatarbelakangi ketertarikan mereka untuk melihat secara langsung penyelenggaraan pendidikan tahfiz Al-Qur'an di Dayah Wakaf Barbate, yang memberikan pendidikan secara gratis bagi anak-anak dari keluarga yatim, duafa, dan mualaf.

Ketua Yayasan Wakaf Barbate Islamic City (YWBIC), Prof. Dr. Sofyan A. Gani, MA, dalam sambutannya memperkenalkan profil dan perjalanan pendidikan dayah tersebut kepada para mahasiswa. Ia menyampaikan bahwa Dayah Wakaf Barbate telah memasuki tahun kelima operasional dalam menjalankan misi pendidikan dan pembinaan generasi penghafal Al-Qur'an.

"Ini sudah memasuki tahun kelima operasional dayah. Kami mengucapkan terima kasih atas kedatangan adik-adik mahasiswa ke tempat ini. Mudah-mudahan kehadiran mereka dapat memberikan motivasi kepada para santri agar semakin rajin belajar dan terus bersemangat meraih masa depan," ujarnya.

Sofyan juga mengharapkan dukungan berbagai elemen masyarakat, termasuk kalangan mahasiswa, untuk turut berkontribusi melalui infak dan sedekah guna mendukung keberlangsungan operasional pendidikan dayah.

Saat ini, Dayah Wakaf Barbate membina sebanyak 87 santri yang berasal dari keluarga yatim, duafa, dan mualaf dari 21 kabupaten/kota di Aceh. Pendidikan tanpa pungutan biaya tersebut menjadi bagian dari komitmen yayasan dalam memberikan akses pendidikan keagamaan bagi anak-anak yang membutuhkan.

Suasana pertemuan berlangsung hangat dan interaktif. Kegiatan dipandu oleh Wahdina selaku Komisaris Tingkat (Komting), yang mengawali sesi dengan memperkenalkan para mahasiswa secara bergantian.

Para mahasiswa kemudian berbagi pengalaman perjalanan akademik hingga berhasil melanjutkan pendidikan ke jenjang magister. Dengan pendekatan komunikatif dan sesekali diselingi humor, mereka mengajak para santri untuk memiliki cita-cita besar, tekun belajar, serta tidak membatasi impian hanya karena kondisi dan keterbatasan yang dihadapi.

Mereka juga menekankan pentingnya pendidikan dan penguasaan bahasa Inggris sebagai bekal untuk membuka kesempatan lebih luas di masa depan.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

OPINI

Mewaspadai Skenario Pelaku Sebenarnya Skandal Penyadapan Ilegal: “Intellectual Dader”

Oleh Redaksi · 9 Nov, 17.31 WIB



Gambar kolase ini menampilkan Presiden Prabowo Subianto, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan pejabat lainnya dengan latar belakang gedung Mabes Polri dan langit senja yang dramatis.

Oleh: Tarmidzi Yusuf((Kolumnis))

ANTAN Kapolri yang saat ini menjabat Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian makin disorot dalam skandal penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Secara mengejutkan muncul nama mantan Kapolri lain, Idham Aziz.

Nama Idham Aziz mendadak muncul pasca ketidakhadirannya saat 10 mantan Kapolri bertemu Presiden Prabowo, Ahad 8 November 2026 di Hambalang.

Sengaja atau ada skenario lain? Menutupi nama mantan Kapolri yang selama ini sudah lama beredar di masyarakat terkait penyadapan ilegal? Wallahua’lam Yang jelas ketidakhadiran Idham Aziz memunculkan spekulasi baru.

Adalah Mantan Menkopolhukam, Mahfud MD pertama kali yang mengungkapkan penangkapan sejumlah Irjen hingga Kombes di rumah mantan Kapolri terkait penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Namun, menurut Mahfud MD, rumah mantan Kapolri yang dimaksud bukan milik Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Lalu rumah mantan Kapolri Tito Karnavian atau Idham Aziz? Atau sekadar pengalihan isu untuk menutupi mantan Kapolri yang dimaksud? Entahlah.

Mantan Kapolri Idham Aziz satu-satunya mantan Kapolri yang tidak hadir dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo di Hambalang kemarin. Ada apa?

Belum ada penjelasan terkait ketidakhadiran mantan Kapolri Idham Aziz. Nama Idham Aziz mengingatkan kita akan peristiwa pembantaian dan pembunuhan 6 Laskar FPI yang kejadiannya saat Idham Aziz menjabat Kapolri.

Spekulasi liar berkembang. Benarkah nama mantan Kapolri Tito Karnavian atau Idham Aziz dikait-kaitkan dengan mantan Kapolri yang diungkap Mahfud MD?

Rumah mantan Kapolri lain selain Listyo Sigit Prabowo tempat penangkapan pada Selasa, 3 November 2026 dinihari, kata Mahfud MD. Ahad 8 November 2026 Kabareskrim Komjen Pol Asep Safrudin membantah mantan Kapolri Tito Karnavian maupun Idham Aziz ikut diciduk Polisi.

Karena itu, kita tidak boleh terburu-buru menarik kesimpulan bahwa Tito Karnavian atau Idham Aziz terlibat dalam skandal penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Bisa saja ada skenario intelektual dader untuk melindungi pelaku yang sebenarnya.

Mungkin saja aktor intelektual skandal penyadapan ilegal sedang merancang, meminjam Andi Syahputra dalam percakapan di sebuah group WhatsApp, apa yang disebut dengan intellectuele dader.

Intellectual dader adalah rencana kebohongan, pengaturan situasi, atau alur terstruktur yang sengaja dibuat agar sebuah kejahatan berjalan mulus atau agar pelaku aslinya tidak terdeteksi.

Yang jelas. Publik makin penasaran. Di depan panggung tampak Kapolri dan Presiden Prabowo sedang konsolidasi.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

OPINI

Menuju Aksi Sejuta Umat Pemakzulan Gibran

Oleh Redaksi · 9 Nov, 16.00 WIB



Potret dinamika politik dan hukum di Indonesia yang melibatkan tokoh-tokoh penting.

Oleh: Ahmadi Thaha(())

ERAH Putih berkibar di atas panggung. Spanduk raksasa bertuliskan "Aksi Rakyat Bela Indonesia" membentang di belakang deretan tokoh nasional dan pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam.

Sebagian mereka mengenakan baju putih, peci, dan ikat kepala Merah Putih. Mereka duduk berjajar menghadap ribuan orang yang memenuhi Lapangan Hijau Masjid Agung Al-Azhar, dekat Blok M, Jakarta Selatan, Minggu, 8 November 2026.

Sejak dinihari, massa berdatangan untuk shalat Subuh berjemaah. Seusai salat, mereka sarapan dengan bekal masing-masing atau hidangan yang disediakan panitia. Ketika matahari mulai meninggi, lapangan semakin padat.

Di jalan sekitar Blok M dan Sudirman, warga menikmati olahraga dalam kegiatan car free day. Sementara itu, di halaman Al-Azhar, berlangsung sebuah pertemuan kebangsaan yang membawa persoalan serius tentang arah negara.

Para tokoh berorasi secara bergantian. KH Bachtiar Nasir, yang memotori gerakan, menyebut aksi kali ini dipersiapkan sebagai konsolidasi awal menuju rencana Aksi Sejuta Umat di Monas.

Ia memperkenalkan simbol lima jari, memperkuat demo sebelumnya yang mengusung hanya tiga jari. Itulah simbol lima tuntutan yang ingin disampaikan para tokoh bangsa yang mewakili puluhan ormas Islam.

Pertama, rakyat bersatu membela Indonesia. Kedua, lawan pengkhianat bangsa dan negara. Ketiga, lawan oligarki dan penguasaan asing atas aset-aset negara. Keempat, tegakkan Pasal 33 UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

Kelima, rakyat bersatu menuntut penegakan hukum secara konsisten. "Hukum harus berlaku kepada siapa pun, termasuk pejabat tinggi, pengusaha besar, pemimpin partai, dan aparat negara," tegas Bachtiar Nasir.

Namun, tuntutan kelima dinilai terlalu samar oleh Prof Jimly Asshiddiqie. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini hadir di panggung, dan mengaku sudah bertemu Kapolri pada hari sebelumnya.

Jimly, mantan Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP), itu menghendaki agar tuntutan kelima lebih tegas: putusan MK dan MA harus menjadi pegangan bagi lembaga negara untuk mengambil keputusan mengenai persoalan Gibran.

Dalam konteks aspirasi sebagian masyarakat, tuntutan itu menjadi semakin jelas arahnya. Para tokoh umat menghendaki pemakzulan Gibran, sebagaimana banyak mereka kemukakan dalam berbagai kesempatan.

Jimly menegaskan, soal Gibran mesti segera diselesaikan melalui jalur konstitusional. Ia mengingatkan, keributan yang tak kunjung selesai dapat mengganggu stabilitas pemerintahan tiga tahun ke depan.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

EKONOMI

Low Tuck Kwong Buka Alasan Haji Isam Dipilih untuk Akuisisi Saham BYAN Rp26,1 Triliun

Oleh Van · 9 Nov, 16.08 WIB



Suasana penuh semangat dan kebersamaan di acara komunitas hari ini. Para peserta tampak antusias mengenakan seragam biru putih yang senada.

JAKARTA – Pengusaha batu bara Low Tuck Kwong akhirnya mengungkap alasan melepas 30,25 persen saham PT Bayan Resources Tbk (BYAN) kepada PT Jhonlin Baratama, perusahaan milik Haji Isam.

Penjualan saham senilai Rp26,1 triliun tersebut disebut sebagai keputusan bisnis yang dilakukan secara transparan dan tanpa tekanan dari pihak mana pun.

Penjelasan itu disampaikan melalui Direktur PT Bayan Resources Tbk, Merlin dalam keterangan resminya Minggu, (8/11/2026).

"Low Tuck Kwong membenarkan BYAN secara nyata menjual saham ke Haji Isam, murni bisnis dan dilakukan transparan serta tidak ada tekanan apa pun," ungkap Merlin.

Ia mengungkapkan, sebelum ditawarkan kepada Haji Isam, saham Bayan Resources sempat dijajaki dengan sejumlah pihak korporasi lain, baik dari dalam maupun luar negeri.

Namun, dari sejumlah pihak yang dihubungi, Haji Isam disebut menjadi pihak yang menunjukkan keseriusan untuk mengambil alih saham tersebut.

Menurut Merlin, transaksi tersebut merupakan bagian dari keputusan bisnis yang telah melalui proses penjajakan.

Kedua pihak juga berharap kerja sama tersebut dapat memberikan dampak positif bagi Indonesia.

"Harapan kedua belah pihak baik Dato dan juga Pak Haji, bersama-sama terus membawa hal yang positif bagi Indonesia," ujarnya.

Merlin juga menjelaskan bahwa Low Tuck Kwong sudah cukup lama mengenal reputasi Haji Isam, khususnya dalam industri pertambangan.

Hubungan keduanya disebut tidak hanya sebatas mengenal nama, tetapi juga berkaitan dengan reputasi Haji Isam sebagai pelaku usaha sekaligus mitra bisnis.

"Reputasinya baik dan mengenal sosok Haji Isam baik sebagai partner bisnis," pungkasnya.

Berdasarkan informasi transaksi, PT Jhonlin Baratama mengakuisisi sebanyak 10.084.088.370 saham BYAN.

Jumlah tersebut setara dengan 30,25 persen dari total kepemilikan saham perusahaan tambang batu bara tersebut.

Nilai transaksi pengambilalihan saham itu mencapai Rp26,1 triliun.

Sebelum transaksi diselesaikan, Low Tuck Kwong bersama putrinya, Elaine Low, telah menandatangani Conditional Sale and Purchase of Shares Agreement atau Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat dengan PT Jhonlin Baratama pada Rabu, (16/9/2026).

Kesepakatan tersebut menjadi dasar proses pengalihan saham kepada perusahaan milik Haji Isam.

Transaksi kemudian rampung pada pertengahan Oktober 2026. Dengan selesainya proses tersebut, PT Jhonlin Baratama resmi masuk dalam struktur kepemilikan Bayan Resources dengan porsi saham sebesar 30,25 persen.(*)

LIFESTYLE

Benarkah Alice Huang Si Pelakor CEO Nvidia Mata-Mata China? Ini Faktanya!

Oleh Redaksi · 9 Nov, 11.03 WIB



BANDA ACEH - Nama Alice Huang mendadak menjadi sorotan dunia setelah terseret dalam skandal perselingkuhan CEO Nvidia, Jensen Huang. Perempuan asal China tersebut bukan hanya dikaitkan dengan hubungan asmara sang miliarder, tetapi juga diduga menjadi bagian dari operasi intelijen Beijing.

Dugaan ini membuat kasus perselingkuhan Jensen Huang berkembang menjadi persoalan keamanan nasional Amerika Serikat. Pasalnya, Alice disebut-sebut memiliki misi khusus untuk mendekati petinggi Nvidia demi mendapatkan informasi strategis terkait teknologi chip kecerdasan buatan (AI).

Lantas, siapa sebenarnya Alice Huang? Benarkah perempuan tersebut merupakan mata-mata China yang sengaja mendekati Jensen Huang? Simak informasi selengkapnya hanya di artikel ini.

Siapa Sebenarnya Alice Huang?

Mengutip laporan The New York Times yang dikutip Associated Press, Alice Huang merupakan perempuan berkewarganegaraan China yang juga dikenal dengan nama Huang Le.

Sebelum namanya terseret dalam kontroversi Nvidia, Alice diketahui pernah bekerja sebagai reporter televisi di China. Dia kemudian berkarier di dunia bisnis hingga menduduki posisi eksekutif di perusahaan pusat data berbasis Singapura, Megaspeed.

Perusahaan tersebut diketahui memiliki hubungan bisnis dengan Nvidia dan menjadi salah satu pelanggan besar produsen chip asal Amerika Serikat itu di kawasan Asia Tenggara.

Bahkan, berdasarkan laporan The New York Times, Megaspeed membeli chip Nvidia senilai lebih dari 4,8 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp78 triliun dalam kurun waktu dua tahun terakhir.

Fakta inilah yang membuat sosok Alice semakin mendapat perhatian. Posisinya di perusahaan yang memiliki hubungan bisnis besar dengan Nvidia dinilai strategis, terlebih ketika Amerika Serikat sedang berupaya membatasi akses China terhadap teknologi chip AI tercanggih.

Alice dan Jensen Huang sendiri tidak memiliki hubungan keluarga.

Benarkah Alice Huang Mata-Mata China?

Dugaan Alice Huang sebagai mata-mata China pertama kali mencuat melalui laporan intelijen Amerika Serikat yang diungkap The New York Times.

Menurut laporan tersebut, badan intelijen Amerika Serikat menyimpulkan bahwa Alice merupakan aset intelijen China yang bertugas mengumpulkan informasi untuk Beijing.

Dia diduga direkrut oleh Kementerian Keamanan Negara China atau Ministry of State Security (MSS) untuk mendekati Jensen Huang.

Misinya bukan sekadar memperoleh informasi pribadi, tetapi juga menggali informasi strategis mengenai Nvidia. Alice disebut berupaya membangun hubungan dekat dengan Jensen agar bisa mendapatkan akses terhadap informasi perusahaan sekaligus memengaruhi kebijakan terkait penjualan chip …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

LIFESTYLE

Geger! CEO Nvidia Jensen Huang Selingkuh dengan Wanita Diduga Mata-Mata China

Oleh Redaksi · 9 Nov, 10.59 WIB



BANDA ACEH - Kabar mengejutkan datang dari CEO sekaligus pendiri perusahaan teknologi Nvidia, Jensen Huang. Sosok yang dikenal sebagai salah satu orang paling berpengaruh di industri kecerdasan buatan (AI) dunia itu mengakui telah berselingkuh dari sang istri.

Pengakuan tersebut langsung menjadi sorotan internasional. Pasalnya, Jensen Huang diduga menjalin hubungan asmara dengan seorang perempuan asal China bernama Alice Huang yang belakangan dikaitkan dengan dugaan operasi intelijen China.

Jensen akhirnya buka suara melalui sebuah pesan internal kepada karyawan Nvidia pada Minggu (8/11/2026). Dalam pernyataannya, dia secara terbuka mengakui telah mengkhianati kepercayaan sang istri dan menyakiti keluarganya.

"Saya tidak setia kepada istri saya. Tindakan saya telah menyakiti dia dan anak-anak kami. Tidak ada alasan yang dapat membenarkan apa yang saya lakukan. Saya sangat menyesal," ungkap Jensen dalam pesannya, dikutip dari Associated Press, Senin (9/11/2026).

Dia juga menyampaikan permintaan maaf kepada rekan kerja, dewan direksi, mitra bisnis, hingga para pemegang saham Nvidia. Jensen mengakui telah gagal memenuhi tanggung jawabnya dan berjanji akan berusaha mendapatkan kembali kepercayaan mereka.

Sosok Alice Huang yang Dikaitkan dengan Skandal CEO Nvidia

Nama Alice Huang ikut menjadi perhatian setelah muncul laporan mengenai hubungan dekatnya dengan Jensen Huang.

Dilansir dari laporan The New York Times yang dikutip sejumlah media internasional, Alice Huang atau Huang Le merupakan seorang eksekutif asal China yang pernah bekerja di perusahaan pusat data berbasis Singapura, Megaspeed.

Perusahaan tersebut diketahui memiliki hubungan bisnis dengan Nvidia dan menjadi salah satu pembeli besar chip AI buatan perusahaan Amerika Serikat itu.

Namun, persoalan ini tidak berhenti pada dugaan perselingkuhan. Alice juga dicurigai oleh otoritas intelijen Amerika Serikat memiliki keterkaitan dengan operasi intelijen China.

Dia diduga direkrut untuk mengumpulkan informasi mengenai Jensen Huang sekaligus berupaya memengaruhi kebijakan Nvidia agar chip AI tercanggih perusahaan tersebut bisa tersedia di China.

Dugaan tersebut membuat hubungan Jensen dengan Alice menjadi perhatian serius pemerintah Amerika Serikat.

Meski demikian, Jensen tidak menyebutkan nama perempuan yang terlibat dalam perselingkuhannya saat menyampaikan pengakuan kepada karyawan. Keterkaitan Alice dengan hubungan tersebut berasal dari laporan media internasional.

Nvidia Lakukan Investigasi, Jensen Huang Tetap Jadi CEO

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

EKONOMI

Dari Manila ke Asia Tenggara: Mengapa Pandangan Pragmatis terhadap Tiongkok Sulit Digoyahkan

Oleh Redaksi · 9 Nov, 09.28 WIB



Pada malam 2 November, sebanyak 23 organisasi utama di Filipina yang mewakili sektor bisnis, tenaga kerja, pertanian, akademisi, dan masyarakat sipil mengeluarkan pernyataan bersama yang menyerukan pemerintah untuk "tetap berpikiran jernih dan menahan diri", segera memulihkan komunikasi diplomatik dengan Tiongkok, serta menghentikan "pernyataan provokatif" dan "tuduhan terbuka". Pernyataan tersebut lebih mencerminkan upaya untuk mengoreksi langkah Politik yang terlalu agresif melalui pertimbangan rasional ekonomi, ketimbang sekadar menunjukkan keberpihakan kepada salah satu pihak. Pernyataan bersama itu secara langsung menanggapi pernyataan sejumlah pejabat Filipina yang belakangan mendorong kebijakan "mengurangi ketergantungan pada Tiongkok", bahkan menyerukan "boikot terhadap produk-produk Tiongkok". Para penandatangan mencakup Kamar Dagang dan Industri Filipina (Philippine Chamber of Commerce and Industry), Konfederasi Pengusaha Filipina (Employers Confederation of the Philippines), Federasi Kamar Dagang dan Industri Filipina-Tiongkok (Federation of Filipino Chinese Chambers of Commerce and Industry), serta Semiconductor and Electronics Industries Foundation, Inc. (SEIFI), yang memiliki representasi luas di berbagai sektor.

Pernyataan tersebut menegaskan: "Terlepas dari perbedaan politik atau sengketa maritim, diplomasi yang konstruktif dan hubungan ekonomi yang stabil sangat penting untuk melindungi kesejahteraan masyarakat, menjaga kepercayaan investor, dan mengendalikan biaya."

Pernyataan ini perlu dipahami dalam konteks struktur ekonomi Filipina. Menurut data Otoritas Statistik Filipina (Philippine Statistics Authority), Tiongkok daratan dan Hong Kong secara bersama-sama menyumbang hampir 30% dari total perdagangan luar negeri Filipina, sementara kontribusi Filipina terhadap total perdagangan global Tiongkok hanya berkisar antara 0,3% hingga 0,5%.

Pada 2025, Filipina mengimpor barang senilai 38,44 miliar dolar AS dari Tiongkok, atau 28,6% dari total impornya. Dengan demikian, Tiongkok menjadi sumber impor terbesar bagi Filipina. Struktur perdagangan yang tidak seimbang ini menunjukkan bahwa eskalasi ketegangan berpotensi menimbulkan dampak yang jauh lebih besar bagi Filipina dibandingkan Tiongkok.

Apabila kebijakan "pemisahan ekonomi" (decoupling) diterapkan pada sektor-sektor konkret seperti bahan baku impor, komponen industri, dan peralatan energi bersih, kebijakan tersebut tidak lagi dapat dipandang sebagai pilihan yang realistis.

Di dalam negeri Filipina, suara-suara yang mengedepankan realitas ekonomi juga tidak sedikit. Tiglao, mantan juru bicara presiden Filipina, dalam sebuah artikel di The Manila Times, menyebut pernyataan Menteri Pertahanan Gilberto Teodoro yang mendorong penghentian impor dari Tiongkok sebagai sesuatu yang "tidak berpengetahuan dan tidak sesuai dengan kenyataan".

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ISLAM

Women's March, Suarakan Gender atau HAM?

Oleh Rut sw · 9 Nov, 09.50 WIB



Gambar ini menampilkan ilustrasi grafis tiga tangan yang mengepal ke atas sebagai simbol perjuangan dan solidaritas. Teks besar bertuliskan 'HAK ASASI MANUSIA' terpampang di bagian tengah dengan dominasi warna merah dan putih yang sangat kontras. FOTO/Net.

EJUMLAH orang mengikuti aksi Women's March Jakarta di kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat (Jakpus).

Mereka menyuarakan sejumlah aspirasi, mulai kesetaraan gender, penolakan pajak pembalut, hingga kritik terhadap program MBG, soal masyarakat Papua yang dinilai masih menghadapi berbagai persoalan.

Terkait pengenaan pajak untuk pembalut, mereka menilai menstruasi merupakan kebutuhan biologis perempuan, bukan bagian dari gaya hidup, sehingga harus dicabut.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) melalui pernyataannya pada 30 Oktober 2026 telah menegaskan, pembalut merupakan kebutuhan esensial, bukan produk mewah atau barang gaya hidup.

Peserta aksi juga menilai keterwakilan perempuan dalam pemerintahan komposisinya masih belum setara dengan laki-laki, mereka mendorong penetapan paritas gender dengan komposisi 50:50 antara perempuan dan laki-laki dalam pemerintahan.

Namun, di antara aksi yang menyerukan kesetaraan gender, ada aksi mengibarkan bendera pelangi dan menyuarakan aspirasi serta orasi terkait hak-hak kelompok LGBT/queer, yang kemudian memicu pro dan kontra di ruang publik.

Namun, pihak penyelenggara menyatakan bahwa Women's March merupakan gerakan bagi hak asasi manusia yang merangkul kelompok perempuan serta kelompok minoritas gender, mereka sama-sama warga negara Indonesia yang membayar pajak dan berhak mendapatkan pemenuhan hak serta perlindungan dari diskriminasi.

Suarakan Kesetaraan Tanpa Tahu Akar Masalah Adalah Sia-Sia

Gerakan kesetaraan gender bukan gerakan baru, melainkan gerakan lama yang hanya berganti baju.

Secara global gerakan ini di mulai pada akhir abad ke-18 hingga abad ke-19, sedangkan di Indonesia mulai digelorakan secara terstruktur sejak awal abad ke-20.

Pada 10 Desember 1948 kesetaraan gender resmi menjadi bagian dari hukum HAM internasional melalui Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang diadopsi oleh PBB.

Gelombang pertama dimulai dengan tulisan Mary Wollstonecraft yang berjudul, "The Vindication of the Rights of Woman" (1792) hingga perempuan mencapai hak pilih pada awal abad keduapuluh (Sanders, 2006).

Tulisan tersebut mengkritisi soal posisi perempuan yang kurang beruntung dari pada laki-laki dalam realitas hak mendapat pendidikan, hak berpolitik, hak kepemilikan dan hak pekerjaan di ranah publik.

Menurutnya, kondisi tersebut disebabkan oleh kebanyakan perempuan yang masih buta huruf, miskin, dan tak memiliki keahlian.

Namun seiring waktu, kesetaraan ini beralih orientasi, tidak hanya membela hak-hak perempuan namun membela minoritas.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

REDAKSI

PENERBIT PT. Harian Aceh Indonesia
PEMIMPIN REDAKSI Muhammad Saman
REDAKTUR PELAKSANA Adam
REDAKTUR Hayat
SEKRETARIS REDAKSI Ola

Jurnalis
Banda Aceh:
1. IRWAN SAPUTRA - NOMOR 12334-PWI/WDa/DP/XII/2017/01/01/912.
2. Hamdani

Bireuen:
1. M. Ilham Sakubat

Lhokseumawe:
1. Yoppi

Aceh Barat:
1. Kurniawan

Jawa Timur:
1. Rut Sriwahyuni

Fotografer:
1. Mishabul Amin
2. Nazaruddin

Social Media Manager:
1. Syukur M. Amin